



DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

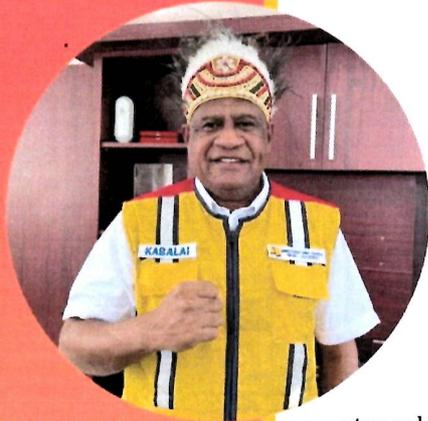
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2021

Satker Balai Pelaksanaan
Jalan Nasional Jayapura





Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Tahun 2021 dapat disusun. Laporan ini merupakan salah satu perwujudan laporan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan bentuk pertanggungjawaban Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Melalui laporan ini, Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja, visi, misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2021. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja *output* dan *outcome* yang telah ditetapkan dan direalisasikan per tahun. Penyusunan laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura kedepannya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga LKIP Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Tahun 2021 ini dapat tersusun untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Jayapura, Januari 2022

KEPALA SATUAN KERJA

**BALAI PELAKSANAAN
JALAN NASIONAL JAYAPURA**



Edu M. P. Sasarari, S.T., M.M.
NIP. 19640504 198703 1 021

BPJN JAYAPURA

 @pupr_jalan_jayapura

 <https://binamarga.pu.go.id/balai-jayapura>

 Kompleks Bina Marga Tanah Hitam
Jl. Abepantai, Abepura-Jayapura

RINGKASAN EKSEKUTIF

- Berdasarkan Peraturan Presiden R.I. Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tugas Kementerian PUPR adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- Dalam lingkup Departemen, penjabaran tugas tersebut dipertegas melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Dalam lingkup Satuan Kerja, penjabaran tugas tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 14/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri;
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tanggal 25 September 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024, maka **terdapat perubahan pada Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program** Direktorat Jenderal Bina Marga;
- Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura sebagai entitas akuntabilitas kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan SAKIP di lingkungannya, termasuk melaksanakan pelaporan kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Interim maupun Laporan Kinerja Tahunan berdasarkan arahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Adapun **SASARAN STRATEGIS** terkait infrastruktur jalan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Bina Marga pada periode 2020-2024 adalah sebagai berikut :

MENINGKATNYA KONEKTIVITAS JARINGAN JALAN NASIONAL

Dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis:

Waktu Tempuh pada jalan lintas utama pulau sebesar 2,19 Jam/100 Km pada tahun 2021.

Dan **SASARAN PROGRAM** sebagai berikut :

MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN JALAN NASIONAL

Dalam mendukung Sasaran Strategis dan Sasaran Program, untuk Tahun Anggaran 2021 Satuan Kerja BPJN Jayapura yang berada di bawah wewenang BPJN Jayapura berkontribusi melalui pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Program sebagai berikut :

- Rating Kondisi Jalan Nasional
 - Baseline 2020 : 2.67
 - Target 2021 : 2.84
 - Capaian 2021 : 2.89, Kemantapan : 81,18% (Sumber : data hasil running IRMS V.03)
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kinerja Satuan Kerja BPJN Jayapura merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja dari Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Satuan Kerja BPJN Jayapura Tahun 2021;
- Realisasi tingkat capaian masing-masing output di Satuan Kerja BPJN Jayapura sebagai berikut:
 1. Tingkat capaian kinerja output Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan sebesar **100%** dari 1 Dokumen yang ditargetkan, semuanya dapat terealisasi;
 2. Tingkat capaian kinerja output Layanan Sarana Internal sebesar **100%** dari 1 Unit yang direncanakan, semuanya dapat terealisasi;
 3. Tingkat capaian kinerja output Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker dari 1 Layanan yang direncanakan, terealisasi 1 Layanan dengan kualitas kinerja **89,37%**;
 4. Tingkat capaian kinerja output Jumlah Layanan Perkantoran dari 1 Layanan yang direncanakan terealisasi 1 Layanan dengan kualitas kinerja sebesar **99,66 %**.
- **Rata-rata Capaian Kinerja untuk seluruh output** yang mendukung capaian Rating Kondisi Jalan Nasional dan Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR di **Satuan Kerja BPJN Jayapura Tahun Anggaran 2021** adalah sebesar **97,26%** dan termasuk dalam kategori **capaian kinerja Sangat Memuaskan**;
- Ditinjau dari aspek keuangan, DIPA Tahun Anggaran 2021 di Satuan Kerja BPJN Jayapura berdasarkan Revisi PK yang dilakukan bulan November 2021 adalah sebesar Rp. 42.578.064.000,-. Pada akhir tahun anggaran 2021 DIPA Revisi Satuan Kerja BPJN Jayapura tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 42.578.064.000,-. **Realisasi keuangan secara total Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. Rp. 40.576.751.000,- atau 95,30 %** terhadap DIPA revisi akhir tahun 2021;
- Besar **realisasi anggaran** Satuan Kerja BPJN Jayapura yang berasal dari **Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat Rating Kondisi Jalan Nasional** adalah sebesar **Rp. 8.570.225.000,-** atau **96,41%** terhadap Anggaran

Revisi, sedangkan **realisasi anggaran yang berasal dari Indikator Kinerja Program Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR** adalah sebesar **Rp. 32.006.526.000-** atau **95,01%** terhadap Anggaran Revisi;

- Beberapa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan Tahun Anggaran 2021 diantaranya sebagai berikut :
 - a. Adanya pandemi COVID-19 sehingga banyak kegiatan tertunda bahkan belum dapat terealisasi tahun ini;
 - b. Faktor SDM dimana jumlah dan keahlian SDM teknik yang belum memadai.
- Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi kendala di atas adalah sebagai berikut :
 - a. Satuan Kerja sebagai unit yang paling berperan dalam capaian kinerja wajib berkomitmen dan memperhatikan target yang telah ditetapkan pada awal tahun sehingga meminimalisir masalah keterlambatan dari sisi administrasi dan progress pekerjaan di lapangan;
 - b. Disiplin melakukan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai upaya kontrol kinerja Satuan Kerja agar jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan di lapangan dapat segera dicarikan solusi sehingga target penyerapan anggaran dan pelaksanaan pekerjaan dapat terealisasi dengan baik, tepat mutu, dan tepat sasaran. Catatan untuk kondisi di masa pandemi, bisa dilakukan secara online menggunakan aplikasi *Zoom*;
 - c. Fokus dari PPK dan Kasatker untuk mengatur strategi peningkatan kinerja guna mengejar ketertinggalan progress dan melakukan penyesuaian pelaksanaan pekerjaan untuk memperkecil resiko penyebaran virus COVID-19 di tengah pelaksanaan pekerjaan sesuai Instruksi Menteri PUPR No 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang ditetapkan pada 27 Maret 2020, mengingat memasuki tahun 2021 pandemi COVID-19 masih terus terjadi khususnya di Provinsi Papua;
 - d. Masukan kepada petugas e-Monitoring dan juga PPK untuk aktif saling berkoordinasi sehubungan dengan rutinitas kebutuhan updating progress di e-Monitoring dan penetapan angka target rencana fisik dan keuangan masing-masing kegiatan yang terencana dengan baik dan logis di masing-masing Satker;
 - e. Proses perencanaan dan pengukuran kerjanya, maka dipandang perlu untuk menerapkan secara konsisten seluruh elemen SAKIP agar penyusunan dan pelaporan LKIP, baik LKIP Satminkal maupun Unit kerja, dapat lebih disempurnakan lagi untuk peningkatan penerapan SAKIP dimasa mendatang.
- Penyusunan dan pelaporan kinerja di lingkungan Satuan Kerja BPJN Jayapura pada tahun 2021 telah berjalan cukup baik sesuai dengan yang diharapkan karena keseluruhan elemen SAKIP sudah dapat diterapkan. Penerapan SAKIP yang baik tersebut akan sangat berperan dalam meningkatkan perwujudan budaya berbasis kinerja di lingkungan Satuan Kerja BPJN Jayapura guna mewujudkan *good governance* yang dicita-citakan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas dan Fungsi	2
1.3 Struktur Organisasi	10
1.4 Isu Strategis	11
1.4.1 Isu Strategis Provinsi Papua	13
1.4.2 Program Strategis untuk menjawab Isu Strategis di Provinsi Papua	19
1.4.3 Tantangan Pembangunan Tahun 2020	20
1.5 Sistematika Penyusunan LKIP.....	21
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	23
2.1 Uraian Singkat Dokumen Perencanaan Lainnya	23
2.1.1 Visi dan Misi Kementerian PUPR.....	23
2.1.2 Tujuan Kementerian PUPR	24
2.1.3 Sasaran Kementerian PUPR	25
2.1.4 Tujuan dan Sasaran Ditjen Bina Marga 2020-2024	25
2.1.5 Tujuan dan Sasaran BPJN Jayapura 2020-2024.....	30
2.1.6 Tujuan dan Sasaran Satker BPJN Jayapura 2020-2024	36
2.2 Perjanjian Kinerja (PK).....	37
2.2.1 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi 2021.....	37
2.2.2 Sandingan PK Awal dan PK Revisi 2021	39

2.3 Metode Pengukuran.....	40
2.4 Target Tahun ini Menurut Dokumen Perencanaan	45
BAB III. KAPASITAS ORGANISASI	47
3.1 Sumber Daya Manusia.....	47
3.1.1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	47
3.1.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	48
3.1.3 Klasifikasi PNS Berdasarkan Golongan Kepegawaian	49
3.1.4 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	49
3.1.5 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Teknik & Non Teknik	51
3.1.6 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Usia	52
3.1.7 Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Kelompok Jabatan	53
3.2 Sarana dan Prasarana	55
3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).....	63
3.3.1 Perubahan Anggaran	63
BAB IV. AKUNTABILITAS KINERJA	67
4.1 Capaian Kinerja Organisasi	68
4.2 Perbandingan Kinerja Organisasi	77
4.3 Realisasi Anggaran.....	80
4.3.1 Analisis Efisiensi Sumber Daya	82
4.3.2 Analisis Penyerapan Anggaran.....	84
BAB V. PENUTUP.....	89
5.1 Permasalahan	89
5.2 Rekomendasi	90

LAMPIRAN

- **Lampiran I** Surat Pernyataan & Perjanjian Kinerja TA. 2021 (Awal);
- **Lampiran II** Surat Pernyataan & Perjanjian Kinerja TA. 2021 (Revisi);
- **Lampiran III** Pengukuran Kinerja TA. 2021;
- **Lampiran IV** Data Kaki LKIP TA. 2021;
- **Lampiran V Dokumentasi** Pelaksanaan Pekerjaan TA. 2021

DAFTAR TABEL

BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	23
Tabel II.1 Target Indikator Kinerja Program 2020-2024 dalam mendukung Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga	31
Tabel II.2 Target Indikator Kinerja Program 2020 – 2024 dalam mendukung Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga untuk Provinsi Papua.....	32
Tabel II.3 Target Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan berdasarkan Renstra BPJN Jayapura 2020-2024.....	34
Tabel II.4 Kebutuhan Pendanaan dalam Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan Renstra BPJN Jayapura Tahun 2020-2024	35
Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021 (Awal) Satuan Kerja BPJN Jayapura.....	38
Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021 (Revisi) Satuan Kerja BPJN Jayapura.....	38
Tabel II. 7 Sandingan PK Awal dengan PK Revisi Tahun Anggaran 2021	40
Tabel II. 8 Metode Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program	42
Tabel II. 9 Metode Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan/Output Fisik.....	45
Tabel II.10 Sandingan Target Perjanjian dengan Dokumen Perencanaan Satker BPJN Jayapura di Tahun 2021	46
BAB III. KAPASITAS ORGANISASI	47
Tabel III.1 Komposisi Pegawai di lingkungan Satker BPJN Jayapura	54
Tabel III. 2 Rekapitulasi Jenis Sarana dan Prasarana pada Satuan Kerja BPJN Jayapura.....	56
Tabel III. 3 Laporan Kondisi Barang pada Satuan Kerja BPJN Jayapura	56
Tabel III. 4 Kronologis Revisi DIPA pada Satker BPJN Jayapura T.A. 2021	64
BAB IV. AKUNTABILITAS KINERJA	67
Tabel IV.1 Tabel Kriteria Penilaian.....	68

Tabel IV.2	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program Satker BPJN Jayapura TA. 2021.....	71
Tabel IV.3	Capaian Kinerja Output Pendukung Rating Kondisi Jalan Nasional dan Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR Satker BPJN Jayapura Tahun 2021	71
Tabel IV.4	Perbandingan Capaian Kinerja Tahunan terhadap Target Awal (PK Revisi) Tahun 2019-2021	78
Tabel IV.5	Perbandingan Target Dokumen Perencanaan Lainnya dengan Realisasi Kinerja Satker BPJN Jayapura Tahun 2021.....	79
Tabel IV.6	Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021.....	80
Tabel IV.7	Realisasi Penyerapan Anggaran Per Satuan Kerja Tahun Anggaran 2021	84
Tabel IV.8	Realisasi Anggaran Tahun 2019-2021 Satker BPJN Jayapura	85
Tabel IV.9	Point-point Perhatian dan Tindak Lanjut.....	86

DAFTAR GAMBAR

BAB I. PENDAHULUAN.....	1
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura	10
Gambar 1.2 Peta Jaringan Jalan Nasional Provinsi Papua	11
Gambar 1.3 Pembagian Wilayah Penanganan BPJN Jayapura, BPJN Wamena dan BPJN Merauke.....	12
Gambar 1.4 Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Wilayah Provinsi Papua	15
Gambar 1.5 Peta Lokasi Pelabuhan Laut dan Udara Provinsi Papua dan Papua Barat.....	16
Gambar 1.6 Peta Sebaran Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Pulau Papua	16
Gambar 1.7 Peta Pembagian Wilayah Adat Provinsi Papua	18
Gambar 1.8 Peta Konektivitas infrastruktur Transportasi Terpadu Provinsi Papua	18
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	23
Gambar 2.1 Peta Strategi (<i>Strategy Map</i>) Kementerian PUPR 2020-2024	25
Gambar 2.2 Peta Strategi (<i>Strategy Map</i>) Ditjen Bina Marga 2020-2024	27
Gambar 2.3 Struktur dan Indikator Kinerja Ditjen Bina Marga 2020-2024 (1).....	28
Gambar 2.4 Struktur dan Indikator Kinerja Ditjen Bina Marga 2020-2024 (2).....	28
Gambar 2.5 Tahapan Pengukuran Kinerja	41
BAB III. KAPASITAS ORGANISASI.....	47
Gambar 3.1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	47
Gambar 3.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	48
Gambar 3.3 Klasifikasi PNS Berdasarkan Golongan Kepegawaian	49

Gambar 3.4 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	50
Gambar 3.5 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Teknik & Non Teknik	51
Gambar 3.6 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia	52
Gambar 3.7 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jabatan	53
BAB IV. AKUNTABILITAS KINERJA	67
Gambar 4.1. Sistem Akuntabilitas Kinerja.....	68
Gambar 4.2. Realisasi Kinerja Output Satker BPJN Jayapura TA. 2021	77
Gambar 4.3. Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Tahunan terhadap Target PK Revisi Tahun 2019-2021	79
Gambar 4.4. Jumlah Sumber Daya Manusia dan Capaian Progres Fisik dan Keuangan di lingkungan BPJN Jayapura Tahun 2020-2021.....	83
Gambar 4.5. Grafik Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2021.....	86

The image shows the cover of a book. The background is a photograph of a suspension bridge over a river, with a dense forest on the hills in the background. The image is framed by a blue border. The title 'BAB I' is written in large, bold, black capital letters, and 'Pendahuluan' is written in a black, cursive script below it. The cover has a color gradient: orange at the top, yellow at the bottom, and a blue vertical band on the left and right sides.

BAB I

Pendahuluan

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, setiap entitas akuntabilitas kinerja secara berjenjang mulai dari Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi, Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga wajib untuk menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sejalan dengan peraturan tersebut, sebagai upaya konkret dalam mewujudkan akuntabilitas, transparansi dan produktivitas kinerja, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku entitas Kementerian juga menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara selaras dan sesuai dengan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Hal ini ditegaskan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai panduan bagi setiap entitas dalam penyelenggaraan SAKIP untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil. Adapun penyelenggaraan SAKIP yang tercantum dalam Peraturan Menteri tersebut meliputi :

- a. Rencana Strategis;
- b. Perjanjian Kinerja;
- c. Pengukuran Kinerja;
- d. Pengelolaan Data Kinerja;
- e. Pelaporan Kinerja; dan
- f. Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga dijelaskan mengenai hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Adapun tujuan pelaporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;

- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura untuk meningkatkan kinerjanya.

Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja. Selanjutnya Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan dilakukan secara berkala (bulanan) dan tahunan. Pengukuran Kinerja merupakan salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jayapura ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Satuan Kerja BPJN Jayapura dalam upaya peningkatan kinerjanya kedepan.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 14/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri, organisasi Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Tahun 2021 masing-masing menurut tugas dan tanggung jawabnya terdiri dari :

1. Kepala Satker
 - a. Tugas :
 - 1) Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - 2) Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website PU net;
 - 3) Menetapkan pejabat pengadaan;
 - 4) Menetapkan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - 5) Menetapkan Panitia Peneliti Kontrak;
 - 6) Mengawasi Pelaksanaan Anggaran sesuai DIPA;
 - 7) Menyampaikan Laporan Keuangan dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - 8) Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;

- 9) Mengawasi Penyimpanan dan Pemeliharaan seluruh dokumen Pengadaan Barang/ Jasa dan menerima hasil pekerjaan pengadaan Barang/ Jasa dilampiri dokumen laporan dalam bentuk hardcopy dan softcopy;
 - 10) Mengirimkan dokumen laporan hasil pekerjaan dalam bentuk softcopy kepada Sekretaris Jenderal melalui PUSDATA dan dalam bentuk hardcopy kepada unit pengelola BMN di masing-masing Unit Kerja Eselon I;
 - 11) Menetapkan Tim Teknis dan Tim Juri/ Tim Ahli untuk Pelaksanaan apabila diperlukan;
 - 12) Melaksanakan seluruh tugas Satker terutama pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA;
 - 13) Memimpin pelaksanaan seluruh rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA;
 - 14) Memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk kepada Pejabat Inti Satker dibawahnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran/ output yang telah ditetapkan;
 - 15) Mengusulkan pembantu Pejabat Inti Satker yang dipimpinnya sesuai kebutuhan yang selanjutnya ditetapkan oleh Atasan Langsungnya;
 - 16) Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan selanjutnya menyampaikannya kepada Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Penandatanganan SPM;
 - 17) Menandatangani Surat Keputusan/ Surat Perintah Kerja/ Kontrak (dalam hal Kasatker merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen);
 - 18) Dalam hal Kasatker tidak merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, penandatanganan Surat Keputusan/ Surat Perintah Kerja/ Kontrak dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 19) Melaporkan setiap terjadinya kerugian Negara menurut bentuk dan cara yang ditetapkan, tepat pada waktunya kepada Pengguna Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 20) Menyusun usulan Rencana Kegiatan Satker Tahunan yang merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL) untuk tahun berikutnya.
- b. Tanggung jawab :
- 1) Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan/rencana kerja yang tertuang dalam DIPA;
 - 2) Bertanggung jawab atas semua penerimaan/pengeluaran Satker yang membebani APBN;
 - 3) Bertanggung jawab atas kebenaran material setiap Surat Keputusan/Surat Perintah Kerja/Kontrak yang ditandatanganinya serta akibat yang timbul dari SK/SPK/Kontrak tersebut. (Dalam hal Kasatker merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen);
 - 4) Bertanggung jawab terhadap realisasi keuangan dan pencapaian keluaran/output yang telah ditetapkan;

- 5) Bertanggung jawab terhadap penatausahaan dan pemeliharaan Barang Milik/Kekayaan Negara Satker;
 - 6) Bertanggung jawab atas tertib penatausahaan pengadaan barang dan jasa yang dialokasikan kepada Satker yang dipimpinnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) Bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran melalui Atasan/Atasan Langsung/Penanggung jawab Program.
2. Pejabat Pembuat Komitmen
- a. Tugas :
- 1) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang meliputi : Spesifikasi teknis Barang/ Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan Rencan Kontrak;
 - 2) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
 - 3) Menandatangani Kontrak/ Surat Perintah Kerja;
 - 4) Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;
 - 5) Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
 - 6) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada Kasatker;
 - 7) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa kepada Kasatker dengan Berita Acara Penyerahan;
 - 8) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Kasatker setiap triwulan;
 - 9) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa;
 - 10) Mengusulkan kepada Kasatker mengenai perubahan paket pekerjaan, dan/ atau perubahan paket pekerjaan, dan/ atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan apabila diperlukan;
 - 11) Menetapkan tim pendukung termasuk Panitia Peneliti Kontrak, apabila diperlukan;
 - 12) Menetapkan Tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*Aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP apabila diperlukan;
 - 13) Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia Barang/Jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 14) Menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia Barang/ Jasa;
 - 15) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan Barang/Jasa kepada Kasatker;
 - 16) Menyerahkan aset hasil pengadaan Barang/ Jasa dan aset lainnya kepada Menteri dengan berita acara penyerahan melalui Kasatker dilampiri dokumen laporan dalam bentuk hardcopy dan softcopy;
 - 17) Menandatangani pakta integritas;
 - 18) Melaksanakan rencana kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam DIPA;

- 19) Menandatangani Surat Keputusan yang mengakibatkan pengeluaran (gaji non PNS, lembur, honor, vakasi dan perjalanan dinas);
 - 20) Menyusun Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa untuk kegiatan yang tercantum dalam DIPA dan dokumen pendukungnya maupun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan secara swakelola;
 - 21) Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita acara Pemeriksaan Barang;
 - 22) Menandatangani bukti-bukti dokumen pengeluaran anggaran Satker, baik yang dilakukan secara kontraktual maupun secara swakelola;
 - 23) Menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP) serta dokumen pendukungnya atas persetujuan Kasatker dan selanjutnya diteruskan kepada Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran;
 - 24) Mengajukan tagihan pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran yang membebani Uang Persediaan;
 - 25) Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai DIPA dan menyampaikannya kepada Kasatker;
 - 26) Menyusun usulan Rencana Kegiatan Satker Tahunan yang merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) tahun berikutnya.
- b. Tanggung jawab :
- 1) Bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari Kontrak/SPK atau keputusan dan surat bukti lainnya yang ditandatanganinya;
 - 2) Bertanggung jawab atas realisasi keuangan dan keluaran/output kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja yang ditetapkan dalam DIPA;
 - 3) Bertanggung jawab kepada Kasatker.
3. Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran
- a. Tugas :
- 1) Menerima berkas SPP yang disampaikan oleh Pejabat Yang Melakukan Tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja;
 - 2) Memeriksa kelengkapan berkas SPP dan mencatat dalam buku pengawasan penerimaan SPP;
 - 3) Memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4) Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran;
 - 5) Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain :
 - a) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, No. rekening dan nama Bank);

- b) Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak berkenaan);
 - c) Jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal penarikan dana yang tercantum dalam DIPA serta ketepatannya terhadap jadwal waktu pembayaran guna meyakinkan bahwa tagihan yang harus dibayar belum daluwarsa).
- 6) Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - 7) Menandatangani dan menerbitkan SPM sekurang-sekurangnya dalam rangkap 6 dengan ketentuan :
 - a) Lembar kesatu dan lembar kedua disampaikan kepada KPPN pembayar;
 - b) Lembar ketiga sebagai pertinggal pada Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Paerintah Pembayaran;
 - c) Lembar keempat disampaikan kepada Petugas Akutansi/Verifikasi Keuangan;
 - d) Lembar kelima disampaikan kepada Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pembuat Komitmen;
 - e) Lembar keenam disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
 - 8) Menyampaikan SPM yangtelah ditandatangani ke KPPN setempat;
 - 9) Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai DIPA dan menyampaikannya kepada Kepala Kuasa Pengguna Anggaran/Barang/Kepala Satuan Kerja selaku Atasan Langsungnya.
- b. Tanggung jawab :
- 1) Bertanggung terhadap seluruh kegiatan pengujian dan perintah pembayaran serta akibat yang timbul atas tindakannya meliputi aspek hukum, peraturan perundang-undangan, dan tujuan pengeluaran;
 - 2) Bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang/Kepala Satuan Kerja.
4. Bendahara Pengeluaran
- a. Tugas :
- 1) Menyelenggarakan pembukuan seluruh transaksi keuangan yang dilaksanakan Satuan Kerja pada Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Buku Pengawasan Anggaran;
 - 2) Menyiapkan rincian jumlah Pengajuan SPP-UP, SPP-TUP, dan SPP-GUP serta dokumen-dokumen pendukung lainnya;
 - 3) Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan selanjutnya menyampaikannya kepada Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran;

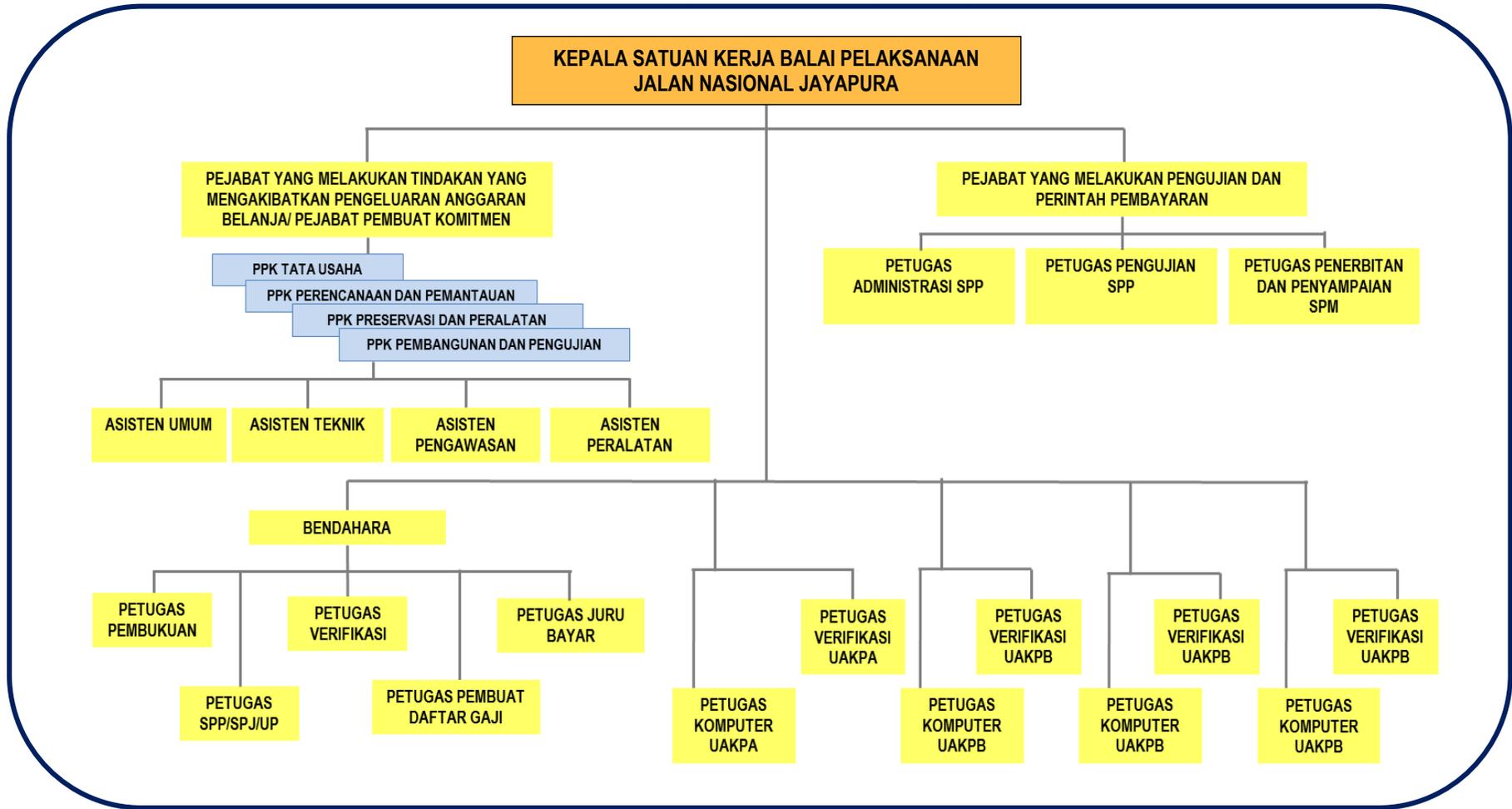
- 4) Menandatangani SPP-LS yang pembayarannya melalui Rekening Bendahara;
 - 5) Melakukan pengamanan Kas serta surat-surat berharga lainnya yang berada dalam pengurusannya (Brankas) untuk menghindari terjadinya kerugian negara;
 - 6) Menguji kebenaran tagihan pembayaran Uang Persediaan meliputi kesesuaian dengan Akun, DIPA dan peraturan keuangan yang berlaku sebelum dilakukan pembayaran;
 - 7) Melakukan pembayaran melalui Uang persediaan atas persetujuan Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja Satuan Kerja untuk Belanja Barang (52), Belanja Modal (53) untuk pengeluaran honor tim, ATK, perjalanan dinas, biaya pengumuman lelang, pengurusan surat perizinan dan pengeluaran lain yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dalam rangka perolehan aset; dan Belanja lain-lain (58), dapat diberikan pengecualian untuk DIPA Pusat yang kegiatannya berlokasi di daerah serta DIPA yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat dan pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada satu rekanan tidak boleh melebihi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kecuali untuk pembayaran honor dan perjalanan dinas;
 - 8) Wajib menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat yang ditunjuk apabila persyaratan pembayar tidak terpenuhi;
 - 9) Menerima dan menyetor ke Rekening Kas Negara atas pajak dan penerimaan lainnya yang dipungut serta melaporkannya menurut bentuk dan cara yang telah ditetapkan, tepat pada waktunya kepada masing-masing Instansi yang terkait;
 - 10) Menyelenggarakan tata kearsipan yang bersangkutan dengan bukti-bukti pembukuan;
 - 11) Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) bendahara kepada :
 - KPPN setempat;
 - BPK RI;
 - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- b. Tanggung jawab :
- 1) Bertanggung jawab atas pengeolaan uang persediaan;
 - 2) Bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan Negara yang berada dalam pengurusannya;
 - 3) Bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang/Kepala Satuan Kerja.
5. Penanggung jawab Unit Akuntansi Satuan Kerja
1. *Petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)*
 - a. Tugas :
 - 1) Menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca Satuan Kerja sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

- 2) Melakukan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran dengan KPPN terkait;
 - 3) Menyampaikan LRA dan Neraca kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) beserta Arsip Data Komputer (ADK) secara tepat waktu.
- b. Tanggung jawab :
- 1) Bertanggung jawab atas kebenaran materi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
 - 2) Bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan Kerja.
2. *Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)*
- a. Tugas :
- 1) Menyusun Laporan Barang Milik Negara (Laporan BMN) dan Laporan Kondisi Barang (LKB) Satuan Kerja sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - 2) Menyampaikan Laporan BMN dan LKB kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) beserta Arsip Data Komputer (ADK) untuk penyusunan neraca secara tepat waktu;
 - 3) Menyampaikan Laporan BMN LKB kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon-1 (UAPPB-E1) beserta Arsip Data Komputernya.
- b. Tanggung jawab :
- 1) Bertanggung jawab atas kebenaran materi Laporan BMN dan LKB sesuai Standar Akuntansi Pemerintah;
 - 2) Bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang /Kepala Satuan Kerja
3. *Petugas E-monitoring*
- a. Tugas :
- 1) Mengumpulkan dan mendokumentasikan data dan informasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi :
 - a) Rekaman DIPA dan POK yang telah disahkan.
 - b) Rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
 - c) Data pelaksanaan kegiatan (rencana dan capaian progress fisik dan realisasi keuangan).
 - d) Data rencana dan realisasi penyerapan tenaga kerja.
 - e) Permasalahan dan tindak lanjut dalam pelaksanaan kegiatan.
 - 2) Mengisi data pelaksanaan kegiatan ke dalam aplikasi e-Monitoring setiap kali ada perubahan dan informasi dan mengirim back-up data melalui e-monitoring online.
 - 3) Melakukan pemutakhiran aplikasi e-monitoring offline

- 4) Menyusun dan menyampaikan laporan progress fisik dan keuangan secara periodic sesuai ketentuan.
 - 5) Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan rencana pembangunan sesuai ketentuan.
- b. Tanggung jawab :
- 1) Bertanggung jawab atas kebenaran materi laporan pelaksanaan kegiatan (backup data maupun cetakan);
 - 2) Bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang/Kepala Satuan Kerja.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Tahun 2021 dapat dilihat pada **Gambar 1.1** :

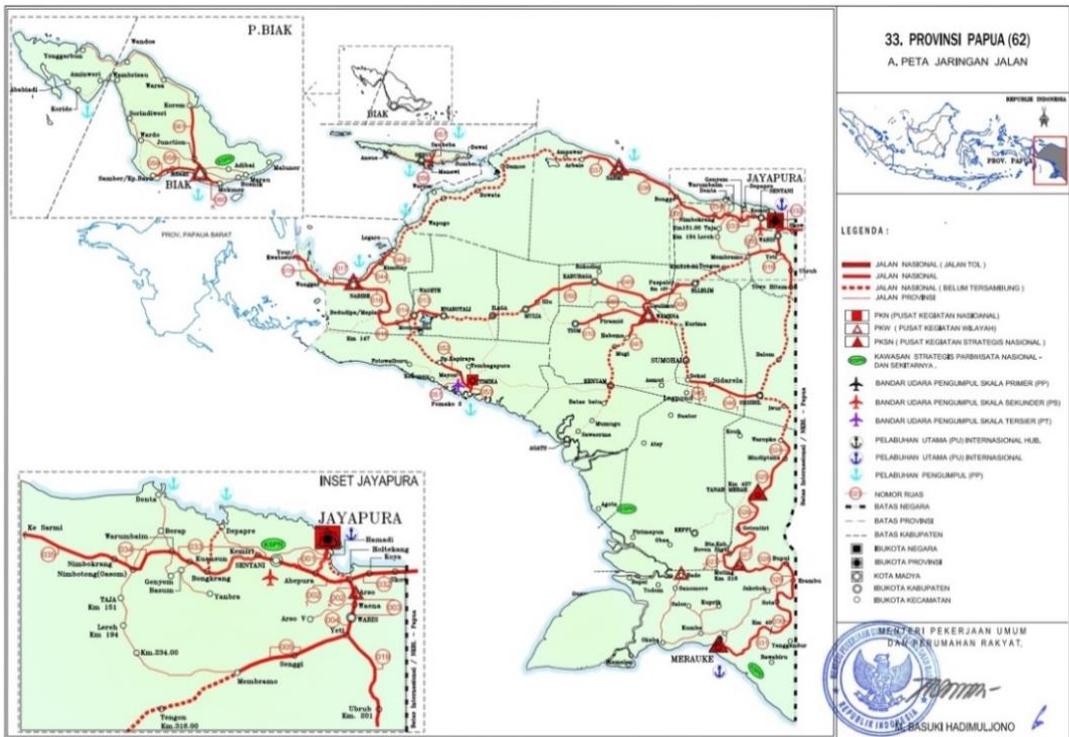


Gambar 1.1 Struktur Organisasi Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura

1.4 ISU STRATEGIS

Provinsi Papua memiliki cakupan wilayah yang cukup luas dan berada di ujung timur wilayah Indonesia. Luas Provinsi Papua (termasuk pulau-pulau di sekitarnya) sebesar ± 312 224,37 km² (Sumber : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua, 2020), dengan jumlah penduduk ±3,4 juta jiwa dan terbagi dalam 28 kabupaten dan 1 kota yang terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Secara geografis dan topografi, pada bagian tengah dan sebagian pantai utara merupakan pegunungan yang tinggi, sedangkan bagian pantai selatan didominasi dengan dataran luas.

Seiring dengan berkembangnya suatu wilayah, maka kuantitas, harga dan waktu menjadi pertimbangan yang penting. Peran infrastruktur jalan menjadi salah satu solusi dalam pemerataan distribusi barang maupun jasa kebutuhan masyarakat ke daerah-daerah yang sulit dijangkau terutama dalam jumlah yang besar, murah dan dalam waktu yang relatif lebih singkat. Bagi masyarakat Papua pada umumnya, sarana transportasi merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, terutama sarana transportasi darat, disebabkan oleh wilayahnya yang luas dan dengan penyebaran penduduk yang tersebar. Rasio panjang jalan yang ada dibanding luas wilayahnya menjadikan Papua menempati posisi terendah dibanding dengan daerah lain, terkait dengan indeks aksesibilitas transportasi darat. Pada kondisi ini, BPJN Jayapura mengambil peranan yang sangat penting dalam melaksanakan dan mengendalikan infrastruktur jalan dan juga sebagai pembina bagi infrastruktur jalan di tingkat provinsi dan kabupaten.

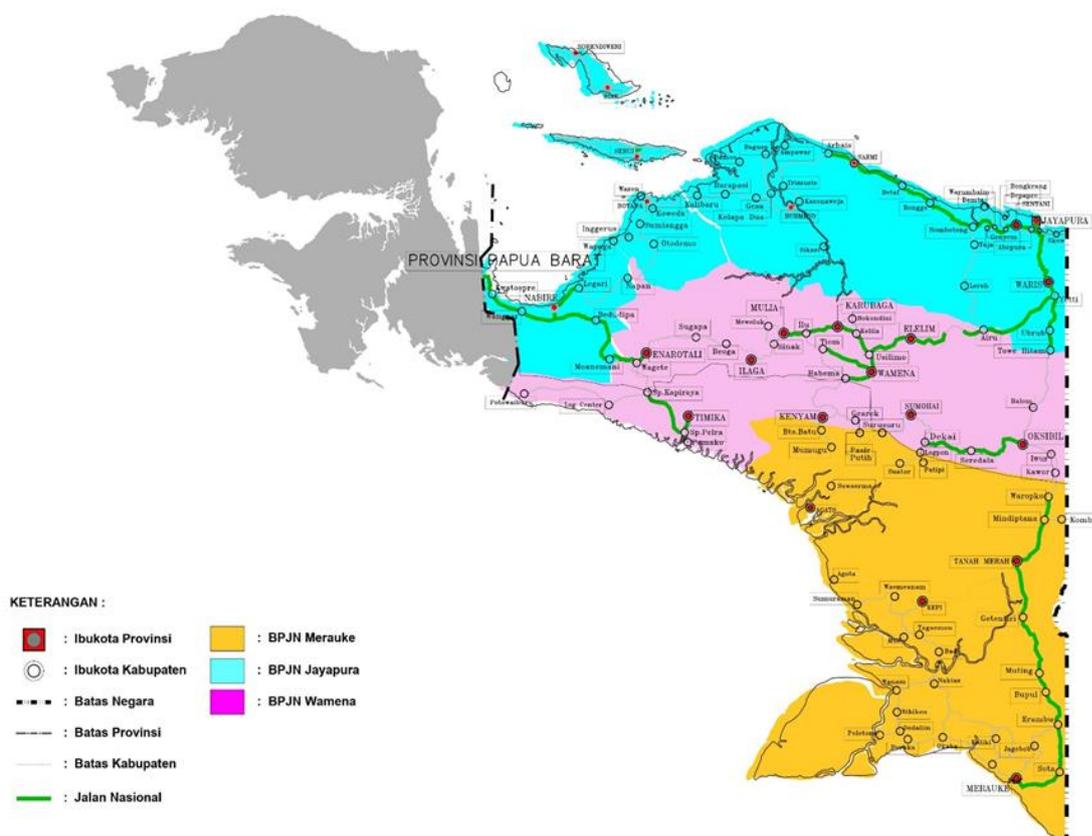


Gambar 1.2 Peta Jaringan Jalan Nasional Provinsi Papua

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 290/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional, ruas jalan nasional di Provinsi Papua tercatat sepanjang 2.636,73 Km dan terdiri dari 77 ruas yang ditangani oleh 3 (tiga) Balai yaitu BPJN Jayapura, BPJN Wamena dan BPJN Merauke. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada 2 Juni 2020, terjadi pemekaran pada BBPJN XVIII Jayapura dengan lahirnya BPJN Jayapura dan BPJN Wamena. Dari total panjang ruas jalan nasional Provinsi Papua tersebut, sebanyak 48 ruas dengan total sepanjang 1.225,37 Km ditangani oleh BPJN Jayapura, sepanjang 848,18 Km ditangani oleh BPJN Wamena dan sisanya ditangani oleh BPJN Merauke.

- >> Panjang Jalan Nasional Provinsi Papua : 2.636,73 Km
- >> Panjang Jalan Nasional BPJN Jayapura : 1.255,37 Km
- >> Panjang Jalan Nasional BPJN Wamena : 848,18 Km
- >> Panjang Jalan Nasional BPJN Merauke : 533,31 Km

Dibawah ini merupakan peta ilustrasi pembagian wilayah penanganan BPJN Jayapura, BPJN Wamena, dan BPJN Merauke di Provinsi Papua :



Gambar 1.3 Pembagian Wilayah Penanganan BPJN Jayapura, BPJN Wamena dan BPJN Merauke

Adapun total penanganan panjang jalan dan jembatan secara keseluruhan yang berada di bawah kewenangan BPJN Jayapura tercatat sepanjang 1.642,50 Km yang terdiri dari :

RUAS JALAN PENANGANAN BPJN JAYAPURA		
Jalan Nasional	: 1,255.37	1,255.37
Trans Papua	: 605.31	
Terdapat Jalan Nasional	: 462.18	
Sisa panjang (Non Nasional)	: 143.13	143.13
Jalan Perbatasan	: 429.92	
Terdapat Jalan Nasional	: 185.92	
Sisa panjang (Non Nasional)	: 244.00	244.00
TOTAL PANJANG		1,642.50

Tantangan pembangunan di Provinsi Papua salah satunya disebabkan oleh wilayahnya yang sangat luas dengan pola penduduk yang menyebar di sebagian besar wilayah khususnya kawasan pegunungan, hal ini menyebabkan ada beberapa lokasi yang masih terisolir. Secara umum kondisi topografi di Provinsi Papua relatif bervariasi, berupa dataran rendah, rawa - rawa disekitar pantai, dan rangkaian pegunungan membentang dibagian tengahnya sepanjang sekitar 650 Km, dengan puncak tertinggi mencapai 4.884,00 mdpl.

Dalam hal aksesibilitas jalan darat, Provinsi Papua masih tergolong berada pada tingkat terendah secara nasional. Masalah aksesibilitas jalan darat ini menjadi permasalahan yang selalu mengemuka, hampir disetiap momen-momen pembahasan atau diskusi tentang pembangunan Papua. Di kawasan Pegunungan Tengah terutama pada kabupaten-kabupaten, masih sangat banyak yang hanya dapat dilayani dengan moda transportasi udara untuk angkutan orang dan barang. Adapun layanan moda transportasi udara mempunyai ciri-ciri kapasitas yang sangat terbatas dan umumnya tidak terjadwal serta sangat tergantung pada kondisi cuaca dengan biaya transportasi yang sangat mahal.

Kondisi keterisolasian akibat belum adanya akses jalan darat yang memadai ini, memunculkan permasalahan di berbagai sektor pembangunan, utamanya pada aspek perekonomian, kesehatan, dan pendidikan masyarakat. Permasalahan sosial, menyangkut rasa ketidakadilan juga banyak mengemuka yang dalam beberapa kesempatan disampaikan oleh para tokoh adat, masyarakat, bahkan beberapa pejabat daerah. Dalam penyelenggaraan jalan di Provinsi Papua, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura berkewajiban tidak hanya untuk menjaga dan meningkatkan kemantapan jalan yang telah ada, namun sekaligus mengakomodir tuntutan pembangunan jalan dalam rangka peningkatan aksesibilitas di Provinsi Papua.

1.4.1 Isu Strategis Provinsi Papua

1. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang sesuai dengan Tata Ruang Provinsi Papua

Isu strategis ini sejalan dengan salah satu konsep dasar pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua dimana pengembangan infrastruktur diharapkan sesuai dengan peran dan fungsi sistem kota-kota yang

saling menghubungkan pusat dengan pusat, pusat dengan sub pusat, serta sub pusat dengan perkampungan yang bertujuan mempermudah pergerakan barang/ jasa/ manusia, serta jalur distribusi dan pemasaran sehingga pada akhirnya dapat mendukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah bahkan berpotensi menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru. Kegiatan penanganan ruas jalan dan jembatan yang dilakukan oleh BPJN Jayapura juga diharapkan dapat menjadi solusi dalam menghadapi isu strategis pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan peraturan tata ruang sekaligus mendukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pengembangan kawasan strategis di Provinsi Papua yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagai berikut :

Sistem Perkotaan Nasional

- Pusat Kegiatan Nasional atau PKN
 - Jayapura** (Tahapan Pengembangan: pengembangan/peningkatan fungsi Kota-Kota Pusat Pertumbuhan Nasional)
- Pusat Kegiatan Wilayah atau PKW
 - **Biak** (Tahapan Pengembangan: pengembangan/peningkatan fungsi Kota-Kota Pusat Pertumbuhan Nasional);
 - **Nabire** (Tahapan Pengembangan: pengembangan/peningkatan fungsi Kota-Kota Pusat Pertumbuhan Nasional);
 - **Sarmi** (Tahapan Pengembangan: pengembangan baru Kota-Kota Pusat Pertumbuhan Nasional);
 - **Arso** (Tahapan Pengembangan: pengembangan/peningkatan fungsi Kota-Kota Pusat Pertumbuhan Nasional).
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional atau PKSN
 - **Jayapura** (Tahapan Pengembangan: pengembangan/peningkatan fungsi Percepatan Pengembangan kota-kota utama Kawasan Perbatasan);
 - **Biak** (Tahapan Pengembangan: pengembangan/peningkatan fungsi Percepatan Pengembangan kota-kota utama Kawasan Perbatasan).

Kawasan Andalan (sektor unggulan yang prospektif dikembangkan)

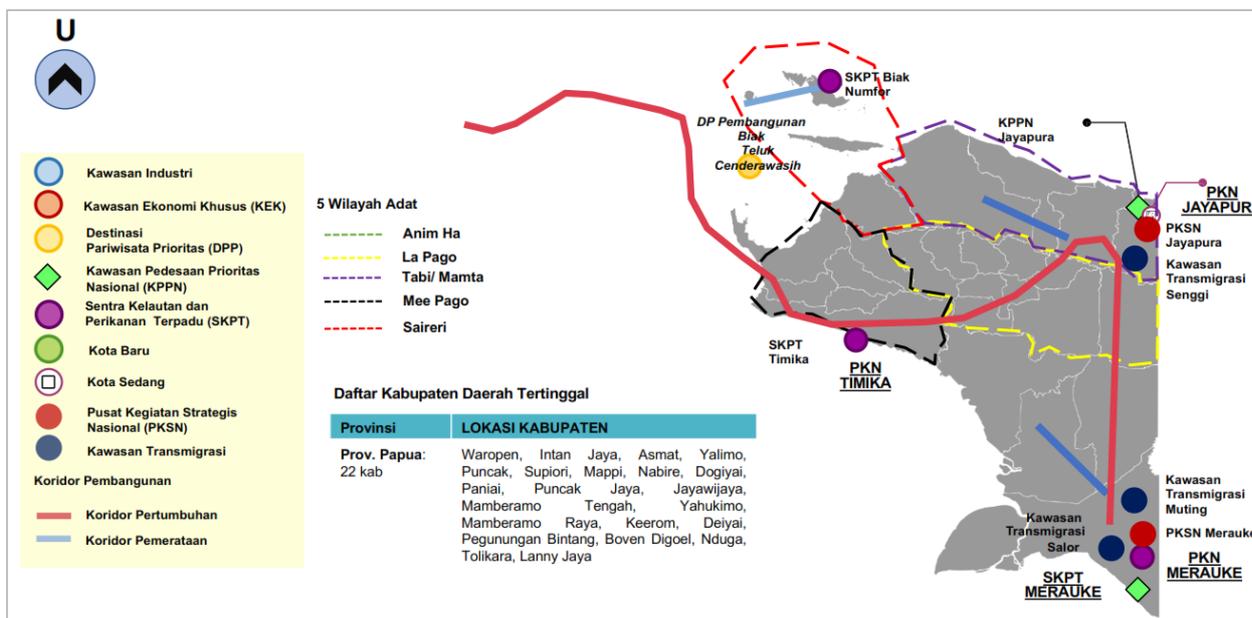
- **Kawasan Biak** (pariwisata, perikanan, industri, pertambangan, perkebunan, kehutanan);
- **Kawasan Nabire dan sekitarnya - Aran, Moswaren, dan Legare** (pertanian, perkebunan, pertambangan);
- **Kawasan Mamberamo – Lereh (Jayapura) dan sekitarnya** (industri, pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan, perikanan, pariwisata);

- **Kawasan Andalan Laut Teluk Cenderawasih-Biak dan sekitarnya** (perikanan, pertambangan, pariwisata, minyak dan gas bumi)
- **Kawasan Andalan Laut Jayapura-Sarmi** (perikanan, pariwisata).

Kawasan Strategis Nasional

- **Kawasan Biak** (Tahapan Pengembangan: pengembangan/peningkatan kualitas kawasan strategis nasional dengan Sudut Kepentingan Ekonomi)

Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua (Tahapan Pengembangan: pengembangan/peningkatan kualitas kawasan strategis nasional dengan Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan)

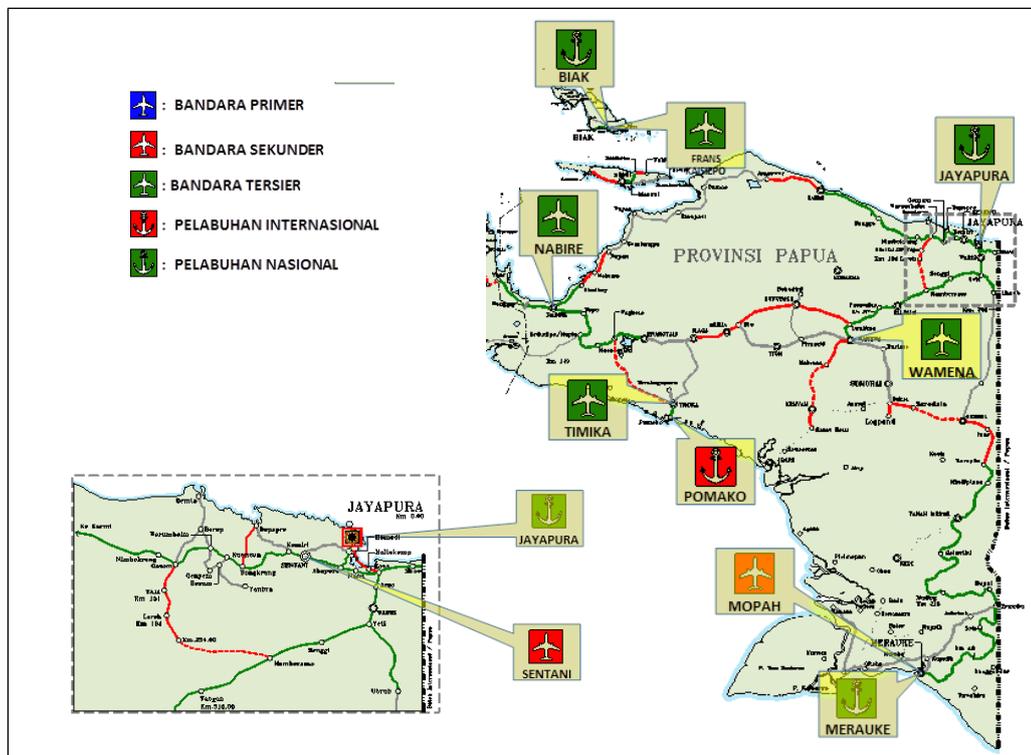


Gambar 1.4 Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Wilayah Provinsi Papua
 Sumber : Paparan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dalam Rapat Kordinasi Infrastruktur Bappeda Provinsi Papua, 2021

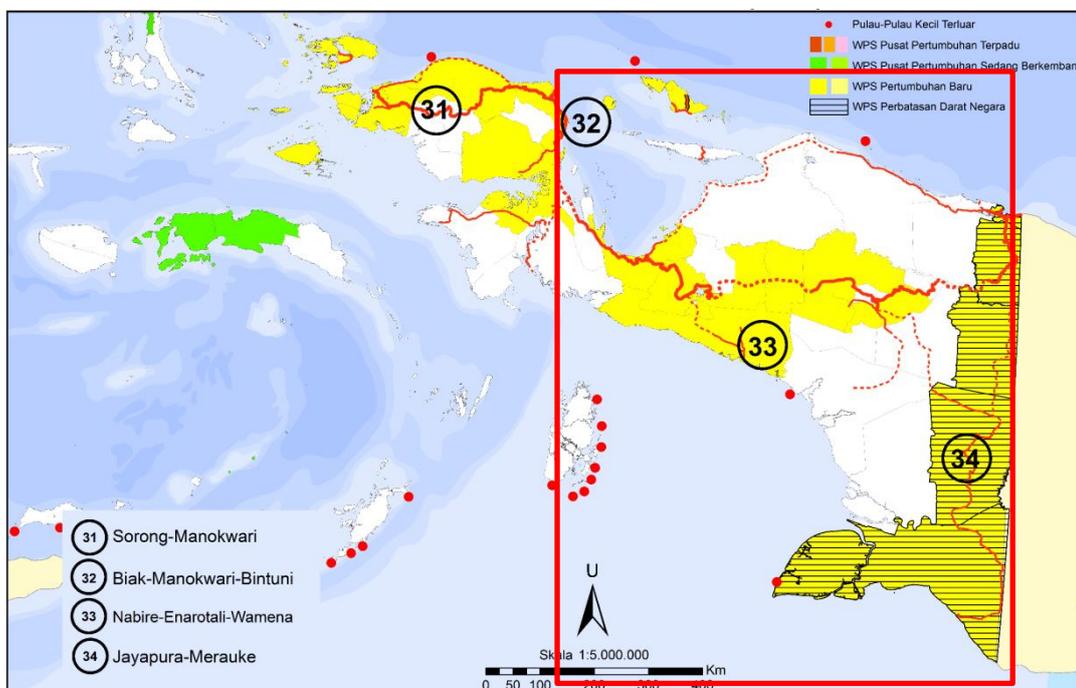
2. Kesesuaian dengan Konsep Pembangunan melalui Pendekatan Kewilayahan

Konsep ini menekankan pembangunan yang dilakukan secara terpadu di wilayah-wilayah yang teridentifikasi memiliki peluang untuk dikembangkan berdasarkan sektor unggulan yang terdapat di wilayah tersebut . Dengan demikian, pembangunan infrastruktur memiliki arah dan sasaran yang jelas dan secara efektif dan efisien mampu mengembangkan pertumbuhan ekonomi wilayah. Provinsi Papua memiliki banyak potensi unggulan di masing-masing wilayah adat yang meliputi sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, dan pertambangan, serta keberadaan simpul-simpul transportasi yang bisa dioptimalkan melalui pembangunan infrastruktur sehingga satu sama lain saling terkoneksi yang pada akhirnya dapat memperlancar arus distribusi barang dan jasa dan mengurangi kesenjangan yang terjadi di suatu wilayah. Pembangunan infrastruktur dalam hal ini jalan dan jembatan yang dilakukan BPJN Jayapura

diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan aksesibilitas di dalam maupun antar wilayah adat, khususnya antara pusat pertumbuhan dengan kawasan penyangga.



Gambar 1.5 Peta Lokasi Pelabuhan Laut dan Udara Provinsi Papua dan Papua Barat



Gambar 1.6 Peta Sebaran Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Pulau Papua

Pemerintah Pusat, melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, telah menerapkan 3 (tiga) Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) di yang ada di Provinsi Papua, yaitu :

1. WPS 32 : Biak - Manokwari - Bintuni;
2. WPS 33 : Nabire - Enarotali - Wamena;
3. WPS 34 : Jayapura - Merauke.

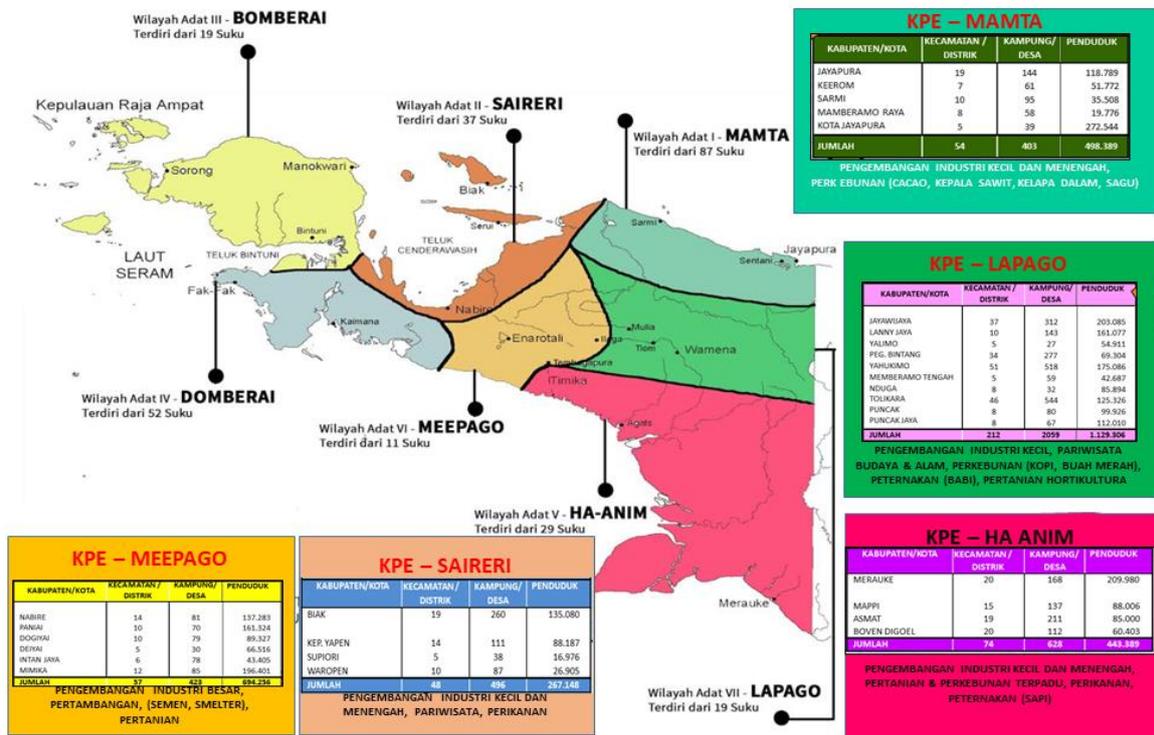
Ilustrasi Sebaran Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) bisa dilihat pada Peta Sebaran Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Pulau Papua seperti tampak pada **Gambar 1.6** di atas.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam menjalankan kegiatan pembangunannya juga memiliki konsep pembangunan berbasis kewilayahan, dengan membagi wilayahnya menjadi 5 (lima) wilayah Adat, yaitu :

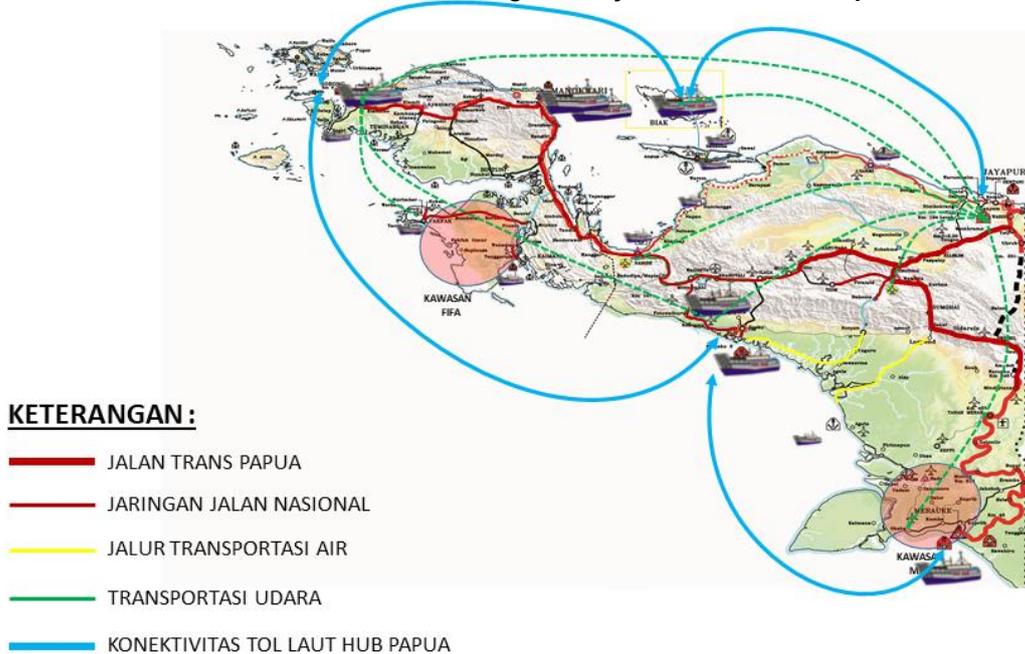
1. Wilayah Adat Mamta;
2. Wilayah Adat Saereri;
3. Wilayah Adat Anim Ha;
4. Wilayah Adat La Pago; dan
5. Wilayah Adat Mepago.

Konsep pembangunan berbasis kewilayahan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing perekonomian wilayah dengan cara menonjolkan komoditi lokal yang dimiliki wilayah tersebut. Ilustrasi Pembagian Wilayah Adat Provinsi Papua bisa dilihat pada Peta Wilayah Adat Provinsi Papua seperti tampak pada **Gambar 1.7**.

PENGEMBANGAN EKONOMI BERBASIS WILAYAH ADAT



Gambar 1.7 Peta Pembagian Wilayah Adat Provinsi Papua



Gambar 1.8 Peta Konektivitas infrastruktur Transportasi Terpadu Provinsi Papua

1.4.2 Program Strategis untuk menjawab Isu Strategis di Provinsi Papua

Berdasarkan isu-isu strategis yang ada di Provinsi Papua dan sejalan dengan Nawa Cita Presiden Republik Indonesia, dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Papua, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura merencanakan Pembangunan Ruas Jalan Trans Papua dan Ruas Jalan Perbatasan yang merupakan program strategis penanganan jalan dan jembatan di Provinsi Papua dan diharapkan menjadi solusi kebutuhan masyarakat akan ketersediaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai di Provinsi Papua dengan penjelasan sbb :

1. Pembangunan Ruas Jalan Trans Papua Provinsi Papua

Ruas Trans Papua secara keseluruhan berada di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan total panjang \pm 4.330,07 Km. Ruas Trans Papua khususnya yang berada di Provinsi Papua memiliki total panjang \pm 2.345,40 Km dan terbagi dalam 8 segmen penanganan. Pembangunan Trans Papua diharapkan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah dengan menyambung pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan pusat – pusat produksi rakyat yang pada akhirnya bisa mengurangi kesenjangan antar wilayah di Provinsi Papua. Dari total panjang \pm 2.345,40 Km, sepanjang 605,31 Km merupakan panjang penanganan yang menjadi wewenang BPJN Jayapura, yang meliputi :

1. Ruas Bts. Prov. Papua/Papua Barat - Nabire (Bts. Kota Nabire) sepanjang 208,10 Km;
2. Ruas Nabire-Wagete-Enarotali sepanjang 204,40 Km;
3. Ruas Wamena-Elelim-Jayapura (Yetti) sepanjang 192,81 Km.

2. Pembangunan Ruas Jalan Lintas Perbatasan

Ruas Jalan Lintas Perbatasan sepanjang 1.097,99 Km berada di sepanjang perbatasan RI dan negara Papua New Guinea (PNG). Ruas jalan ini akan menghubungkan Jayapura-Merauke dan terbagi dalam 3 segmen penanganan yang sebagian besar sudah terbuka, antara lain:

1. Jayapura-Arso-Waris-Yetti sepanjang 128,18 Km;
2. Yeti-Ubrub-Towe-Hitam-Oksibil sepanjang 301,74 Km;
3. Oksibil-Waropko-Merauke sepanjang 668,07 Km.

Ruas Jalan Perbatasan RI-PNG yang ditangani oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura terdiri dari 2 segmen penanganan dengan total sepanjang 397,96 Km, yaitu :

1. Jayapura-Arso-Waris-Yetti sepanjang 128,18 Km;
2. Yetti-Ubrub-Towe Hitam -Oksibil sepanjang 269, 8 Km.

3. Pembangunan Jalan Akses Jembatan Youtefa

Pembangunan Jalan Akses Jembatan Youtefa merupakan salah satu solusi yang diharapkan dapat menjawab permasalahan kepadatan permukiman di kota Jayapura. Pengembangan ke arah Distrik Muara Tami yang luas dan datar relatif tidak mudah karena distrik Muara Tami dan 4 distrik lainnya terpisahkan

oleh teluk Youtefa yang cukup luas. Melalui kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua, dan Pemerintah Kota Jayapura maka upaya pengembangan wilayah permukiman kota Jayapura diwujudkan dengan rencana pembangunan Jalan Akses Jembatan Youtefa (nama paket : Pembangunan Jalan Akses Jembatan Holtekamp (Sisi Holtekamp)) sepanjang 7,55 Km yang menggunakan alokasi dana APBN Tahun 2020-2021. Pelaksanaan pekerjaan sempat menghadapi kendala terkait pembebasan lahan akibat tuntutan hak ulayat dari masyarakat adat setempat yang telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua sehingga saat ini pekerjaan telah berjalan. Jembatan Youtefa yang menghubungkan Hamadi – Holtekamp – Koya diharapkan tidak hanya menjadi solusi atas permasalahan kepadatan permukiman Kota Jayapura, tetapi juga merupakan ruas jalan strategis menuju pintu perbatasan antara RI – PNG di Skouw.

1.4.3 Tantangan Pembangunan Tahun 2020

Beberapa kondisi dan situasi menjadi tantangan bagi Satuan Kerja BPJN Jayapura dalam upaya mewujudkan seluruh sasaran dan program yang telah ditetapkan. Kondisi dan situasi yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut beberapa diantaranya memiliki sifat spesifik yang tidak/jarang dijumpai pada wilayah lain di luar Provinsi Papua. Berikut merupakan beberapa aspek yang menjadi tantangan bagi BPJN Jayapura dalam upaya melaksanakan kegiatan di Tahun 2020, antara lain :

a. Pandemi COVID-19

Sejak triwulan pertama tahun 2020 muncul pandemi COVID-19 yang membawa dampak adanya pembatasan mobilitas dan jam kerja/aktivitas serta aturan protokol kesehatan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah setempat. Hal ini berakibat pada tertundanya penyelesaian pekerjaan di lapangan dikarenakan mobilitas manusia dibatasi begitu juga dengan transportasi darat, laut, dan udara yang dibatasi jam operasionalnya.

b. Aspek Keamanan

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Provinsi Papua belum terbebas dari kelompok bersenjata yang berseberangan dengan Pemerintah. Pada beberapa daerah kondisi keamanan karena gangguan-gangguan dari kelompok tersebut masih terjadi dan berdampak pada lambatnya kegiatan pembangunan. Pada sisi lain, situasi keamanan yang kurang kondusif ini menyebabkan biaya proyek menjadi cukup mahal mengingat faktor resiko yang harus diperhitungkan oleh Penyedia Jasa;

c. Aspek Lingkungan

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah – Provinsi (RTRW-P), Provinsi Papua didominasi dengan kawasan hutan yang mencapai 80% dari luas kawasan yang ada. Banyak diantara kawasan hutan ini yang merupakan Kawasan Hutan Konservasi, Taman Nasional dan Hutan

Lindung yang menjadi hambatan khusus dalam pembangunan jalan. Upaya penyelesaian penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup dan Dokumen Kehutanan seperti Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan Perjanjian Kerja Sama menjadi tantangan tersendiri agar kegiatan-kegiatan penanganan jalan aman secara lingkungan dan tidak bersinggungan dengan masalah hukum.

d. Aspek Sumber Daya Manusia

Ada kesulitan yang dirasakan dalam upaya menyediakan tenaga profesional dan terlatih. Sumber daya manusia profesional yang tersedia (lokal) sangat terbatas jumlahnya dan tidak sebanding dengan kebutuhan. Upaya untuk mendatangkan tenaga profesional dari provinsi lain juga relatif sulit karena ketiadaan stimulus bagi tenaga kerja tersebut. Hal ini berdampak pada hasil produktivitas pekerjaan di lapangan dan di kantor. Disamping itu dari sisi internal pegawai di lingkungan Satker BPJN Jayapura, perlu ditekankan akan pentingnya komitmen, integritas, dan kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas kerja sehari-hari.

Untuk merangkum semua hal yang terjadi selama 1 tahun anggaran dan dalam rangka perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program/kegiatan yang telah diamanatkan, Satuan Kerja BPJN Jayapura bermaksud untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Kerja BPJN Jayapura Tahun 2021. LKIP Satuan Kerja BPJN Jayapura ini menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi dalam rangka pemanfaatan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021. Dokumen ini diharapkan juga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Satuan Kerja BPJN Jayapura di masa mendatang.

1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKIP

1. **RINGKASAN EKSEKUTIF**, bagian ini berisi ringkasan secara menyeluruh tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura;
2. **BAB I. PENDAHULUAN**, bab ini berisi tentang latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta isu strategis dari Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura;
3. **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**, bab ini berisi tentang uraian singkat Dokumen Perencanaan, Perjanjian Kinerja, Metode Pengukuran, dan Target Tahun ini menurut Dokumen Perencanaan Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura;
4. **BAB III. KAPASITAS ORGANISASI**, bab ini berisi tentang informasi Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang dimiliki, serta DIPA Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura;

5. **BAB IV. AKUNTABILITAS KINERJA**, bab ini berisi tentang capaian kinerja organisasi, perbandingan kinerja organisasi, realisasi anggaran, Paket Strategis (PN, SBSN dan PSN), serta paket yang diresmikan dan penghargaan yang ada di lingkungan Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura;
6. **BAB V. PENUTUP**, bab ini menyajikan rangkuman permasalahan serta rekomendasi yang berupa tindak lanjut dan harapan serta kesimpulan secara menyeluruh dari LKIP Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura;
7. **LAMPIRAN**, bagian ini terdiri dari :
 - **Lampiran I** Surat Pernyataan & Perjanjian Kinerja TA. 2021 (Awal);
 - **Lampiran II** Surat Pernyataan & Perjanjian Kinerja TA. 2021 (Revisi);
 - **Lampiran III** Pengukuran Kinerja T.A. 2021;
 - **Lampiran IV** Data Kaki LKIP TA. 2021;
 - **Lampiran V** Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan TA. 2021.

The image shows the cover of a book. The background is a photograph of a suspension bridge over a river, with a dense forest in the background. The cover is divided into three horizontal color bands: a light blue band at the top, a large orange band in the middle, and a yellow band at the bottom. The title 'BAB II' is written in large, bold, black capital letters in the orange band. Below it, 'Perencanaan dan Kinerja' is written in a black, cursive script. The entire cover is framed by a dark blue border.

BAB II

Perencanaan dan Kinerja

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) atau Dokumen Perencanaan Lainnya untuk Satuan Kerja, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja tahunan merupakan proses penetapan target tahunan dari setiap kegiatan kedalam output-output dan indikator-indikatornya dan target *outcome* dari masing-masing sasaran dan indikator-indikatornya dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) atau dalam hal ini Dokumen Perencanaan Satker. Dokumen Perencanaan Satker BPJN Jayapura 2020-2024 merupakan penjabaran Renstra entitas di atasnya yaitu Renstra Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura 2020 – 2024.

2.1 URAIAN SINGKAT DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA SATKER BPJN JAYAPURA

2.1.1. Visi dan Misi Kementerian PUPR

Visi Kementerian PUPR 2020-2024 yang disesuaikan dengan dukungan terhadap pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 dalam RPJMN 2020-2024, adalah sebagai berikut:

VISI

(Kementerian PUPR)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG ANDAL, RESPONSIF, INOVATIF DAN PROFESIONAL DALAM PELAYANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN UNTUK MEWUJUDKAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: "INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG"

Selanjutnya Misi Kementerian PUPR yang tercantum dalam Renstra Kementerian PUPR sebagai dukungan dalam melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai berikut:

MISI

(Kementerian PUPR)

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif yang responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 2. Menyelenggarakan pembangunan, pelayanan dan pengelolaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang andal dan terpadu dengan pengembangan wilayah serta memperhatikan kelestarian lingkungan.
 3. Menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi yang berkualitas dan pengembangan inovasi penyelenggaraan pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 4. Meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur, efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
-

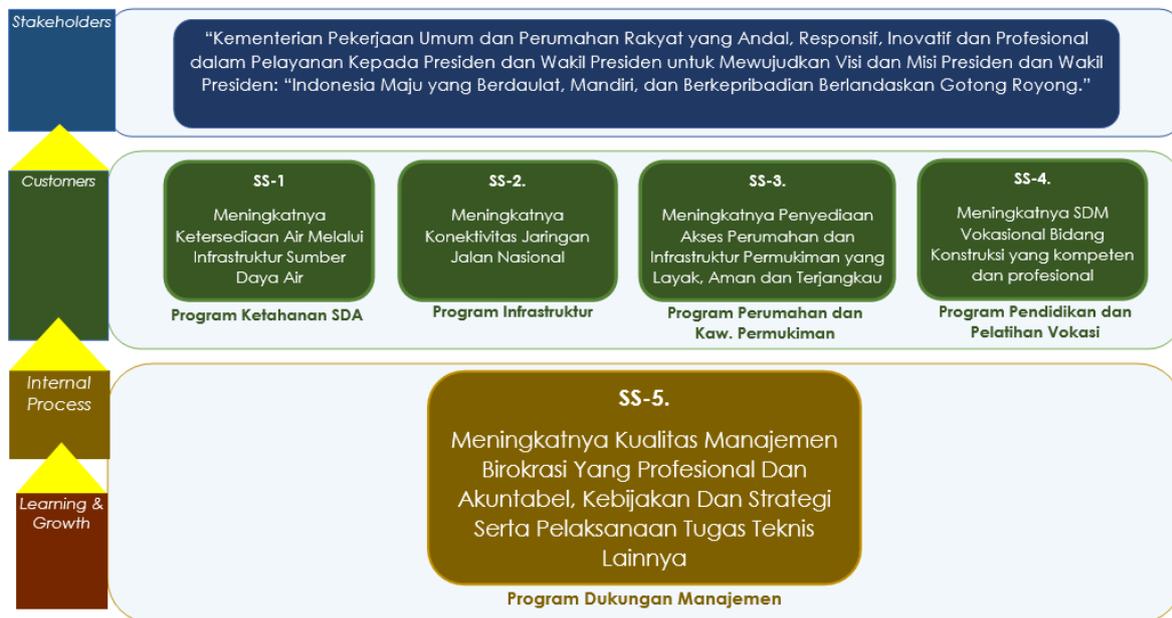
2.1.2. Tujuan Kementerian PUPR

Adapun tujuan sebagai representasi terukur dari visi yang diinginkan Kementerian PUPR selama periode perencanaan 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses serta pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan.
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan permukiman berkualitas yang semakin merata dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Pemenuhan kebutuhan perumahan yang semakin merata untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat.
5. Peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai dengan potensi dan upaya pengembangan wilayah pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategis.
6. Peningkatan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang terbangun dan terkelola dengan berbagai skema pembiayaan yang lebih efisien dan berkelanjutan.
7. Peningkatan daya saing jasa konstruksi nasional serta peningkatan mutu, keselamatan, keamanan dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan hasil jasa konstruksi.
8. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang bersih dan terpercaya.
9. Peningkatan SDM aparatur Kementerian PUPR yang berkinerja tinggi.
10. Peningkatan efektifitas penyelenggaraan pembangunan infrastruktur.

2.1.3. Sasaran Kementerian PUPR

Sasaran Strategis (SS) pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian PUPR sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan untuk periode 5 tahun. Dalam penyusunannya, Kementerian PUPR menjabarkan 4 misi dan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi ke dalam 4 perspektif, yaitu perspektif *stakeholders*, perspektif *customers*, perspektif *internal process* dan perspektif *learning and growth*. Deskripsi penerapan BSC tersebut diilustrasikan dalam bentuk peta strategi (*strategy map*) sebagaimana disampaikan pada **Gambar 2.1**.



Gambar 2.1 Peta Strategi (Strategy Map) Kementerian PUPR 2020-2024
Sumber: Renstra Kementerian PUPR

Masing-masing Sasaran Strategis dijabarkan ke dalam Sasaran Program, di mana setiap Sasaran Program memiliki Indikator Kinerja Program yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing Unit Organisasi.

2.1.4. Tujuan dan Sasaran Ditjen Bina Marga 2020-2024

Tujuan, dan sasaran dari Ditjen Bina Marga untuk periode Renstra 2020-2024 yang disusun dengan memperhatikan visi, misi, dan sasaran pembangunan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 (Perpres No 18 Tahun 2020) serta visi, misi, tujuan, dan sasaran Kementerian PUPR dalam Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 (Sub Bab 2.1). Tujuan Ditjen Bina Marga dalam menyelenggarakan jalan nasional pada periode 2020-2024 terdiri dari 4 butir sebagai berikut :

TUJUAN (Ditjen Bina Marga)

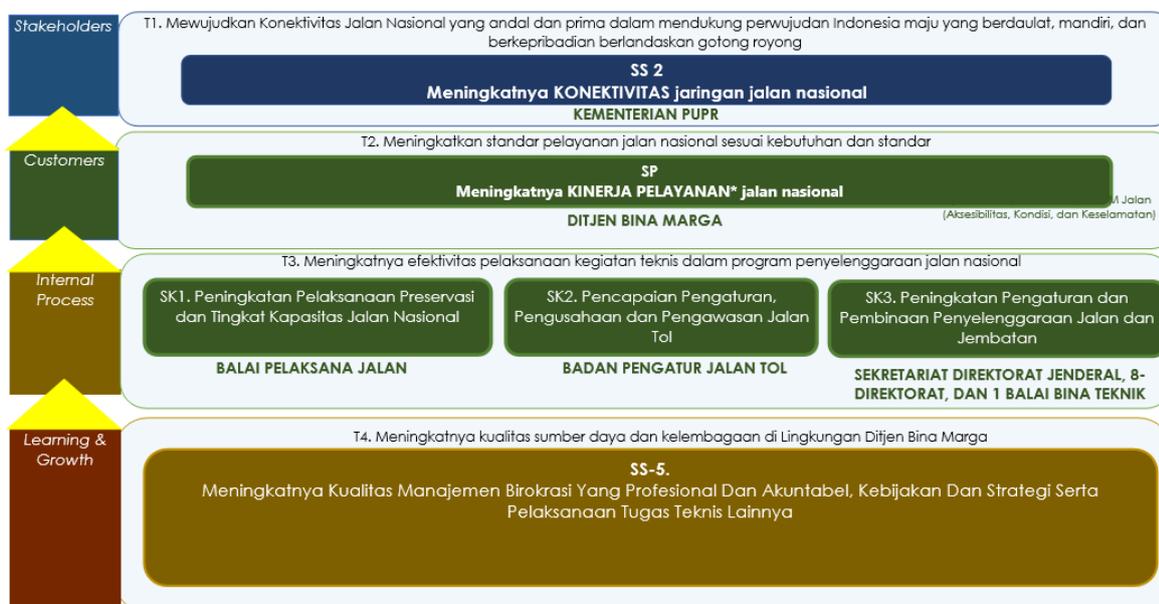
- T.1 Mewujudkan konektivitas jalan nasional yang andal dan prima dalam mendukung perwujudan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong;
- T.2 Meningkatkan standar pelayanan jalan nasional sesuai kebutuhan dan standar;
- T.3 Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan teknis dalam program penyelenggaraan jalan nasional;
- T.4 Meningkatkan kualitas sumber daya dan kelembagaan di Lingkungan Ditjen Bina Marga.

Sasaran Ditjen Bina Marga untuk periode 2020-2024 dalam menyelenggarakan jalan terdiri dari 3 jenis sasaran yakni:

1. Sasaran Strategis (SS) yakni sasaran Ditjen Bina Marga yang menjadi sasaran pembangunan nasional di bidang jalan dan juga menjadi sasaran strategis di tingkat Kementerian PUPR (lihat **Gambar 2.2**, yakni SS.2 meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional). Dalam *Balanced Scorecard*, sasaran ini berada pada level *Stakeholders Perspectives* yang mencerminkan pemenuhan terhadap keinginan pemberi mandat penyelenggaraan jalan kepada Ditjen Bina Marga, yakni masyarakat luas melalui UU 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah (Presiden dan Wakil Presiden terpilih c.q Menteri PUPR c.q Dirjen Bina Marga);
2. Sasaran Program (SP) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional yakni sasaran dari program penyelenggaraan jalan yang dilaksanakan oleh Ditjen Bina Marga yang merupakan hasil (*outcome*) dari serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Unit Kerja di Lingkungan Ditjen Bina Marga. Dalam struktur *Balanced Scorecard*, sasaran ini berada pada level *Customer Perspectives* yang mencerminkan wujud layanan publik yang dihasilkan oleh Ditjen Bina Marga (melalui program penyelenggaraan jalan) yakni pelayanan jalan nasional melalui pengurangan waktu tempuh yang dicapai melalui peningkatan aksesibilitas, rating kondisi jalan, dan rating keselamatan jalan nasional.
3. Sasaran Kegiatan (SK) yakni sasaran sebagai keluaran (*output*) dari masing-masing kegiatan yang tercakup dalam program penyelenggaraan jalan yang dilaksanakan oleh tiap unit kerja Pusat maupun Balai di Lingkungan Ditjen Bina Marga. Dalam struktur *Balanced Scorecard*, sasaran ini berada pada level *Internal Business Process Perspectives* (IBPP) dan *Learning and Growth Perspectives* (LGP) yang secara umum akan mencakup seluruh kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi dari Ditjen Bina Marga sesuai Peraturan Menteri PUPR 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, yang pada dasarnya terkelompok menjadi 2, yakni:
 - o Pelaksanaan fungsi Ditjen Bina Marga dalam penyelenggaraan jalan umum yang mencakup pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan nasional (sesuai pasal 4 (a.) UU 38/2004 tentang Jalan) atau dalam pasal 184 butir a. s.d h. Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020

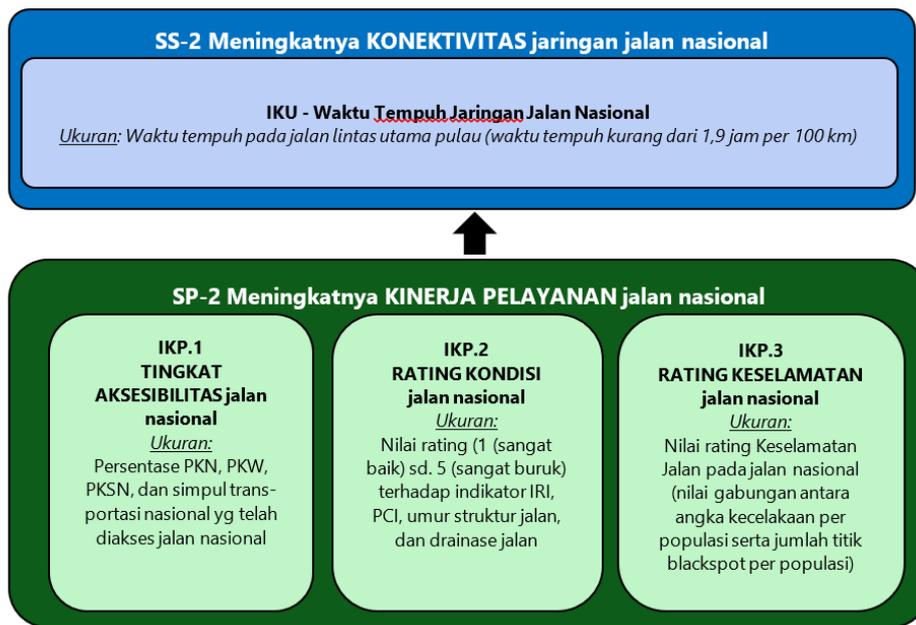
terkait dengan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan NSPK, pemberi bimbingan teknis dan supervisi, pelaksana evaluasi di bidang penyelenggaraan jalan, dan pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Karena kegiatan ini terkait proses teknis dalam penyelenggaraan jalan, maka umumnya sasaran kegiatan kelompok ini akan berada pada level *Internal Business Process Perspectives*;

- o Pelaksanaan fungsi Ditjen Bina Marga dalam melakukan administrasi sesuai pasal 184 butir g. Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020 yang umumnya terkait administrasi kepegawaian, keuangan dan BMN, organisasi/kelembagaan, hukum dan hubungan masyarakat. Karena sifat kegiatan ini adalah dukungan manajemen dan teknis dalam rangka perkuatan pranata organisasi Ditjen Bina Marga, maka umumnya sasaran kegiatan kelompok ini akan berada pada level *Learning and Growth Perspectives*.



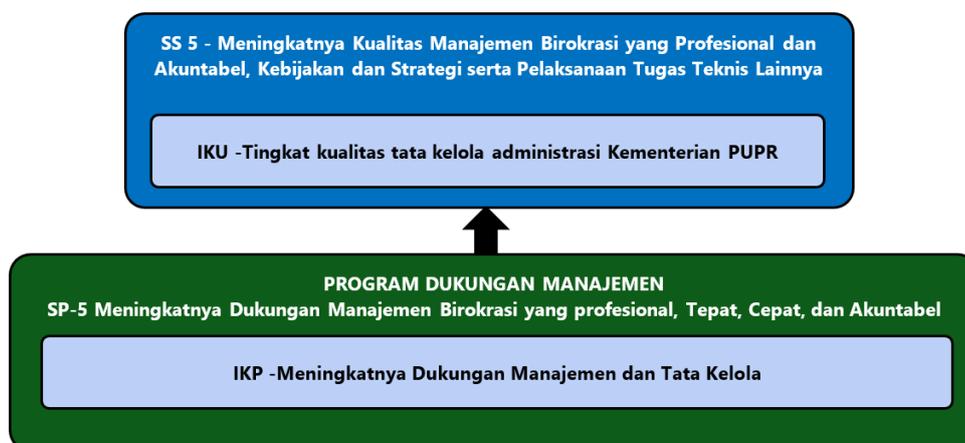
Gambar 2.2 Peta Strategi (Strategy Map) Ditjen Bina Marga 2020-2024

Sumber: Renstra Ditjen Bina Marga 2020 - 2024



Gambar 2.3 Struktur dan Indikator Kinerja Ditjen Bina Marga 2020-2024 (1)
Sumber: Renstra Ditjen Bina Marga 2020 – 2024

Pada Renstra PUPR 2020-2024 terdapat program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang difokuskan pada peningkatan kualitas administrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien untuk mendukung kinerja penyelenggaraan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya terdiri dari: pelaksanaan anggaran (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)), fasilitasi produk hukum dan advokasi hukum (berupa jumlah dokumen regulasi yang diterbitkan pada periode 2020-2024), pengelolaan barang milik negara (jumlah provinsi yang diberikan layanan BMN), dan pelayanan kepegawaian DJBM (jumlah orang yang diberikan layanan publik baik PNS maupun Non PNS). Untuk pelaksanaan tugas teknis lainnya adalah penyusunan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) bidang jalan dan jembatan.



Gambar 2.4 Struktur dan Indikator Kinerja Ditjen Bina Marga 2020-2024 (2)
Sumber: Renstra Ditjen Bina Marga 2020 – 2024

Adapun SK dan IKK dalam peta strategi Ditjen Bina Marga akan menjadi SK dan IKK pada level Unit Eselon II dan Balai Terkait. Penjelasan tentang IKU dan IKP pada gambar diatas adalah sebagai berikut:

1. Harapan publik utamanya terhadap kinerja penyelenggaraan jalan (yang sebaiknya dijadikan sebagai SS yang diukur melalui IKSS/IKU) adalah terwujudnya konektivitas nasional, sebagaimana tertuang pula dalam dokumen Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024. Dalam hal ini konektivitas jaringan jalan diukur dari terhubungnya simpul transportasi dan pusat kegiatan nasional (berdasarkan Sistranas, RTRWN), arahan RPJMN, termasuk kawasan dan lokus prioritas nasional oleh jaringan jalan nasional (sesuai definisi jalan nasional dalam pasal 26 PP 34/2006 tentang Jalan dan Permen PUPR 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan Dan Status Jalan). Waktu tempuh pada koridor lintas utama terpilih ditargetkan 1,9 jam per 100 km.
2. Sasaran program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) merupakan hasil (*outcome*) utama dari program penyelenggaraan jalan untuk mendukung pencapaian SS dan IKSS/IKU pada butir (1) diatas. Oleh karenanya, SP dan IKP yang dipilih untuk program penyelenggaraan jalan adalah kinerja pokok yang menjadi prasyarat (*pre-requisite*) terwujudnya konektivitas jaringan jalan nasional, yakni:
 - a. Tingkat aksesibilitas jalan nasional, yang menunjukkan hasil kerja Ditjen Bina Marga dalam menyediakan aksesibilitas terhadap seluruh pusat kegiatan skala nasional (PKN, PKW, PKSN), simpul transportasi nasional (pelabuhan, bandara, terminal) dan kawasan prioritas nasional (KSPN, KEK, KI prioritas, 3TP/DTPK (Terpencil, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan/ Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) yang harus diakses oleh jaringan jalan nasional sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun ukuran yang digunakan adalah PKN, PKW, PKSN, simpul transportasi nasional (pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, bandara pengumpul primer, sekunder, tersier yang berada di ibukota provinsi, pelabuhan penyeberangan kelas I, pelabuhan angkutan sungai danau dan penyeberangan skala pengumpul, terminal tipe A), dan kawasan strategis nasional (KSPN, KEK, KI prioritas, 3TP/DTPK) yang telah diakses jalan nasional. Pencapaian tingkat aksesibilitas jalan nasional didukung oleh kegiatan pembangunan baru jalan dan jembatan nasional (termasuk jalan tol);
 - b. Rating kondisi jalan nasional, yang menunjukkan hasil kerja Ditjen Bina Marga dalam melaksanakan kegiatan preservasi jalan yang diukur melalui tingkat kondisi seluruh bagian jalan (perkerasan, bahu, drainase, bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan) sesuai dengan umur rencana yang diharapkan. Penyediaan kondisi jalan sesuai standar pelayanan minimal (SPM) dalam PP 34/2006 tentang Jalan dinyatakan melalui nilai kerataan permukaan jalan (*IRI/International Roughness Index*). Selanjutnya secara teknis indikator IRI (beserta indikator lainnya: *Pavement Condition Index (PCI)* dan umur struktur jalan, kondisi drainase, dll) digunakan untuk mengklasifikasikan kondisi jalan dengan metode Rating Kondisi Jalan (RKJ): dimana Skor 1 (sangat baik atau baru) dan Skor 5 (rusak berat).

- c. Tingkat keselamatan jalan nasional, mewakili hasil kerja dari Ditjen Bina Marga dalam mengupayakan pemenuhan pilar jalan berkeselamatan sesuai dalam RUNK (Rencana Umum Nasional Keselamatan) jalan, khususnya melalui penanganan titik-titik rawan kecelakaan (*Black Spot*) di jalan nasional. Tingkat keselamatan jalan nasional diukur dengan suatu indeks/skor berskala 1 sampai 5: dimana Skor 1 (risiko kecelakaan pada level sangat rendah) dan Skor 5 (risiko kecelakaan pada level sangat tinggi) yang menggabungkan antara dua indikator yaitu Tingkat kejadian kecelakaan (kecelakaan/populasi) dan Tingkat keberadaan *blackspot* jalan nasional (*blackspot*/populasi).

2.1.5. Tujuan dan Sasaran BPJN Jayapura 2020-2024

Renstra BPJN Jayapura 2020 – 2024 yang merupakan dokumen yang mengarahkan setiap kegiatan dalam lingkup penanganan BPJN Jayapura pada periode 2020 - 2024 dipastikan selaras dan searah dengan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam visi, misi, dan sasaran pembangunan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 (Perpres No 18 Tahun 2020), visi, misi, tujuan, dan sasaran Kementerian PUPR dalam Renstra Kementerian PUPR 2020-2024, serta tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Bina Marga dalam Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga 2020-2024. Renstra BPJN Jayapura sebagai bentuk penjabaran atas Renstra atau RPJM Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2020 - 2024 merupakan wujud penetapan rencana yang sekaligus berfungsi sebagai pengendali pelaksanaan. **BPJN Jayapura sebagai Unit Kerja/ UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga menjalankan tugas dan fungsi serta menetapkan tujuannya sejalan dengan tujuan dan sasaran strategis Kementerian PUPR dan Ditjen Bina Marga sebagai berikut:**

T U J U A N (BPJN Jayapura)

- T.1 Mendukung tercapainya konektivitas jalan nasional yang andal dan prima dalam lingkup wilayah penanganan BPJN Jayapura;
- T.2 Mendukung tercapainya peningkatan standar pelayanan jalan nasional dalam lingkup wilayah penanganan BPJN Jayapura sesuai kebutuhan dan standar;
- T.3 Mendukung tercapainya peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan teknis dalam program penyelenggaraan jalan nasional dalam lingkup wilayah penanganan BPJN Jayapura;
- T.4 Mendukung tercapainya peningkatan kualitas sumber daya dan kelembagaan di lingkungan BPJN Jayapura.

Sebelum masuk kedalam pembahasan sasaran kegiatan, untuk mewujudkan tujuan BPJN Jayapura di atas selanjutnya akan diulas mengenai sasaran strategis dan turunannya dalam mewujudkan tercapainya target pelaksanaan program Infrastruktur Konektivitas dan Dukungan Manajemen sesuai dengan data matriks kinerja Ditjen Bina Marga pada Renstra Ditjen Bina Marga 2020 – 2024. Untuk mendukung capaian program Infrastruktur Konektivitas dan Dukungan Manajemen, maka sasaran strategis sesuai dengan Renstra Ditjen Bina

Marga 2020 – 2024 antara lain “Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional” dan “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya”. Sehubungan dengan upaya mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, terdapat 2 (dua) Sasaran Program yang harus dipenuhi oleh Ditjen Bina Marga hingga akhir tahun 2024, yaitu:

1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut :

- a. *Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional* (persentase pusat kegiatan dan simpul strategis nasional yang diakses jalan nasional);
- b. *Rating Kondisi Jalan Nasional* (Nilai gabungan antara nilai IRI, PCI, umur struktur jalan, dan drainase jalan pada seluruh ruas jalan nasional);
- c. *Rating Keselamatan Jalan Nasional* (Nilai gabungan antara angka kecelakaan per populasi dan dan jumlah titik *blackspot* per populasi).

2. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

Dengan Indikator Kinerja Program yang berupa *Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR*.

Tabel di bawah ini akan menjabarkan angka target Indikator Kinerja Program yang terkait dengan infrastruktur jalan khususnya yang mendukung Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga untuk penanganan jalan nasional di seluruh Indonesia dan di Provinsi Papua, sebagai berikut :

Tabel II.1
Target Indikator Kinerja Program 2020 – 2024 dalam mendukung Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET						
			Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional									
INDIKATOR KINERJA PROGRAM :									
1	Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional (persentase pusat kegiatan dan simpul strategis nasional yang diakses jalan nasional)	%	80.7	81.8	82.8	84.6	85.8	87.9	87.9
2	Rating Kondisi Jalan Nasional (Nilai gabungan antara nilai IRI, PCI, umur struktur jalan, dan drainase jalan pada seluruh ruas jalan nasional)	Nilai	2.91	2.70	2.63	2.61	2.57	2.50	2.50
3	Rating keselamatan jalan nasional (Nilai gabungan antara angka kecelakaan per populasi dan dan	Nilai	3.52	3.51	3.14	2.95	2.89	2.82	2.82

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET						
			Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
	jumlah titik blackspot per populasi)								
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya									
INDIKATOR KINERJA PROGRAM :									
1	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	%	50.40	55.92	63.35	71.54	79.26	84.12	70.84

Sumber : Renstra Ditjen Bina Marga 2020 – 2024 dan Data Matriks Kinerja KSJJ untuk Provinsi Papua

Tabel II.2
Target Indikator Kinerja Program 2020 – 2024 dalam mendukung Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga untuk Provinsi Papua

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET						
			Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional									
INDIKATOR KINERJA PROGRAM :									
1	Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional (persentase pusat kegiatan dan simpul strategis nasional yang diakses jalan nasional)	%	76.2	76.2	78.6	78.6	78.6	81.0	78.60
2	Rating Kondisi Jalan Nasional (Nilai gabungan antara nilai IRI, PCI, umur struktur jalan, dan drainase jalan pada seluruh ruas jalan nasional)	Nilai	2.91	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12
3	Rating keselamatan jalan nasional (Nilai gabungan antara angka kecelakaan per populasi dan jumlah titik blackspot per populasi)	Nilai	1.70	1.70	1.70	1.70	1.00	1.00	1.42
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya									
INDIKATOR KINERJA PROGRAM :									
1	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR*	%	50.40	55.92	63.35	71.54	79.26	84.12	70.84

*Catatan : Untuk nilai IKU Tingkat Aksesibilitas, Rating Kondisi, dan Rating Keselamatan memakai angka matriks nilai IKU dari KSJJ untuk Prov. Papua, untuk nilai IKU Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR mengacu ke nilai IKU yang diperoleh dari KSJJ, belum ada nilai IKU khusus untuk BPJN Jayapura

Sumber : Renstra Ditjen Bina Marga 2020 – 2024 dan Data Matriks Kinerja KSJJ untuk Provinsi Papua

Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program tersebut, sesuai dengan data matriks kinerja Bina Marga yang terdapat pada Renstra Ditjen Bina Marga 2020 -

2024, terdapat 4 (empat) kegiatan yang diturunkan pada unit eselon II di dalam organisasi Ditjen Bina Marga yaitu:

Kegiatan Pendukung Program Infrastruktur Konektivitas

1. **Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (Balai Pelaksana Jalan);**
2. Pengaturan, Pengusahaan dan Pengawasan Jalan Tol (BPJT);
3. Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan ((9 Direktorat Jenderal Bina Marga dan Sekretariat Jenderal Bina Marga).

Kegiatan Pendukung Program Dukungan Manajemen

1. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga (Setditjen BM, Output Layanan Perkantoran seluruh Unit Kerja Teknis dan Balai BM).

Evaluasi pencapaian sasaran kegiatan Ditjen Bina Marga difokuskan pada kegiatan 1 yaitu **“Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional”** dikarenakan kegiatan tersebut berdampak langsung pada pencapaian sasaran program dan sasaran strategis Ditjen Bina Marga, dimana pada kegiatan 1 tersebut terdapat sasaran kegiatan “Peningkatan pelaksanaan preservasi dan tingkat kapasitas jalan” dengan Indikator Kinerja Kegiatan berupa Tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional. Adapun output kegiatan yang juga menjadi sasaran untuk mewujudkan tujuan BPJN Jayapura dan mendukung tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional dan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan, pengendalian dan pengawasan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional, yang terdiri dari :
 - Jumlah dokumen perencanaan penyelenggaraan jaringan jalan dan jembatan;
 - Jumlah dokumen pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan
2. Pemeliharaan, Peningkatan dan Pembangunan Jalan Nasional, yang terdiri dari :
 - Panjang Jalan yang terpelihara;
 - Panjang Jalan yang ditingkatkan;
 - Panjang Jembatan yang terpelihara;
 - Panjang Jembatan yang ditingkatkan;
 - Panjang Jalan Strategis Lintas Utama Pulau yang dibangun;
 - Panjang Jalan Akses simpul transportasi yang (Pelabuhan, Bandara) yang dibangun;
 - Panjang Jembatan yang Dibangun;
 - Dukungan Jalan Daerah.
3. Layanan Sarana dan Prasarana Internal;
4. Layanan Dukungan Manajemen Satker;

5. Layanan Perkantoran.

Output-output kegiatan di atas selanjutnya mendasari perumusan sasaran kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan BPJN Jayapura. Adapun sasaran kegiatan di lingkungan BPJN Jayapura pada periode tahun 2020 – 2024 yang juga terdapat pada Dokumen Renstra BPJN Jayapura Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Terpeliharanya Ruas Jalan sepanjang 823,14 km;
2. Ruas Jalan Baru yang dilakukan peningkatan sepanjang 54,25 km;
3. Terbangunnya Ruas Jalan sepanjang 60,20 km;
4. Terbangunnya Ruas Jembatan sepanjang 570,08 m;
5. Terpeliharanya Ruas Jalan Nasional sepanjang 1.255,37 km;
6. Ruas jalan yang dilakukan Preservasi, Rekonstruksi, Rehabilitasi sepanjang 137,83 km;
7. Jembatan yang dilakukan preservasi rutin sepanjang 16.059,90 m;
8. Jembatan yang dilakukan preservasi sepanjang 6.915,90 m;
9. Jembatan yang dilakukan penggantian sepanjang 2.292,27 m;
10. Tersusunnya dokumen perencanaan, pengendalian dan pengawasan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional sebanyak 5 dokumen;
11. Ruas jalan yang dilakukan Preservasi, Rekonstruksi, Rehabilitasi untuk menunjang aspek keselamatan jalan sepanjang 6,5 km;
12. Terpenuhinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal sebanyak 5 layanan;
13. Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Satker sebanyak 5 layanan;
14. Terpenuhinya Layanan Perkantoran sebanyak 5 layanan.

Besaran target keluaran Renstra BPJN Jayapura untuk periode 2020-2024 dapat dilihat pada **Tabel IV.3** berikut ini:

Tabel II.3
Target Keluaran (Output) Kegiatan berdasarkan Renstra BPJN Jayapura 2020-2024

NO.	TARGET OUTPUT UTAMA RENSTRA 2020-2024	SATUAN	TAHUN					TOTAL
			2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional								
	IKSP 1 Tingkat Aksesibilitas		76.2	78.6	78.6	78.6	81.0	
IKK Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional								
1	Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan Baru	km	259.83	77.52	94.00	177.37	214.42	823.14
2	Panjang Peningkatan Jalan Baru	km	9.55	32.70	12.00	-	-	54.25
3	Panjang Pembangunan Jalan	km	7.95	19.95	2.30	15.00	15.00	60.20
	<i>Pembangunan Jalan s/d Perkerasan</i>	<i>km</i>	<i>2.15</i>	<i>7.70</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>9.85</i>
	<i>Pembentukan Badan Jalan</i>	<i>km</i>	<i>5.80</i>	<i>12.25</i>	<i>2.30</i>	<i>15.00</i>	<i>15.00</i>	<i>50.35</i>

NO.	TARGET OUTPUT UTAMA RENSTRA 2020-2024	SATUAN	TAHUN					TOTAL
			2020	2021	2022	2023	2024	
4	Panjang pembangunan jembatan	m	189.23	22.20	112.15	123.25	123.25	570.08
IKSP 2 Rating Kondisi			3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	
IKK Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional								
5	Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan	km	1,234.77	1,233.97	1,235.12	1,218.35	1,216.82	1,255.37
6	Panjang Preservasi, Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	km	20.60	21.40	20.25	37.02	38.56	137.83
7	Panjang Preservasi Rutin Jembatan	m	11,682.90	15,312.90	14,305.70	14,633.40	13,187.20	16,059.90
8	Panjang Preservasi Jembatan	m	2,098.50	434.00	1,452.70	1,097.00	1,833.70	6,915.90
9	Panjang Penggantian Jembatan	m	309.27	313.00	301.50	329.50	1,039.00	2,292.27
10	Perencanaan, pengendalian dan pengawasan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional	Dok	1	1	1	1	1	5
IKSP 3 Rating Keselamatan			1.7	1.7	1.7	1.0	1.0	
IKK Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional								
11	Panjang Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	m	-	-	-	5,500.00	1,000.00	6,500.00
IKSP 1 Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tata Kelola								
IKK Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan								
12	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5
13	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	1	1	5
14	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5

Sumber : Data BPJN Jayapura, Matriks Kinerja Bina Marga dan data Target KSJJ 2020-2024

Alokasi pendanaan pelaksanaan kegiatan di lingkungan BPJN Jayapura berdasarkan Renstra BPJN Jayapura 2020-2024 bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.4
Kebutuhan Pendanaan dalam Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan Renstra BPJN Jayapura 2020-2024

NO.	TARGET OUTPUT UTAMA RENSTRA 2020-2024	TAHUN					BIAYA (Rp.) Milyar	
		2020	2021	2022	2023	2024		
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional							6,900.88	
IKSP 1 Tingkat Aksesibilitas							2,275.39	
IKK Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional								
1	Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan Baru	10.78	5.24	6.11	11.53	13.94	47.59	
2	Panjang Peningkatan Jalan Baru	56.90	279.93	97.71	-	-	434.53	
3	Panjang Pembangunan Jalan	95.00	293.62	90.73	375.00	375.00	1,229.35	
	Pembangunan Jalan s/d Perkerasan	25.00	126.00	-	-	-	151.00	

NO.	TARGET OUTPUT UTAMA RENSTRA 2020-2024	TAHUN					BIAYA Milyar (Rp.)
		2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>Pembentukan Badan Jalan</i>	70.00	167.62	90.73	375.00	375.00	1,078.35
4	Panjang pembangunan jembatan	238.37	15.08	98.46	106.00	106.00	563.91
IKSP 2 Rating Kondisi							4,175.16
IKK Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional							
5	Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan	201.43	215.53	232.77	237.66	222.42	1,109.80
6	Panjang Preservasi, Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	137.59	191.10	151.88	277.65	289.16	1,047.38
7	Panjang Preservasi Rutin Jembatan	11.68	16.08	15.02	15.37	13.85	71.99
8	Panjang Preservasi Jembatan	63.50	15.95	53.39	40.31	67.39	240.54
9	Panjang Penggantian Jembatan	151.49	131.46	126.63	138.39	436.38	984.35
10	Perencanaan, pengendalian dan pengawasan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional	125.39	134.17	143.56	153.61	164.37	721.10
IKSP 3 Rating Keselamatan							13.01
IKK Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional							
11	Panjang Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	-	-	-	11.91	1.10	13.01
IKSP 1 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tata Kelola							437.32
IKK Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan							
12	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	0.40	0.43	0.46	0.50	0.53	2.33
13	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	32.88	35.18	37.64	40.28	43.10	189.07
14	Jumlah Layanan Perkantoran	42.76	45.76	48.96	52.39	56.05	245.92

Sumber : Data BPJN Jayapura, Matriks Kinerja Bina Marga dan data Target KSJJ 2020-2024

2.1.6. Tujuan dan Sasaran Satker BPJN Jayapura 2020-2024

Dokumen Perencanaan Lainnya Satker BPJN Jayapura 2020 – 2024 yang merupakan dokumen yang mengarahkan setiap kegiatan dalam lingkup penanganan Satker BPJN Jayapura pada periode 2020 - 2024 dipastikan selaras dan searah dengan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran Kementerian PUPR dalam Renstra Kementerian PUPR 2020-2024, tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Bina Marga dalam Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga 2020-2024, serta Renstra BPJN Jayapura 2020 - 2024. Dokumen Perencanaan Lainnya Satker BPJN Jayapura sebagai bentuk penjabaran atas Renstra BPJN Jayapura 2020 - 2024 selaku entitas di atasnya merupakan wujud penetapan rencana yang sekaligus berfungsi sebagai pengendali pelaksanaan. Adapun dalam menentukan tujuan pelaksanaan kegiatan yang berada dalam lingkup pekerjaan yang ditangani Satker BPJN Jayapura mengacu kepada tujuan entitas di atasnya (BPJN Jayapura) yaitu :

1. Mendukung tercapainya konektivitas jalan nasional yang andal dan prima dalam lingkup wilayah penanganan BPJN Jayapura;

2. Mendukung tercapainya peningkatan standar pelayanan jalan nasional dalam lingkup wilayah penanganan BPJN Jayapura sesuai kebutuhan dan standar;
3. Mendukung tercapainya peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan teknis dalam program penyelenggaraan jalan nasional dalam lingkup wilayah penanganan BPJN Jayapura;
4. Mendukung tercapainya peningkatan kualitas sumber daya dan kelembagaan di Lingkungan Satker BPJN Jayapura;

Adapun sasaran kegiatan di lingkungan Satker BPJN Jayapura dalam periode tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya dokumen Perencanaan, pengendalian dan pengawasan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional sebanyak 5 dokumen;
2. Terpenuhinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal sebanyak 5 layanan;
3. Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Satker sebanyak 5 layanan;
4. Terpenuhinya Layanan Perkantoran sebanyak 5 layanan.

2.2 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja tahunan pada tahun berjalan memuat sasaran program, indikator kinerja *output* dan target kinerja. Perjanjian Kinerja ini selanjutnya dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan dan sasaran aktual sesuai target *output* dan target *outcome* yang ada pada RKT setelah melalui pembahasan antar instansi terkait baik secara *bottom up* dan *top down* melalui konsultasi dan raker maupun rakor.

Setelah DIPA disetujui kemudian disusun POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) oleh masing-masing satker. Berdasarkan data struktur RKA-KL, DIPA awal dan POK, ditentukan target *outcome* dan indikator yang akan dicapai pada tahun 2021. Data tersebut kemudian dituangkan dan disusun kedalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Awal Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jayapura Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya pada bulan November 2021 dilakukan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Revisi yang menetapkan target kinerja dan alokasi anggaran Satker BPJN Jayapura Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Revisi DIPA status 4 November 2021. Angka volume target dan alokasi anggaran pada PK Revisi ini yang akan menjadi parameter awal dalam pengukuran kinerja Satker BPJN Jayapura di akhir Tahun Anggaran 2021.

2.2.1 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi 2021

Tabel di bawah ini akan menyajikan informasi data dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2021 (Awal) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2021 (Revisi) antara Kepala Satker BPJN Jayapura dengan Dirjen Bina Marga. Target Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Tahun 2021 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada **Tabel II.3** dan **Tabel II.4** di bawah ini :

Tabel II.3 Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021 (Awal)
Satuan Kerja BPJN Jayapura

			AWAL
Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2020	Target 2021
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	IKSP 2 : Rating Kondisi Jalan Nasional		
	IKK : Tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional	116.85 %	100.00 %
	Parameter <i>Rating kondisi jalan nasional</i>	2.67	2.84
	Rincian Output		
	CBR 001 Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	Dokumen	1 Dokumen

Anggaran Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Tahun 2021 (Awal):
Rp 73.505.632.000,-

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021 (Revisi)
Satuan Kerja BPJN Jayapura

			REVISI
Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2020	Target 2021
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	IKSP 2 : Rating Kondisi Jalan Nasional		
	IKK : Tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional	116.85 %	100.00 %
	Parameter <i>Rating kondisi jalan nasional</i>	2.67	2.84
	Rincian Output		
	CBR 001 Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	Dokumen	1 Dokumen
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	IKSP 1 : Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tata Kelola		
	IKK : Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan	100.00 %	100.00 %
	Rincian Output		
	EAD 002 Layanan Sarana Internal	Unit	1 Unit
	EAC 004 Layanan Dukungan Manajemen Satker	12 Layanan	1 Layanan
EAA 005 Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	

Anggaran Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Tahun 2021 (Revisi):
Rp 42.578.064.000,-

Pada Perjanjian Kinerja Awal, untuk output Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan, Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik, Layanan Sarana Internal, Layanan Dukungan Manajemen Satker, dan Layanan Perkantoran yang terdapat dalam Indikator Kinerja Program Tingkat Dukungan Manajemen

Kementerian PUPR tidak ditampilkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2021 (Awal) BPJN Jayapura namun rinciannya terdapat dalam Catatan Kaki PK tersebut.

2.2.2 Sandingan PK Awal dan PK Revisi 2021

Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2021 (Revisi) Satker BPJN Jayapura mengacu pada ketentuan Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program yang terdapat dalam Renstra Ditjen Bina Marga 2020 – 2024, dimana terdapat perubahan pada Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program yang digunakan. Sesuai dengan Renstra Ditjen Bina Marga 2020 – 2024, untuk mendukung capaian program Infrastruktur Konektivitas dan Dukungan Manajemen, maka ditentukan sasaran strategis antara lain “Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional” dan “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya”. Sehubungan dengan upaya mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, terdapat 2 (dua) sasaran program yang harus dipenuhi oleh Ditjen Bina Marga hingga akhir tahun 2024, yaitu:

1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jalan Nasional

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut :

- d. *Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional* (persentase pusat kegiatan dan simpul strategis nasional yang diakses jalan nasional);
- e. *Rating Kondisi Jalan Nasional* (Nilai gabungan antara nilai IRI, PCI, umur struktur jalan, dan drainase jalan pada seluruh ruas jalan nasional);
- f. *Rating keselamatan Jalan Nasional* (Nilai gabungan antara angka kecelakaan per populasi dan jumlah titik blackspot per populasi).

2. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

Dengan Indikator Kinerja Program yang berupa *Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR*.

Empat output yang ditangani oleh Satker BPJN Jayapura di Tahun Anggaran 2021 berkontribusi dalam mendukung Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat Rating Kondisi Jalan Nasional dan Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan pada total alokasi DIPA keseluruhan di lingkungan Satker BPJN Jayapura antara lain sebagai berikut :

1. Pemisahan DIPA dengan Satker BPJN Wamena di awal tahun 2021;
2. Adanya revisi anggaran akibat *refocussing* kegiatan dalam rangka penanganan penyebaran COVID-19;
3. Adanya optimalisasi terhadap dana sisa lelang dana dana rupiah murni yang tidak terserap.

Berikut merupakan Tabel Sandingan PK Awal dengan PK Revisi Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

Tabel II. 7 Sandingan PK Awal dengan PK Revisi Tahun Anggaran 2021

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2021 (PK Awal - Januari)	Target 2021 (PK Revisi - November)	Keterangan
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	IKSP 2 : Rating Kondisi Jalan Nasional			
	IKK : Tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional	100.00 %	100.00 %	
	Parameter <i>Rating kondisi jalan nasional</i>	2.84	2.84	
	Rincian Output			
	CBR 001 Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	Target tidak berubah
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	IKSP 1 : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tata Kelola			
	IKK : Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan	100.00 %	100.00 %	
	Parameter <i>Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</i>	63.35 %	63.35 %	
	Rincian Output			
	EAD 002 Layanan Sarana Internal	1 Unit	1 Unit	Target tidak berubah
	EAC 004 Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1 Layanan	Target tidak berubah
	EAA 005 Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	Target tidak berubah

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
2. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga

Anggaran Awal

Rp 8,889,559,000
 Rp 33,688,505,000
 Rp 42,578,064,000

Anggaran Revisi

Rp 8,889,559,000
 Rp 33,688,505,000
 Rp 42,578,064,000

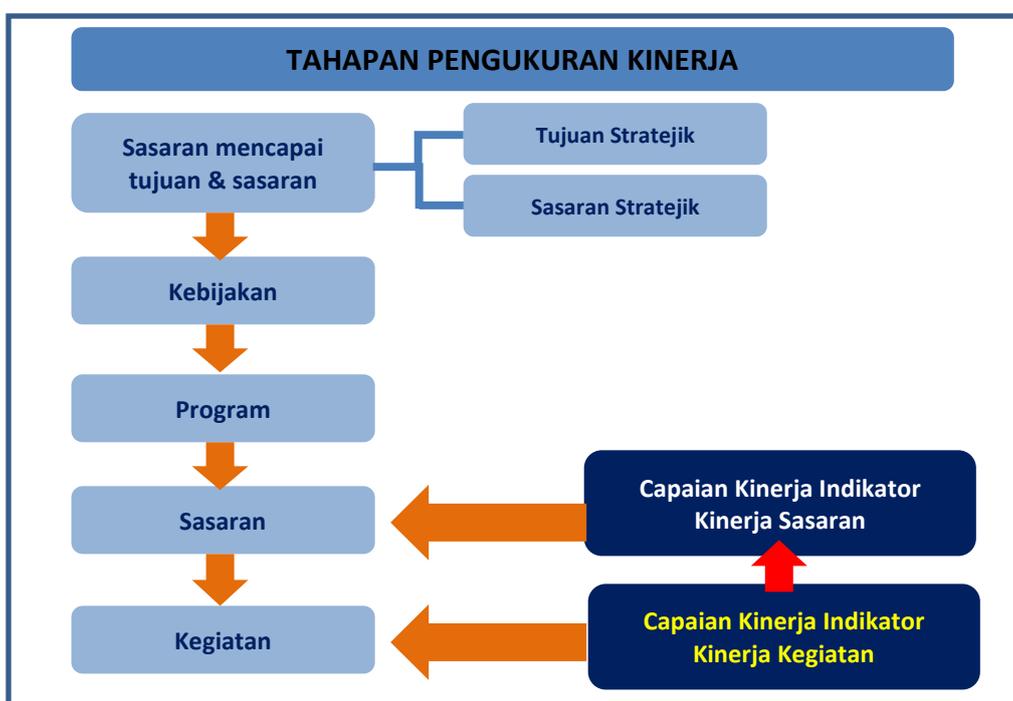
2.3 METODE PENGUKURAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara

kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (bulanan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran Kinerja Eselon III Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Tahun 2021 dilaksanakan terhadap kinerja realisasi aktual Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan Eselon III Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Tahun 2021 yang diturunkan dari kebijakan program dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Renstra Ditjen Bina Marga 2020 – 2024. Gambaran tahapan pengukuran kinerja dapat dilihat lebih lanjut pada **Gambar 2.5** di bawah ini:



Gambar 2.5 Tahapan Pengukuran Kinerja

Untuk memonitor kemajuan pelaksanaan kegiatan maka setiap bulan dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja melalui kegiatan rapat monitoring dan evaluasi kinerja dan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi kinerja. Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi kinerja bulanan menggunakan data rencana aksi kinerja yang ditetapkan bersamaan dengan penetapan perjanjian kinerja. Rencana aksi kinerja memuat target-target bulanan yang harus dipenuhi untuk mencapai target tahunan. Laporan monitoring dan evaluasi kinerja bulanan tersebut memuat realisasi kinerja pada bulan yang bersangkutan dibandingkan dengan target bulanan. Adapun realisasi kinerja dimonitor dengan kriteria:

- a. Capaian target secara periodik dipantau kemajuannya;
- b. Setiap ada deviasi segera dilakukan analisis dan dicarikan alternatif solusinya;

c. Terdapat mekanisme yang memungkinkan pimpinan mengetahui progres kinerja terbaru.

Metode Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program dan Pengukuran Kinerja diuraikan pada **Tabel II.5** dan **Tabel II.6** seperti tampak dibawah ini :

Tabel II.5 Metode Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program

Sasaran Program	Satuan	Cara Pengukuran	Sumber Data
1. Tingkat Rating Kondisi Jalan Nasional	%	<p>IKP Rating Kondisi Jalan didefinisikan sebagai nilai rata-rata terbobot dari beberapa komponen individu yang sudah umum digunakan dalam menilai kondisi dari suatu segmen jalan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kekasaran / <i>Roughness</i> (nilai international roughness index, IRI) Kondisi Permukaan Perkerasan / <i>Pavement Surface Condition</i> (PCI) Sisa Umur Perkerasan / <i>Remaining Useful Life</i> (Pavement Strength) Efektivitas Drainase / <i>Drainage Effectiveness</i> (Surface Drainage and Subsoil Drainage) 	<ul style="list-style-type: none"> SK Jalan Nasional; Data Rencum Jangka menengah dari KSJJ; Data hasil Survei Kondisi Jalan, Jembatan, Lereng di ruas Jalan Nasional penanganan BPJN Jayapura

IRI

Skor IKP Roughness	Deskripsi	Rentang IRI Jalan Berpenutup	Rentang IRI Jalan Tanpa Penutup
1	Sangat Baik	IRI < 2	IRI < 4
2	Baik	2 ≤ IRI < 4	4 ≤ IRI < 9
3*	Sedang	4 ≤ IRI < 6	9 ≤ IRI < 13
4	Rusak Ringan	6 ≤ IRI < 8	13 ≤ IRI < 14
5	Rusak Berat	IRI ≥ 8	IRI ≥ 14
*3	*Sedang	*Tidak ada data	*Tidak ada data

Sumber: KIAT IRAMS-DC - RENSTRA Proposed Key Performance Index Condition V1.4 dan IRIMS-V3 System Description (Engineering Rules: Pavements) Report

PCI, Sisa Umur Perkerasan
Skala Penilaian KPI PCI

Skor IKP Kondisi Permukaan Jalan	Deskripsi	Rentang PCI _{final}
1	Sangat Baik	PCI > 85
2	Baik	70 < PCI ≤ 85
3	Sedang	55 < PCI ≤ 70
4	Rusak Ringan	25 < PCI ≤ 55
5	Rusak Berat	PCI ≤ 25

Sumber: KIAT IRAMS-DC - RENSTRA Proposed Key Performance Index Condition

Sasaran Program Satuan Cara Pengukuran Sumber Data

1. Menghitung Nilai Struktural Perkerasan / Structural Number of Pavement (SNP)

$$SNP = \frac{1.67}{d_0^{0.57r}} \quad \text{(Rumus 6)}$$

Dimana :

- SNP = Nilai Struktural Perkerasan
- d_0 = defleksi sensor d_0 FWD yang sudah dinormalisasi ke beban 50 kN (microns)

2. Menghitung Sisa Kapasitas Struktural / Remaining Structural Capacity (CAP)

$$CAP = \left\{ \frac{[SNP - (K_i \cdot 1.05)] K_c^{0.175}}{[K_g \cdot 2.135]} \right\}^{\frac{1}{1.18}} \quad \text{(Rumus 7)}$$

Dimana :

- CAP = Sisa Kapasitas Struktural (MESA)
- SNP = Nilai Struktural Perkerasan
- K_i, K_g, K_c = faktor kalibrasi berdasarkan tipe perkerasan (aspal full depth digunakan sebagai default)

Jenis Perkerasan	K_i	K_g	K_c
Aspal Tipis Tak Terikat	1.650	0.925	2.100
Aspal Tipis Stabilised	1.700	0.700	2.800
Aspal Full Depth	0.000	1.930	0.610

Sumber: KIAT IRAMS-DC IRMS-V3 System Description (Engineering Rules: Pavements) Report

3. Menghitung Sisa Umur Perkerasan / Remaining Structural Life (RSL)

$$RSL = \frac{LN \left(\frac{CAP \cdot r + MESA \cdot (1+r)}{MESA} \right)}{LN(1+r)} - 1 \quad \text{(Rumus 8)}$$

Dimana :

- RSL = Sisa Umur Perkerasan (dalam tahun)
- CAP = Sisa Kapasitas Struktural (MESA)
- SNP = Nilai Struktural Perkerasan
- r = Laju pertumbuhan lalu lintas

Apabila data lendutan/defleksi tidak tersedia, nilai RSL dapat diperoleh dengan pendekatan terhadap nilai IRI sesuai dengan persamaan berikut:

$$RSL_{IRI} = \frac{\ln \frac{IRI - 1.52}{6.48}}{-0.074} \quad \text{(Rumus 9)}$$

jika IRI = 0 atau tidak ada data, maka diambil nilai RSL = 9 (tahun)
jika IRI < 2, maka diambil nilai RSL = 35 (tahun)

Bila nilai RSL_{IRI} kurang dari 0, maka diambil nilai RSL = 0 sesuai persamaan berikut:

$$RSL_{approx} = \max(RSL_{IRI}, 0) \quad \text{(Rumus 10)}$$

Nilai RSL_{final} adalah nilai minimum antara RSL_{approx} atau 50 sesuai dengan persamaan berikut:

$$RSL_{final} = \min(RSL_{approx}, 50) \quad \text{(Rumus 11)}$$

Skala Penilaian IKP Sisa Umur Struktur Perkerasan

Skor IKP Sisa Umur Struktur Perkerasan	Deskripsi	Rentang RSL (tahun)
1	Sangat Baik	RSL > 15
2	Baik	10 < RSL ≤ 15
3	Sedang	5 < RSL ≤ 10
4	Rusak Ringan	1 < RSL ≤ 5
5	Rusak Berat	RSL ≤ 1

Sasaran Program

Satuan

Cara Pengukuran

Sumber Data

Efektivitas Drainase

Skala Penilaian KPI Efektivitas Drainase Permukaan

Skor IKP Sub-Komponen Drainase Permukaan	Deskripsi	Kombinasi PCI dan Terrain Datar		Kombinasi PCI dan Terrain Berbukit/Pegunungan	
		Rentang PCI _{low}	Terrain	Rentang PCI _{low}	Terrain
1	Sangat Baik	PCI > 85	Datar	PCI > 70	Berbukit/Pegunungan
2	Baik	70 < PCI ≤ 85	Datar	55 < PCI ≤ 70	Berbukit/Pegunungan
3	Sedang	55 < PCI ≤ 70	Datar	25 < PCI ≤ 55	Berbukit/Pegunungan
4	Rusak Ringan	25 < PCI ≤ 55	Datar	PCI ≤ 25	Berbukit/Pegunungan
5	Rusak Berat	PCI ≤ 25	Datar		

Sumber: KIAT IRAMS-DC - RENSTRA Proposed Key Performance Index Condition V1.4 08082019 dan IRMS-V3 System Description (Engineering Rules: Pavements) Report

Skala Penilaian IKP Sub-Komponen Drainase Subsoil

Skor IKP Sub-Komponen Drainase Subsoil	Deskripsi	Infrastruktur Drainase Tersedia	Terrain
2	Baik	Ya	Berbukit/Pegunungan
3	Sedang	Tidak / Tidak ada data	Berbukit/Pegunungan
4	Rusak Ringan	Ya	Datar
5	Rusak Berat	Tidak / Tidak ada data	Datar

Sumber: KIAT IRAMS-DC - RENSTRA Proposed Key Performance Index Condition V1.4 08082019 dan IRMS-V3 System Description (Engineering Rules: Pavements) Report

Faktor Penyesuaian Nilai Kondisi

Faktor Penyesuaian Nilai Kondisi		Deskripsi
Medan (Terrain)	Berbukit/Pegunungan	-1
	Tanpa perataan	+1
Bahu	Lebih tinggi dari permukaan jalan	+1

Sumber: KIAT IRAMS-DC - RENSTRA Proposed Key Performance Index Condition V1.4 08082019 dan IRMS-V3 System Description (Engineering Rules: Pavements) Report

Efektivitas Drainase Permukaan

Efektivitas Drainase Permukaan	
Sub-komponen yang Dinilai	Bobot
Kondisi permukaan jalan	40%
Rutting (luas dan tingkat keparahan)	40%
Kondisi bahu	20%

Efektivitas Drainase Subsoil

Sub-komponen yang Dinilai	Bobot
Kondisi struktural	50%
Serviceability	50%

Faktor Pembobot KPI Final

Komponen KPI Individu	Faktor Pembobot
Kekasaran (IRI)	60%
Kondisi Permukaan Perkerasan (PCI)	10%
Sisa Umur Perkerasan (RSL)	15%
Efektivitas Drainase	15%

Tabel II.6 Metode Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan/ Output Fisik

No	Indikator Kinerja Kegiatan/ Output	Satuan	Cara Pengukuran	Sumber Data
Tingkat Rating Kondisi Jalan Nasional				
1	Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	Layanan	realisasi Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan yang terpenuhi	E-monitoring SIPP
Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR				
2	Layanan Sarana Internal	Layanan	realisasi Layanan Sarana Internal yang terpenuhi	E-monitoring SIPP
3	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	realisasi Layanan Sarana dan Prasarana Internal yang terpenuhi	E-monitoring SIPP
4	Layanan Perkantoran	Layanan	realisasi Layanan Perkantoran yang terpenuhi	E-monitoring SIPP

Sesuai dengan informasi yang tertera pada tabel diatas, didalam memperoleh data kinerja pelaksanaan kegiatan di lingkungan Satker BPJN Jayapura baik bulanan maupun pertahun telah didukung dengan sistem pengelolaan data kinerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Sistem Informasi *Integrated electronic Monitoring* (emonitoring.pu.go.id) dan SiPP (sipp.pu.go.id) sebagai basis data yang sistematis. Pengumpulan data dilakukan oleh petugas penyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja dengan berkoordinasi dengan petugas e-Monitoring/ SiPP dan juga PPK dan Kasatker terkait.

2.4 TARGET TAHUN INI MENURUT DOKUMEN PERENCANAAN

Dokumen Perencanaan Lainnya Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura sebagai bentuk penjabaran atas Renstra BPJN Jayapura tahun 2020-2024, merupakan wujud penetapan rencana, sekaligus sebagai pengendali pelaksanaan penanganan jalan dan jembatan pada Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura. Dokumen Perencanaan Lainnya ini menjadi arahan bagi setiap kegiatan dalam lingkup Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura dan sebagai acuan dalam mempertanggungjawabkan akuntabilitas kinerja yang dipastikan selaras dan searah dengan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam RPJM maupun Visi, Misi, ditingkat Direktorat Jenderal Bina Marga atau Kementerian PUPR.

Sandingan target yang terdapat di bawah ini merupakan sandingan Target Perjanjian Kinerja Satker BPJN Jayapura pada PK Tahun Anggaran 2021 dengan Target Tahun 2021 pada Dokumen Perencanaan Lainnya Satker BPJN Jayapura 2020-2024, sebagai berikut :

**Tabel II.7 Sandingan Target Perjanjian Kinerja dengan
Dokumen Perencanaan Satker BPJN Jayapura di Tahun 2021**

NO	OUTPUT	SAT	TARGET 2021			KETERANGAN
			TARGET DOK. PRC SATKER	PK AWAL	PK REVISI AKHIR	
1	Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Layanan	1			Target untuk output ini tidak terdapat pada pelaksanaan TA 2021 dikarenakan terdapat perubahan nama klasifikasi rincian output pada pelaksanaan TA 2021
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1			Target untuk output ini tidak terdapat pada pelaksanaan TA 2021 dikarenakan terdapat perubahan nama klasifikasi rincian output pada pelaksanaan TA 2021
3	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	Target dalam Perjanjian Kinerja sesuai dengan yang terdapat dalam Renstra
4	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	Target dalam Perjanjian Kinerja sesuai dengan yang terdapat dalam Renstra
5	Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	Dokumen		1	1	Target untuk nama output ini tidak terdapat dalam Dokumen Perencanaan Lainnya Satker BPJN Jayapura 2020-2024 dikarenakan terdapat perubahan nama klasifikasi rincian output pada pelaksanaan TA 2021
6	Layanan Sarana Internal	Unit		1	1	Target untuk nama output ini tidak terdapat dalam Dokumen Perencanaan Lainnya Satker BPJN Jayapura 2020-2024 dikarenakan terdapat perubahan nama klasifikasi rincian output pada pelaksanaan TA 2021

Sumber : Renstra 2020-2024 dan PK 2021 Satker BPJN Jayapura

Dari tabel sandingan di atas, terlihat perbedaan antara target output yang tercantum di Dokumen Perencanaan Satker BPJN Jayapura Tahun 2021 dengan Target Perjanjian Kinerja (Awal dan Revisi) Tahun Anggaran 2021. Untuk Satker BPJN Jayapura, secara keseluruhan hal ini disebabkan oleh adanya perubahan penamaan output sesuai dengan yang tertera pada dokumen DIPA dan Perjanjian Kinerja Satker BPJN Jayapura seperti yang sudah dijelaskan pada kolom keterangan pada tabel di atas.



BAB III

Kapasitas Organisasi

BAB III. KAPASITAS ORGANISASI

3.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. SDM merupakan faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dalam pengelolaan suatu organisasi karena merupakan penggerak roda organisasi dalam mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Oleh karena itu, produktivitas organisasi sangat ditentukan oleh produktivitas SDM yang bersangkutan. Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari BPJN Jayapura didukung oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan total sebanyak 80 orang pegawai baik yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Non PNS. Klasifikasi dan kualifikasi Sumber Daya Manusia di lingkungan BPJN Jayapura yang merupakan kekuatan penggerak kegiatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat digambarkan sebagai berikut:

3.1.1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Klasifikasi berdasarkan status kepegawaian untuk pegawai Satker BPJN Jayapura dengan jumlah 80 orang dapat terlihat pada **Gambar 3.1** sebagai berikut :

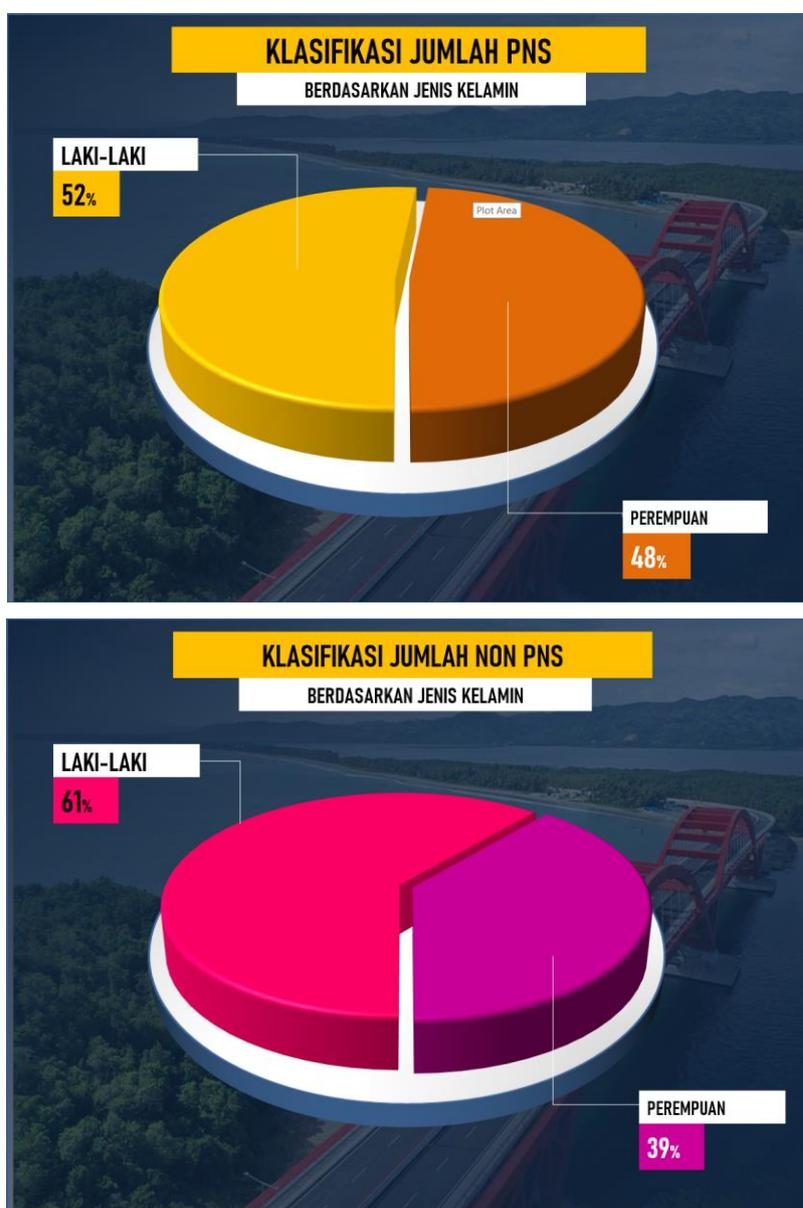


Gambar 3.1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa Pegawai Non PNS mendominasi jumlah pegawai yang ada di Satker BPJN Jayapura yaitu sebanyak 49 pegawai berstatus Non PNS dan 31 orang berstatus PNS dimana diantaranya ada yang berstatus PNS Daerah sebanyak 1 orang dan PNS Pusat sebanyak 30 orang.

3.1.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Secara keseluruhan total jumlah pegawai Satker BPJN Jayapura berjenis kelamin laki-laki lebih dominan dari pegawai berjenis kelamin perempuan. Jumlah pegawai Satker BPJN Jayapura (status pegawai PNS dan Non PNS) berjenis kelamin laki-laki sebanyak 46 orang dan perempuan sebanyak 34 orang dapat terlihat pada **Gambar 3.2** sebagai berikut :

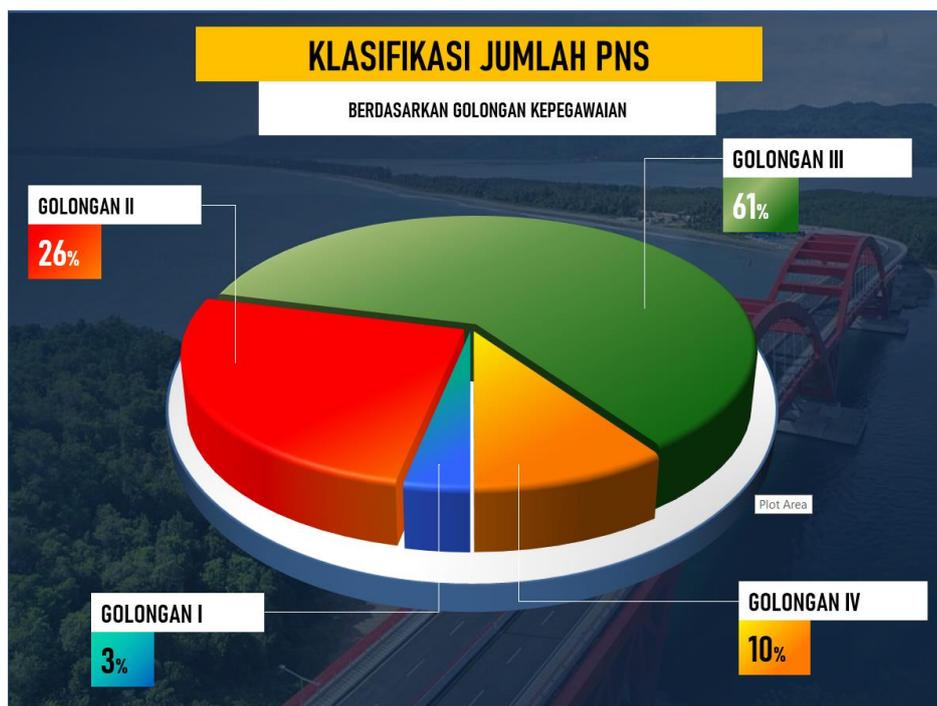


Gambar 3.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah pegawai laki-laki berstatus PNS yaitu sebanyak 16 orang, sedangkan jumlah pegawai perempuan berstatus PNS sebanyak 15 orang. Untuk pegawai dengan status Non PNS, jumlah pegawai laki-laki yaitu sebanyak 30 orang, sedangkan jumlah pegawai perempuan sebanyak 19 orang.

3.1.3 Klasifikasi PNS Berdasarkan Golongan Kepegawaian

Pengelompokan jumlah Pegawai Negara Sipil (PNS) berdasarkan golongan terlihat pada **Gambar 3.3** berikut :

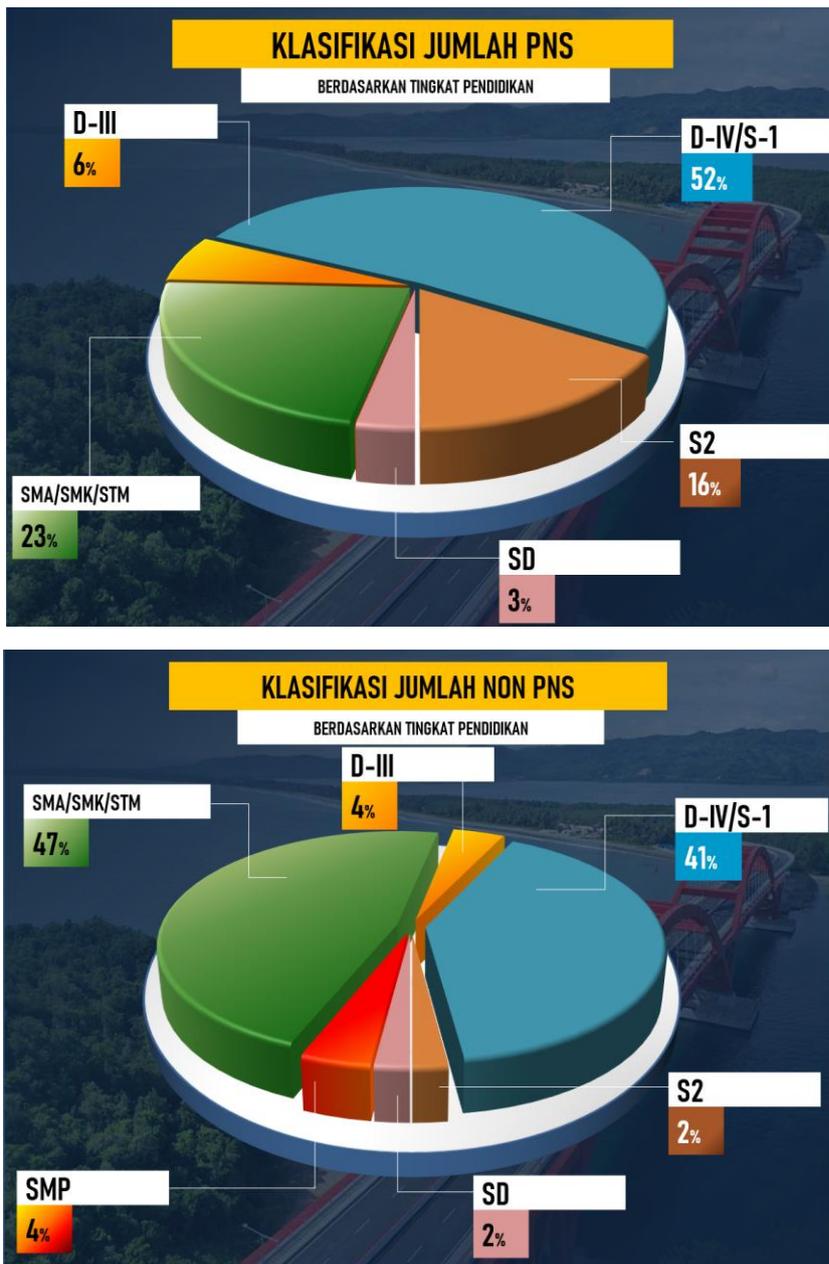


Gambar 3.3 Klasifikasi PNS Berdasarkan Golongan Kepegawaian

Berdasarkan diagram di atas, dari total jumlah PNS sebanyak 31 orang, PNS dengan Golongan III merupakan yang terbanyak yaitu sebanyak 19 orang, disusul Golongan II sebanyak 8 orang, Golongan IV sebanyak 3 orang, dan paling sedikit adalah Golongan I sebanyak 1 orang.

3.1.4 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah pegawai menurut pendidikan dikelompokkan dalam 6 tingkat pendidikan yaitu tingkat Strata 2, Strata 1/ Diploma IV, Diploma III, SMA/K/STM, SMP dan SD. Di bawah ini kami sajikan informasi klasifikasi tingkat pendidikan yang dibagi berdasarkan status pegawai PNS dan Non PNS di lingkungan Satker BPJN Jayapura, sebagai berikut.



Gambar 3.4 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dapat disimpulkan bahwa kualitas latar belakang pendidikan pegawai di Satker BPJN Jayapura secara total (PNS dan Non PNS) tergolong cukup baik, didominasi oleh tingkat pendidikan S1/ DIV sebanyak 36 orang disusul SMA/K/STM sebanyak 30 orang. Pegawai dengan tingkat pendidikan SD dan SMP menduduki posisi terakhir yaitu masing-masing sebanyak 2 orang.

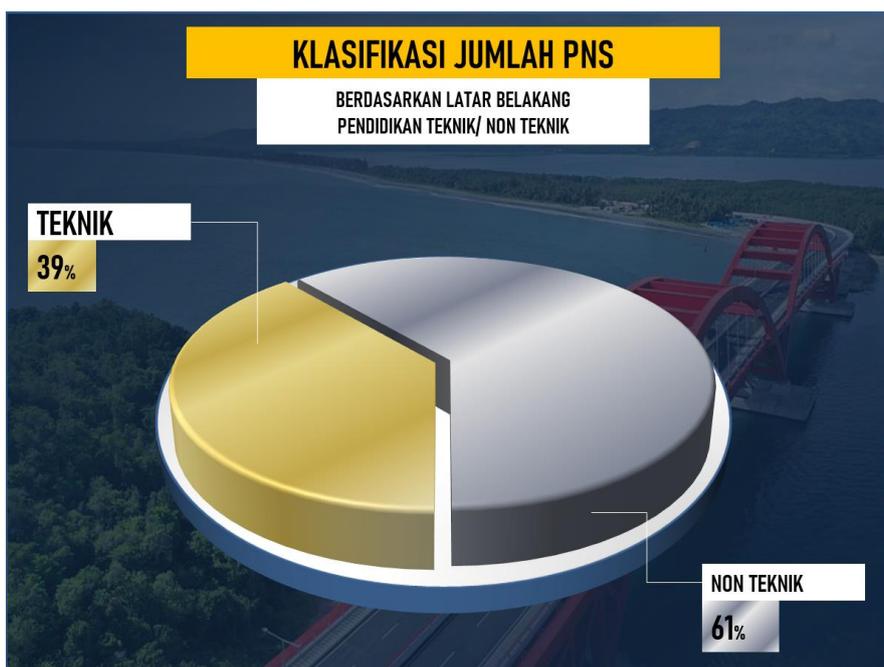
Adapun latar belakang pendidikan pada pegawai dengan status PNS juga didominasi oleh tingkat pendidikan S1/ DIV sebanyak 16 orang, kemudian SMA/K/STM sebanyak 7 orang, S2 sebanyak 5 orang, D-III sebanyak 2 orang, SD sebanyak 1 orang, untuk tingkat pendidikan SMP tidak ada. Untuk Pegawai dengan status Non PNS, latar belakang pendidikan didominasi oleh tingkat pendidikan SMA/K/STM

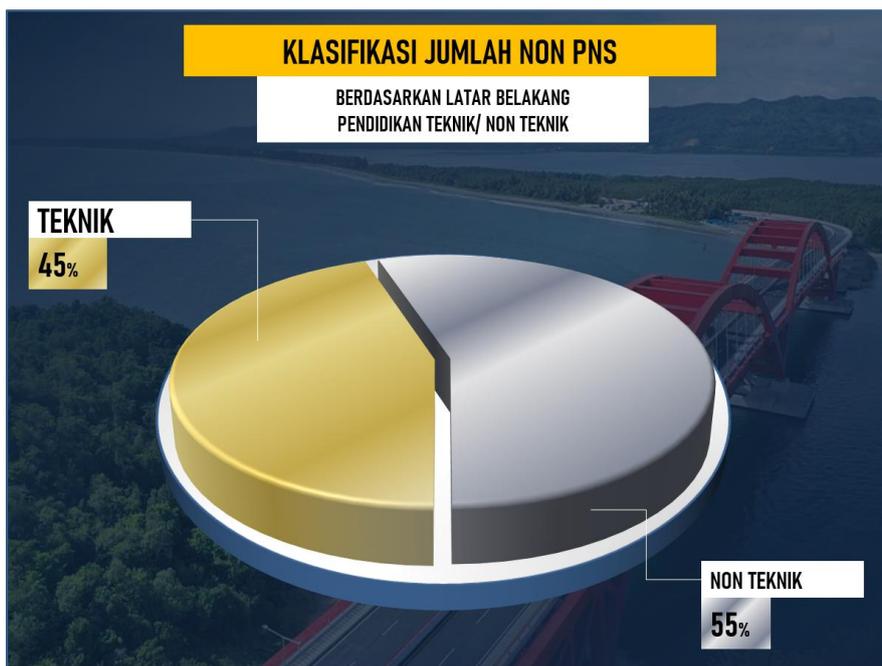
sebanyak 23 orang (16 diantaranya bekerja sebagai pegawai non substantif/ pendukung (pramubakti, supir, satpam)), kemudian S1/ DIV sebanyak 20 orang, D-III dan SMP masing-masing sebanyak 2 orang, serta S2 sebanyak 1 orang.

Berdasarkan data di atas, dapat dijadikan pertimbangan bagi Bidang Kepegawaian untuk memberikan perhatian khususnya terkait perluasan kesempatan untuk peningkatan kemampuan dan pengetahuan melalui keikutsertaan pegawai pada kegiatan bimbingan dan pelatihan teknis maupun administrasi sesuai dengan bidang pekerjaan masing-masing. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas dan keterampilan pegawai yang akan berujung pada peningkatan kinerja pegawai di Satker BPJN Jayapura kedepannya.

3.1.5 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Teknik & Non Teknik

Klasifikasi jumlah pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan teknik & non teknik hanya diperhitungkan pada pegawai dengan tingkat pendidikan mulai dari DIII, DIV/ S1, dan S2 yang dibagi berdasarkan jurusan yang bersifat teknik maupun non teknik. Informasi ini dapat dilihat pada **Gambar 3.5** berikut :



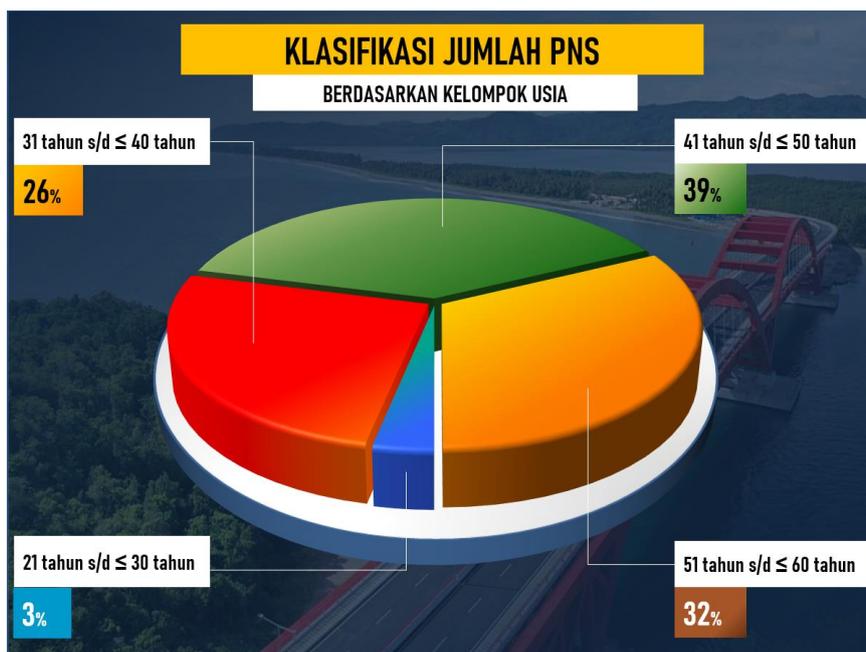


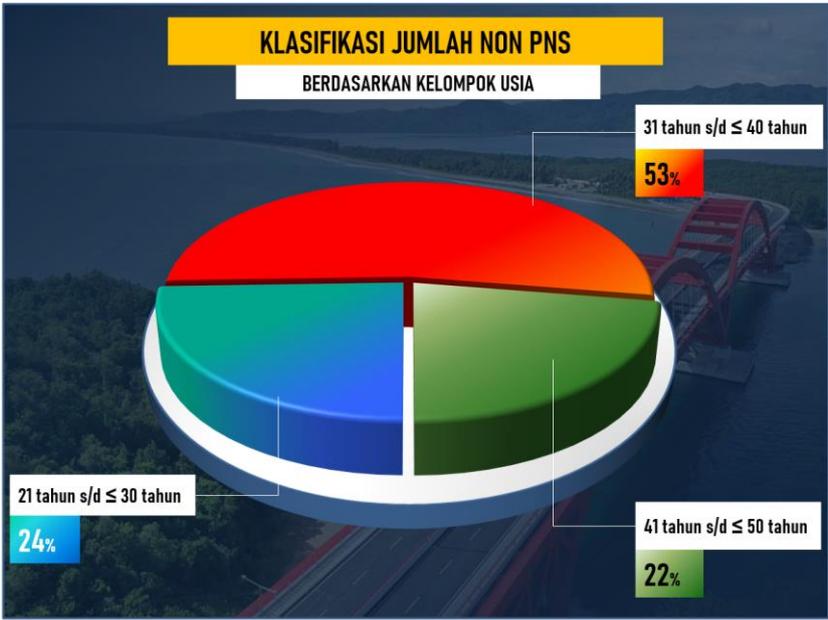
Gambar 3.5 Klasifikasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Teknik & Non Teknik

Jumlah pegawai dengan status PNS berlatar belakang pendidikan teknik sebanyak 12 orang dan non teknik sebanyak 19 orang, sedangkan jumlah pegawai dengan status Non PNS berlatar belakang pendidikan teknik sebanyak 22 orang dan non teknik sebanyak 27 orang.

3.1.6 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Usia

Klasifikasi jumlah pegawai berdasarkan kelompok usia dapat dilihat pada Gambar 3.6 dibawah ini :



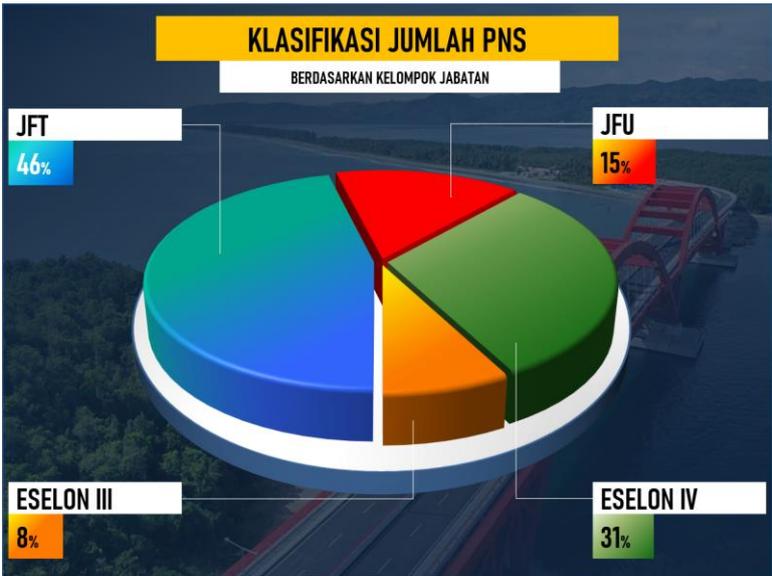


Gambar 3.6 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia

Dari diagram di atas, diperoleh informasi bahwa secara total, pegawai dengan kelompok usia 31 tahun s/d ≤ 40 tahun mendominasi jumlah keseluruhan pegawai Satker BPJN Jayapura baik yang berstatus PNS maupun Non PNS dengan total sebanyak 34 orang. Namun apabila dirinci berdasarkan status pegawai, maka untuk Pegawai PNS, yang mendominasi kelompok usia 41 tahun s/d ≤ 50 tahun sebanyak 12 orang dari total sebanyak 31 pegawai berstatus PNS pada Satker BPJN Jayapura.

3.1.7 Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Kelompok Jabatan

Klasifikasi jumlah PNS berdasarkan kelompok jabatan dapat dilihat pada Gambar 3.7 dibawah ini:



Gambar 3.7 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jabatan

Dari diagram di atas diperoleh informasi bahwa jumlah PNS berdasarkan kelompok jabatan di lingkungan Satker BPJN Jayapura didominasi oleh Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 6 orang, sedangkan untuk Jabatan Fungsional Umum sebanyak 2 orang, untuk jabatan Eselon IV sebanyak 4 orang dan Eselon III sebanyak 1 orang.

Secara rinci, Komposisi Pegawai di lingkungan Satker BPJN Jayapura dapat dilihat pada **Tabel III.1** di bawah ini :

**Tabel III.1 Komposisi Pegawai di lingkungan
Satker BPJN Jayapura**

No	Jenis	Data (Orang)	Persen terhadap total pegawai Satker BPJN Jayapura
1	Jumlah pegawai BPJN Jayapura	80	100.00
	PNS (Pegawai Negeri Sipil)	31	38.75
	>> <i>Pusat</i>	30	37.50
	>> <i>Daerah</i>	1	1.25
	Non-PNS	49	61.25
	>> <i>Substantif</i>	30	37.50
	>> <i>Pendukung</i>	19	23.75
2	Jumlah pegawai menurut jenis kelamin	80	100.00
	PNS (Pegawai Negeri Sipil)	31	38.75
	>> <i>Pria</i>	16	20.00
	>> <i>Wanita</i>	15	18.75
	Non-PNS	49	61.25
	>> <i>Pria</i>	30	37.50
	>> <i>Wanita</i>	19	23.75
3	Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan	80	100.00
	PNS (Pegawai Negeri Sipil)	31	38.75
	>> <i>S2</i>	5	6.25
	>> <i>DIV/ S1</i>	16	20.00
	>> <i>DIII</i>	2	2.50
	>> <i>SMA/SMK/STM</i>	7	8.75
	>> <i>SMP</i>	0	0.00
	>> <i>SD</i>	1	1.25
	Non-PNS	49	61.25
	>> <i>S2</i>	1	1.25
	>> <i>DIV/ S1</i>	20	25.00
	>> <i>DIII</i>	2	2.50
	>> <i>SMA/SMK/STM</i>	23	28.75
	>> <i>SMP</i>	2	2.50
	>> <i>SD</i>	1	1.25

No	Jenis	Data (Orang)	Persen terhadap total pegawai Satker BPJN Jayapura
4	Jumlah pegawai menurut Latar Belakang Pendidikan Teknik-Non Teknik	80	100.00
	PNS (Pegawai Negeri Sipil)	31	38.75
	>> <i>Teknik</i>	12	15.00
	>> <i>Non Teknik</i>	19	23.75
	Non-PNS	49	61.25
	>> <i>Teknik</i>	22	27.50
	>> <i>Non Teknik</i>	27	33.75
5	Jumlah pegawai menurut kelompok usia	80	100.00
	PNS (Pegawai Negeri Sipil)	31	38.75
	>> <i>51 tahun s/d ≤ 60 tahun</i>	10	12.50
	>> <i>41 tahun s/d ≤ 50 tahun</i>	12	15.00
	>> <i>31 tahun s/d ≤ 40 tahun</i>	8	10.00
	>> <i>20 tahun s/d ≤ 30 tahun</i>	1	1.25
	Non-PNS	49	61.25
	>> <i>51 tahun s/d ≤ 60 tahun</i>		0.00
	>> <i>41 tahun s/d ≤ 50 tahun</i>	11	13.75
	>> <i>31 tahun s/d ≤ 40 tahun</i>	26	32.50
	>> <i>20 tahun s/d ≤ 30 tahun</i>	12	15.00
6	Jumlah PNS menurut golongan	31	38.75
	Golongan I	1	1.25
	Golongan II	8	10.00
	Golongan III	19	23.75
	Golongan IV	3	3.75
7	Jumlah pegawai menurut kelompok jabatan	13	16.25
	Eselon III	1	1.25
	Eselon IV	4	5.00
	Staf Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	6	7.50
	Staf Jabatan Fungsional umum (JFU)	2	2.50

Sumber : Data Kepegawaian Satker BPJN Jayapura, 2021

3.2 SARANA DAN PRASARANA

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, sangat dibutuhkan setiap organisasi dalam menyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai

tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya sarana dan prasarana, mustahil tujuan akan dicapai. Satuan Kerja BPJN Jayapura membagi sarana prasarana menjadi 7 golongan dengan informasi yang diperoleh dari Laporan BMN Semester II Tahun 2021, sebagai berikut :

Tabel III.2 Rekapitulasi Jenis Sarana dan Prasarana pada Satuan Kerja BPJN Jayapura

NO	JENIS BMN	KODE BARANG	MUTASI BMN				SALDO PER 31 Desember 2021 (SMT II TA 2021)	
			BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI		
1	TANAH	131111	-	-	-	-	40,000	152,560,894,232
2	PERALATAN DAN MESIN	132111	84	1,600,509,400	1	1,507,830,000	1,988	30,771,928,680
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	133111	-	-	-	-	52	39,152,363,210
4	JALAN DAN JEMBATAN	134111	-	-	-	-	1	317,281,000
5	IRIGASI	134112	-	-	-	-	2	466,565,000
6	ASET TETAP DALAM RENOVASI	135111	6	41,820,224,831	6	41,820,224,831	6	41,820,224,831
7	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN	166112	-	-	-	-	268	25,683,806,270
TOTAL :			90	43,420,734,231	7	43,328,054,831	42,317	290,773,063,223

Sumber : Laporan Gabungan BMN Semester II T.A. 2021

Tabel III.3 Laporan Kondisi Barang pada Satuan Kerja BPJN Jayapura

No	Sub-sub Kelompok		Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	98.890.500.235	39.999	0	0
2	3.01.01.01.001	Crawler Tractor + Attachment	Unit	8.313.373.826	0	0	35
3	3.01.01.01.003	Swamp Tractor + Attachment	Unit	75.000.000	0	0	5
4	3.01.01.03.001	Crawler Excavator + Attachment	Unit	4.390.350.000	2	0	8
5	3.01.01.05.003	Dump Truck	Unit	1.195.238.360	4	0	5
6	3.01.01.06.001	Asphalt Mixing Plant	Unit	700.350.000	0	0	3
7	3.01.01.06.003	Asphalt Distributor	Unit	47.499.660	0	0	7
8	3.01.01.06.007	Asbuton Dryer	Unit	246.809.612	0	0	8
9	3.01.01.07.001	Macadam Roller/three Wheel Roller	Unit	610.450.000	0	0	11
10	3.01.01.07.002	Tandem Roller	Unit	89.000.000	0	0	1
11	3.01.01.07.004	Vibration Roller	Unit	2.837.652.735	9	0	10
12	3.01.01.07.005	Tyre Roller	Unit	4.693.529.000			5
13	3.01.01.07.006	Soil Stabilizer	Unit	16.234.800			1

No	Sub-sub Kelompok		Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
14	3.01.01.07.008	Stamper	Unit	819.600			2
15	3.01.01.07.009	Vibration Plate	Unit	27.500.000	2		
16	3.01.01.08.003	Stone Chuser	Unit	197.971.000			2
17	3.01.01.08.005	Batching Plant	Unit	8.703.900			2
18	3.01.01.08.010	Concrete Cutter	Unit	114.470.631	1		
19	3.01.01.08.011	Concrete Mixer	Unit	13.676.300	1		
20	3.01.01.08.014	Aggregate/chip Spreader	Unit	10.297.800			5
21	3.01.01.08.020	Pan Mixer	Unit	122.760.000			8
22	3.01.01.08.022	Paddle Mixer	Unit	498.000.000			8
23	3.01.01.08.023	Asphalt Buton Crusher	Unit	186.200.000			12
24	3.01.01.09.001	Track Loader + Attachment	Unit	1.394.512.215			5
25	3.01.01.09.002	Wheel Loader + Attachment	Unit	3.145.328.800			18
26	3.01.03.02.002	Belt Conveyor (feeder)	Unit	140.832.640			30
27	3.01.03.03.001	Transportable Compressor	Unit	3.354.402			3
28	3.01.03.04.003	Stationary Generating Set	Unit	148.540.000			6
29	3.01.03.05.002	Portable Water Pump	Unit	1.817.165			4
30	3.01.03.06.003	Mesin Bor Beton	Unit	8.413.500			13
31	3.02.01.01.002	Jeep	Unit	114.390.000	1		3
32	3.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	1.741.700.000	7		
33	3.02.01.03.002	Pick Up	Unit	689.408.000	2		11
34	3.02.01.03.004	Semi Trailer	Unit	18.692.400			1
35	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	Unit	37.940.000	3		5
36	3.03.01.01.036	Mesin Briket	Buah	121.864.056	16		
37	3.03.02.07.008	Palu	Buah	2.895.460	2		
38	3.03.03.01.072	Global Positioning System	Buah	37.950.000	5		
39	3.03.03.01.141	Distance Meter	Unit	64.262.795	3		
40	3.03.03.07.010	Scanner (universal Tester)	Buah	2.243.400	1		
41	3.03.03.08.039	Desimeter (Hidrometer)	Buah	109.833.000	2		
42	3.03.03.09.999	Alat Ukur Lainnya	Buah	1.014.403	1		
43	3.03.03.10.999	Alat Timbangan/biara Lainnya	Buah	227.568.188	3		

No	Sub-sub Kelompok		Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
44	3.03.03.15.015	Vernier Caliper	Buah	56.134.630	11		
45	3.03.03.16.999	Specific Set Lainnya	Buah	76.255.300	10		
46	3.04.01.03.006	Alat Pengukur Kadar Air (moisture Tester)	Buah	61.673.700	1		
47	3.04.01.04.004	Lemari Penyimpan	Buah	104.907.000	37		
48	3.04.01.05.006	Alat Pengambil Sample Tanah	Buah	691.229.000	20		
49	3.05.01.01.999	Mesin Ketik Lainnya	Buah	1.430.000	1		
50	3.05.01.03.007	Mesin Fotocopy Folio	Buah	86.159.000	1		
51	3.05.01.04.001	Lemari Besi/metal	Buah	14.648.289	1		
52	3.05.01.04.002	Lemari Kayu	Buah	67.334.850	26		
53	3.05.01.05.013	Copy Board/elektrik White Board	Buah	57.200.000	2		
54	3.05.01.05.015	Alat Penghancur Kertas	Buah	20.520.000	7		
55	3.05.01.05.024	Alat Pemotong Kertas	Buah	6.905.800	1		
56	3.05.01.05.037	White Board Electronic	Buah	30.800.000	1		
57	3.05.01.05.044	Mesin Laminating	Buah	2.333.800	1		
58	3.05.01.05.048	Lcd Projector/infocus	Buah	47.186.300	5		
59	3.05.01.05.058	Focusing Screen/layar Lcd Projector	Buah	11.025.800	3		
60	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	Buah	52.889.637	29		
61	3.05.02.01.003	Kursi Besi/metal	Buah	323.118.874	642		
62	3.05.02.01.004	Kursi Kayu	Buah	13.860.000	3		
63	3.05.02.01.008	Meja Rapat	Buah	60.104.000	29		
64	3.05.02.01.014	Meja Resepsionis	Buah	30.813.981	1		
65	3.05.02.03.003	Mesin Pemotong Rumput	Buah	20.570.000	6		
66	3.05.02.04.004	A.c. Split	Buah	183.161.000	30		
67	3.05.02.06.007	Loudspeaker	Buah	12.738.000	5		
68	3.05.02.06.008	Sound System	Buah	25.905.000	1		
69	3.05.02.06.012	Wireless	Buah	3.245.000	1		
70	3.05.02.06.015	Microphone Table Stand	Buah	1.650.000	1		
71	3.05.02.06.046	Handy Cam	Buah	45.012.000	6		
72	3.05.02.06.059	Kabel Roll	Buah	1.332.936	8		
73	3.06.01.01.007	Audio Video Selector (peralatan	Buah	2.232.780	1		

No	Sub-sub Kelompok		Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
		Studio Audio)					
74	3.06.01.01.036	Microphone/wireless Mic	Buah	17.594.500	4		
75	3.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (ups)	Buah	23.285.000	17		
76	3.06.01.01.051	Automatic Voltage Regulator (avr)	Buah	649.000	1		
77	3.06.01.01.056	Battery Charger (peralatan Studio Audio)	Buah	5.940.000	10		
78	3.06.01.01.079	Microphone Cable	Buah	880.000	1		
79	3.06.01.02.003	Camera Electronic	Buah	16.740.240	1		
80	3.06.01.02.015	Video Mixer	Buah	8.580.000	1		
81	3.06.01.02.038	Power Supply (peralatan Studio Video Dan Film)	Buah	5.576.340	1		
82	3.06.01.02.044	Digital Video Effect	Buah	4.701.180	1		
83	3.06.01.02.055	Lighting Stand Tripod	Buah	880.000	1		
84	3.06.01.02.057	Slide Projector	Buah	51.700.000	1		
85	3.06.01.02.128	Camera Digital	Buah	33.792.000	9		
86	3.06.01.04.014	Mesin Jilid	Buah	7.480.000	2		
87	3.06.01.04.022	Mesin Pres	Buah	229.768.000	1		
88	3.06.01.05.023	Kompas Geologi	Buah	9.229.194	1		
89	3.06.01.05.024	Clinometer	Buah	12.210.000	3		
90	3.06.01.05.025	Altimeter (peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	Buah	13.200.000	3		
91	3.06.01.05.039	Ground Penetrating Radar	Buah	3.003.000	1		
92	3.06.02.01.001	Telephone (pabx)	Buah	6.687.120	7		
93	3.06.02.01.999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	Buah	1.705.000	1		
94	3.06.02.02.002	Unit Transceiver Ssb Transportable	Buah	1.497.000			3
95	3.06.02.06.002	Wireless Amplifier	Buah	6.844.200	1		
96	3.06.02.08.999	Alat Komunikasi Khusus Lainnya	Buah	7.656.000	1		
97	3.06.02.09.999	Alat Komunikasi Digital Dan Konvensional Lainnya	Buah	236.875.000	1		
98	3.07.01.01.127	Kursi Dorong	Buah	38.040.000	16		
99	3.07.01.02.010	Infra Red	Buah	6.375.385	1		

No	Sub-sub Kelompok		Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
100	3.07.01.07.049	Alloca Camera Multioristhal Swaner With Digital Concane Venteven	Buah	18.315.000	5		
101	3.07.01.08.004	Solution Administration Set	Buah	528.940	2		
102	3.07.01.12.032	Parafin Bath	Buah	571.750	5		
103	3.07.01.19.013	Glove Box (alat Kedokteran Nuklir)	Buah	224.400	1		
104	3.08.01.01.009	Timbangan Elektronik	Buah	261.294.373	5		
105	3.08.01.05.020	Elektrik Compression Tester	Buah	316.401.901	1		
106	3.08.01.06.012	Test Press/strenght Test	Buah	212.846.220	1		1
107	3.08.01.06.017	Hardness Test Machine	Buah	62.312.641	1		
108	3.08.01.06.027	Compaction	Buah	219.487.590	4		
109	3.08.01.06.042	Vibrating Unit	Buah	140.934.271	1		
110	3.08.01.06.047	Alat Pemeriksa Semen	Buah	8.000.000	2		
111	3.08.01.06.058	Alat Pemeriksa Beton	Buah	1.940.924.371	56		
112	3.08.01.06.059	Slump Test Set	Buah	9.229.450	2		
113	3.08.01.06.063	Basic Cylinder Capping Set	Buah	94.712.773	3		
114	3.08.01.06.092	Organic Impuriestest Set	Buah	31.008.616	2		
115	3.08.01.07.023	Sand Equivalent	Buah	84.716.928	4		
116	3.08.01.07.029	Cbr Lab. Set Cl.284	Buah	104.705.600	2		
117	3.08.01.07.999	Alat Laboratorium Aspal,cat Dan Kimia Lainnya	Buah	1.078.195.076	267		
118	3.08.01.08.009	Triaxal Cbr	Buah	250.404.504	1		
119	3.08.01.08.024	Liquid Limit	Buah	27.637.277	4		
120	3.08.01.08.034	Modified Field Compaction Mold	Buah	15.843.520	4		
121	3.08.01.08.044	Lightweight Concrete Test Hammer	Buah	66.649.200	2		
122	3.08.01.08.049	Penetrasi Asphalt (universal Penetrometer)	Buah	11.666.561	1		
123	3.08.01.08.053	Vicat Apparatus	Buah	2.564.306	1		
124	3.08.01.08.999	Alat Laboratorium Mekanika Tanah Dan Batuan Lainnya	Buah	2.003.963.148	19		
125	3.08.01.10.114	Drying Oven	Buah	194.887.275	1		
126	3.08.01.11.002	Water Bath (alat Laboratorium Umum)	Buah	79.190.350	2		

No	Sub-sub Kelompok		Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
127	3.08.01.11.131	Filter Press	Buah	2.487.530	15		
128	3.08.01.11.137	Tripod	Buah	330.000	1		
129	3.08.01.11.156	Mesin Pengayak	Buah	42.245.500	1		
130	3.08.01.11.165	Core Bit	Buah	13.810.190	1		
131	3.08.01.11.215	Liquid Extractor	Buah	11.878.630	1		
132	3.08.01.11.999	Alat Laboratorium Umum	Buah	363.441.200	9		
133	3.08.01.12.025	Stabilizer	Buah	56.584.835	8		
134	3.08.01.13.034	Hot Plate (alat Laboratorium Kimia)	Buah	32.560.000	2		
135	3.08.01.15.042	Stand, Diluter/pipet	Buah	2.805.000	2		
136	3.08.01.19.005	Mortars & Pastle	Buah	105.790	1		
137	3.08.01.24.012	Rammer	Buah	34.100.000	1		
138	3.08.01.25.999	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan Lainnya	Buah	22.598.712	12		
139	3.08.01.30.004	Boring & Milling Machine	Buah	552.982.320	1		
140	3.08.01.33.010	Exhaust Fan (alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas)	Buah	3.080.000	4		
141	3.08.01.38.029	Deal Tickness Gauge	Buah	1.141.203	1		
142	3.08.01.39.018	Alat Uji Analisa Butiran Bahan (laboratory Testing Screen)	Buah	62.186.632	1		
143	3.08.01.41.005	Alat Pemadam Kebakaran	Buah	43.890.000	14		
144	3.08.01.41.070	Drying Test	Buah	12.036.420	2		
145	3.08.01.41.104	Grader	Buah	5.314.213.245	2		22
146	3.08.01.41.174	Moisture Tester (alat Laboratorium Pertanian)	Buah	7.764.800	2		
147	3.08.01.41.251	Stabilizer/ups	Buah	33.835.200	29		
148	3.08.01.41.319	Waterbath (shake,still)	Buah	83.762.800	1		
149	3.08.01.42.001	Alat Ukur	Buah	162.800.000	4		
150	3.08.01.45.023	Kompas (alat Laboratorium Oceanografi)	Buah	14.190.000	3		
151	3.08.01.49.013	Moisture Content Tester	Buah	29.197.480	2		
152	3.08.01.50.008	Speciment Mount Press	Buah	4.683.360	1		
153	3.08.01.51.024	Wash Bak	Buah	49.500.000	5		

No	Sub-sub Kelompok		Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
154	3.08.01.56.081	Meja Kerja (alat Laboratorium Lainnya)	Buah	67.822.150	36		
155	3.08.01.56.083	Thermometer Digital (alat Laboratorium Lainnya)	Buah	7.382.980	1		
156	3.08.01.56.999	Lainnya (alat Laboratorium Lainnya)	Buah	8.800.000	2		
157	3.08.01.60.005	Cetak Kubus Beton	Buah	27.527.676	42		
158	3.08.01.60.007	Saringan Besi	Buah	39.050.000	1		
159	3.08.01.99.999	Unit Alat Laboratorium Lainnya	Buah	1.743.705.180	14		2
160	3.08.02.02.007	Bimetal Thermometer	Buah	2.301.300	2		
161	3.08.02.02.031	Specific Gravimeter	Buah	26.805.540	2		
162	3.08.02.02.036	Viscometer Viscosimeter	Buah	44.495.842	1		
163	3.08.02.02.037	Kinematic Viscosety Bath	Buah	226.310.476	1		
164	3.08.02.02.056	Flash Point Tester	Buah	66.516.280	5		
165	3.08.02.03.098	Laboratory /service Wagon/cart	Buah	95.465.680	2		
166	3.08.03.05.001	Generator Set(lab Scale)	Buah	97.350.000	1		
167	3.08.03.05.002	Uninterrupted Power Supply (ups)	Buah	1.507.000	1		
168	3.08.06.04.002	Sieve Shaker (laboratorium Lingkungan)	Buah	8.514.840	1		
169	3.08.06.05.999	Alat Laboratorium Penunjang Lainnya	Buah	16.442.100	2		
170	3.08.07.02.007	Universal Primary Calibrator/weights	Buah	172.080	2		
171	3.08.07.14.007	Wireless Data Tranmission System	Buah	4.543.000	7		
172	3.08.08.09.013	Viscosity Test Set	Buah	553.068.110	1		
173	3.08.08.10.999	Alat Laboratorium Uji Perangkat Lainnya	Buah	252.064.566	2		
174	3.09.02.01.011	Target Drone (simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	Buah	64.096.032	2		
175	3.09.02.01.049	Diamond Bit Dio 4	Buah	26.628.088	2		
176	3.09.04.02.031	Kamera Digital	Buah	15.278.800	2		
177	3.09.04.09.067	Ultrasonic Thickness Gauge	Buah	32.310.258	2		
178	3.09.04.09.089	Magnifier	Buah	911.610	1		
179	3.09.04.09.123	Automatic Cleveland Open Cup	Buah	340.070.824	1		

No	Sub-sub Kelompok		Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
		Flash					
180	3.09.04.09.172	Mesin Uji Tarik	Buah	509.264.383	1		
181	3.10.01.02.001	P.c Unit	Buah	468.778.915	38		
182	3.10.01.02.002	Lap Top	Buah	553.231.000	31		
183	3.10.01.02.003	Note Book	Buah	298.387.000	16		
184	3.10.01.02.009	Tablet Pc	Buah	18.562.500	15		
185	3.10.02.03.003	Printer (peralatan Personal Komputer)	Buah	414.922.898	71		
186	3.10.02.04.002	Router	Buah	2.508.000	1		
187	3.11.01.02.012	Fieldmeter	Buah	27.986.780	2		
188	3.11.01.02.017	Penetrometer (ukur/instrument)	Buah	86.344.720	1		
189	3.13.03.01.009	Air Dryer	Buah	14.865.488	2		
190	3.15.04.05.001	Genset	Buah	693.385.000	2		
191	3.17.01.01.007	Centrifuge Extractor	Buah	13.884.646	1		
192	3.18.02.06.002	Sodium High Pressure Flood Light	Unit	102.770	20		
193	4.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	11.020.571.900	6		
194	4.01.01.01.999	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	Unit	3.463.557.001	2		
195	4.01.01.02.001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Unit	192.875.210	1		
196	4.01.01.05.001	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	Unit	58.935.000	1		
197	4.01.01.11.001	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	Unit	1.723.907.000	1		
198	4.01.01.13.001	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	170.314.000	1		
199	4.01.01.32.001	Bangunan Tempat Parkir	Unit	11.927.000	1		
200	4.01.02.01.004	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	Unit	954.149.001	1		
201	4.01.02.01.007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Unit	1.810.219.002	2		
202	4.01.02.02.011	Rumah Negara Golongan li Tipe D Semi Permanen	Unit	7.951.154.023	23		
203	4.01.02.02.014	Rumah Negara Golongan li Tipe E Semi Permanen	Unit	3.600.347.009	9		

No	Sub-sub Kelompok		Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
204	4.01.02.04.001	Mess/wisma/bungalow/tempat Peristirahatan Permanen	Unit	1.042.611.000	1		
205	4.04.01.04.001	Pagar Permanen	Unit	3.004.921.002	3		
206	5.01.01.09.002	Jalan Khusus Kompleks	M2	424.534.001	1		
207	5.02.04.05.007	Bangunan Penguat Tebing/pantai	Unit	676.254.228	2		
208	6.07.05.01.001	Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi		41.820.224.831	6		
209	8.01.01.01.007	Hasil Kajian/penelitian		2.972.759.099	2		

3.3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

3.3.1 Perubahan Anggaran

Pada bulan November 2021 Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Revisi yang selanjutnya ditetapkan menjadi DIPA awal Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Tahun Anggaran 2021. Pada pelaksanaan kegiatan di sepanjang Tahun Anggaran 2021 terdapat perubahan DIPA sebagai berikut :

Jumlah Anggaran Kegiatan Awal Tahun 2021 (PK Revisi) : Rp. 42.578.064.000,-
Jumlah Anggaran Revisi Tahun 2021 : Rp. 42.578.064.000,-

Tidak terdapat perubahan anggaran yang dikelola oleh Satker BPJN Jayapura berdasarkan data Perjanjian Kinerja Revisi 4 November 2021 dengan Revisi DIPA terakhir yang terjadi di 15 November 2021. Kronologis perubahan DIPA di lingkungan Satker BPJN Jayapura yang terjadi di sepanjang Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel. III.4 Kronologis Revisi DIPA pada Satker BPJN Jayapura TA. 2021

NO	NOMOR DIPA	TANGGAL PENGESAHAN	NO. DS	KEWENANGAN REVISI	NILAI DIPA		ALASAN PERUBAHAN	KETERANGAN
					SEBELUM REVISI	SESUDAH REVISI		
SATUAN KERJA BPJN JAYAPURA								
1	DIPA AWAL SP DIPA- 033.04.1.448013/2 021	23-Nov-20	9971-9407- 9352-2236	-	73.505.632.000	-	-	DIPA AWAL

NO	NOMOR DIPA	TANGGAL PENGESAHAN	NO. DS	KEWENANGAN REVISI	NILAI DIPA		ALASAN PERUBAHAN	KETERANGAN
					SEBELUM REVISI	SESUDAH REVISI		
2	DIPA REVISI 01 SP DIPA- 033.04.1.448013/2 021	17-Feb-21	0790-1807- 4428-1098	Direktorat Jenderal Anggaran	73.505.632.000	46.255.255.000	Pemisahan DIPA dengan Satker BPJN Wamena dan penghematan belanja SPPD	DIPA BERKURANG
3	DIPA REVISI 02 SP DIPA- 033.04.1.448013/2 021	30-Jun-21	0524-7442- 9553-2236	Direktorat Jenderal Anggaran	46.255.255.000	45.345.956.000	Revisi penghematan belanja pegawai	DIPA BERKURANG
4	DIPA REVISI 03 SP DIPA- 033.04.1.448013/2 021	22-Jul-21	2673-0673- 3201-6511	Direktorat Jenderal Anggaran	45.345.956.000	45.787.856.000	Revisi pada honor non PNS substantif (tambahan gaji ke-13)	DIPA BERTAMBAH
5	DIPA REVISI 04 SP DIPA- 033.04.1.448013/2 021	27-Aug-21	4526-7000- 4115-0506	Direktorat Jenderal Anggaran	45.787.856.000	44.242.809.000	Revisi DIPA dalam rangka <i>refocussing</i> tahap IV. Terdapat pergeseran anggaran untuk penambahan biaya kebutuhan covid yang diambil dari belanja sewa mobil	DIPA BERKURANG
6	DIPA REVISI 05 SP DIPA- 033.04.1.448013/2 021	04-Nov-21	6285-9338- 0918-4683	Direktorat Jenderal Anggaran	44.242.809.000	42.578.064.000	Penghapusan pemanfaatan PNPB dan pergeseran dalam satu KRO/RO	DIPA BERKURANG
7	DIPA REVISI 06 SP DIPA- 033.04.1.448013/2 021	15-Nov-21	6285-9338- 0918-4683	Kanwil	42.578.064.000	42.578.064.000	Pergeseran Anggaran dalam hal pagu tetap dalam satu KRO/RO pada satu komponen	DIPA TETAP

Sumber : Data dan Informasi Satker BPJN Jayapura, 2021

Di bulan Februari yang lalu terdapat revisi POK-1 dan revisi DIPA pada Satker BPJN Jayapura. Pada revisi DIPA-1 terdapat Pemisahan DIPA dengan Satker BPJN Wamena dan penghematan belanja SPPD. Perubahan ini menyebabkan perubahan nilai DIPA Satker BPJN Jayapura dari semula Rp. 73.505.632.000,- menjadi Rp. 46.255.255.000,- atau berkurang sebesar Rp. 27.250.377.000,-. Di bulan Juni terjadi Revisi DIPA-2 yang disebabkan oleh revisi penghematan belanja pegawai, perubahan ini mengubah nilai DIPA Satker BPJN Jayapura yang semula Rp. 46.255.255.000,- berubah menjadi Rp. 45.345.956.000,-. Kemudian di Bulan Juli terjadi Revisi DIPA-3 dimana terjadi revisi pada honor non PNS substantif (tambahan gaji ke-13). Hal tersebut

membuat nilai DIPA mengalami penambahan sebesar Rp. 441.900.000,- sehingga nilai DIPA berubah dari Rp. 45.345.956.000,- menjadi Rp. 45.787.865.000,-.

Di bulan Agustus terjadi Revisi DIPA ke-4 dengan revisi DIPA dalam rangka *refocussing* tahap IV dan terdapat pergeseran anggaran untuk penambahan biaya kebutuhan covid yang diambil dari belanja sewa mobil. Perubahan ini menyebabkan perubahan nilai DIPA Satker BPJN Jayapura dari Rp. 45.787.865.000,- berkurang menjadi Rp. 44.242.809.000,-. Pada bulan September dan Oktober, tidak terdapat revisi DIPA di lingkungan Satker BPJN Jayapura. Pada bulan November terdapat dua kali perubahan DIPA, yang pertama terjadi pada tanggal 4 November 2021 terdapat Revisi DIPA ke-5 dengan alasan Penghapusan pemanfaatan PNBP dan pergeseran dalam satu KRO/RO sehingga DIPA Satker Balai berkurang dari semula Rp. 44.242.809.000,- menjadi Rp. 42.578.064.000,-. Kedua pada tanggal 15 November 2021 terdapat revisi DIPA ke-6 karena terdapat pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap dalam satu KRO/RO pada satu komponen. Perubahan DIPA ke-6 tidak mengalami perubahan dalam nilai DIPA. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan pada total alokasi DIPA keseluruhan di lingkungan Satker BPJN Jayapura antara lain sebagai berikut :

1. Pemisahan DIPA dengan Satker BPJN Wamena dan penghematan belanja SPPD;
2. Revisi penghematan belanja pegawai;
3. Revisi pada honor non PNS substantif (tambahan gaji ke-13);
4. Revisi DIPA dalam rangka *refocussing* tahap IV.
5. Terdapat pergeseran anggaran untuk penambahan biaya kebutuhan penanganan penyebaran COVID-19 yang diambil dari belanja sewa mobil;
6. Penghapusan pemanfaatan PNBP dan pergeseran dalam satu KRO/RO.

Lembar Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja 2021 Awal dan Revisi Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura yang sudah ditandatangani oleh Kepala Balai dan Direktur Jenderal Bina Marga Tahun 2021 dapat dilihat pada Lampiran dokumen LKIP ini.



BAB IV

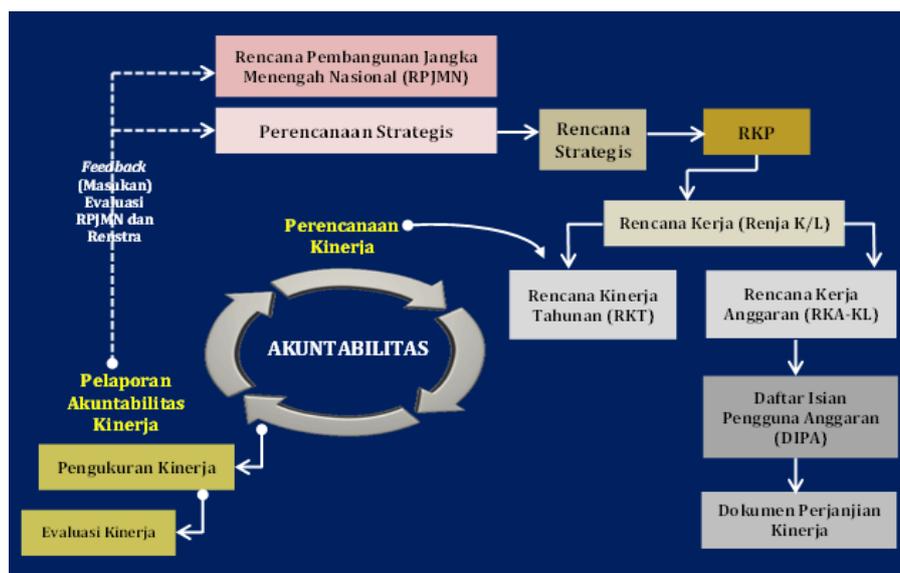
Akuntabilitas Kinerja

BAB IV. AKUNTABILITAS KINERJA

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku entitas Kementerian juga menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara selaras dan sesuai dengan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Hal ini ditegaskan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai panduan bagi setiap entitas dalam penyelenggaraan SAKIP untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil. Adapun ruang lingkup SAKIP dalam Peraturan Menteri ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan SAKIP;
- b. Rencana Strategis;
- c. Perjanjian Kinerja;
- d. Pengukuran Kinerja;
- e. Pengelolaan Data Kinerja;
- f. Pelaporan Kinerja; dan
- g. Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Laporan Kinerja Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura adalah perwujudan kewajiban dari instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan, kegagalan, pelaksanaan kebijakan dan program organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik yaitu dilakukan pertahun kegiatan. Siklus Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat pada **Gambar 4.1** berikut ini:



Gambar 4.1. Sistem Akuntabilitas Kinerja

4.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura tahun 2021 mempunyai 5 (lima) indikator kinerja kegiatan (output) yang nilai capaiannya harus diukur setiap tahunnya. Pengukuran kinerja dilakukan sesuai tabel kriteria yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kategori warna disesuaikan dengan angka pencapaian yang kemudian diisikan ke dalam kolom evaluasi sehingga dapat diketahui keberhasilan/ kegagalan indikator kinerja selama periode yang dilaporkan.

Tabel IV.1 Tabel Kriteria Penilaian

NO	NILAI ANGKA	INTERPRETASI	KATEGORI WARNA
1	>90% - 100%	Sangat Memuaskan	
2	>80% - 90%	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel	
3	>70% dan - 80%	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal	
4	>60% - 70%	Baik , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan	
5	>50% - 60%	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban perlu banyak perbaikan tidak mendasar	

NO	NILAI ANGKA	INTERPRETASI	KATEGORI WARNA
6	>30% - 50%	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar	
7	0% - 30%	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.	

Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015

Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (Revisi) Tahun Anggaran 2021 Satker BPJN Jayapura telah mengacu pada ketentuan Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program yang terdapat dalam Renstra Ditjen Bina Marga 2020 – 2024. Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, terdapat perubahan pada Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program yang digunakan. Sesuai dengan Renstra Ditjen Bina Marga 2020 – 2024, untuk mendukung capaian program Infrastruktur Konektivitas dan Dukungan Manajemen, maka ditentukan sasaran strategis antara lain “Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional” dan “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya”. Sehubungan dengan upaya mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, terdapat 2 (dua) Program yang harus dipenuhi oleh Ditjen Bina Marga hingga akhir tahun 2024 yaitu Infrastruktur Konektivitas dan Dukungan Manajemen. Adapun kedua program tersebut masing-masing memiliki Sasaran Program sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut :

- g. *Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional* (persentase pusat kegiatan dan simpul strategis nasional yang diakses jalan nasional);
- h. *Rating Kondisi Jalan Nasional* (Nilai gabungan antara nilai IRI, PCI, umur struktur jalan, dan drainase jalan pada seluruh ruas jalan nasional);
- i. *Rating keselamatan Jalan Nasional* (Nilai gabungan antara angka kecelakaan per populasi dan jumlah titik blackspot per populasi).

2. Meningkatnya dukungan manajemen birokrasi yang professional, tepat, cepat, dan akuntabel

Dengan Indikator Kinerja Program yang berupa *Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR*.

Adapun masing-masing indikator kinerja program tersebut diukur tingkat capaiannya di tahun 2021 dan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan di tahun 2021 Dokumen Perencanaan Lainnya Satker BPJN Jayapura tahun 2020-2024. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program T.A. 2020 Satker BPJN

Jayapura tahun 2021 mengacu pada angka hasil capaian entitas di atasnya dalam hal ini BPJN Jayapura, antara lain sebagai berikut :

1. *Rating Kondisi Jalan Nasional* (Nilai gabungan antara nilai IRI, PCI, umur struktur jalan, dan drainase jalan pada seluruh ruas jalan nasional)

IKP Rating Kondisi Jalan didefinisikan sebagai nilai rata-rata terbobot dari empat komponen yaitu:

- Kekasaran / *Roughness* (nilai international roughness index, IRI)
- Kondisi Permukaan Perkerasan / *Pavement Surface Condition* (PCI)
- Sisa Umur Perkerasan / *Remaining Useful Life* (Pavement Strength)
- Efektivitas Drainase / *Drainage Effectiveness* (Surface Drainage and Subsoil Drainage)

Sistem penilaian IKP Rating Kondisi Jalan menggunakan skala 1 sampai 5. Dari hasil perhitungan empat komponen di atas dan memperhatikan pembobotan sebagai berikut :

Komponen KPI Individu	Faktor Pembobot
Kekasaran (IRI)	60%
Kondisi Permukaan Perkerasan (PCI)	10%
Sisa Umur Perkerasan (RSL)	15%
Efektivitas Drainase	15%

Maka didapat nilai Rating Kondisi Jalan Nasional wilayah penanganan BPJN Jayapura :

Baseline 2020 : 2,67 dengan nilai Kemantapan 88,21% (**menggunakan perhitungan dengan aplikasi IRMS V.03*)

Target 2021 : 2,84 (*Sumber : Hasil perhitungan dengan aplikasi IRMS V.03*)

Capaian 2021 : 2,89 (**menggunakan perhitungan dengan aplikasi IRMS V.03*) dengan nilai Kemantapan 88,21%

2. *Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR*

Baseline 2020 : 55,92% (*Sumber : Data Matriks KSJJ*)

Target 2021 : 63,35% (*Sumber : Data Matriks KSJJ*)

Capaian 2021 : 63,35% (*Sumber : Data Matriks KSJJ*)

Sehingga Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program Satker BPJN Jayapura TA. 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program Satker BPJN Jayapura TA. 2021

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	SAT	BASELINE 2020*	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	Rating Kondisi Jalan Nasional		2.67	2.84	2.89	98.27	Realisasi didapat menggunakan perhitungan dengan aplikasi IRMS V.03
2	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	%	55.92	63.35	63.35	100.0	untuk nilai IKSP Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR mengacu ke nilai IKU yang diperoleh dari Matriks KSJJ dengan capaian tahunan 100%

Sumber : Perhitungan dengan aplikasi IRMS V.03 dan acuan Data Kaki Matriks KSJJ

Untuk mendukung program penyelenggaraan jalan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, terdapat dukungan dari output-output yang masing-masing memiliki target yang telah ditentukan di dokumen Perjanjian Kinerja Satker BPJN Jayapura Tahun Anggaran 2021. Adapun capaian kinerja untuk output-output yang mendukung capaian Rating Kondisi Jalan Nasional dan Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR yang ditangani oleh Satker BPJN Jayapura adalah sebagai berikut :

Tabel IV.3 Capaian Kinerja Output Pendukung Rating Kondisi Jalan Nasional dan Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR Satker BPJN Jayapura Tahun 2021

NO	OUTPUT	SAT	TARGET		REALISASI	CAPAIAN(%)		KETERANGAN
			PK AWAL	PK REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
IKP 1 : Rating Kondisi Jalan Nasional								
1	Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	Dokumen	1	1	1	100.00	100.00	
IKP 2 : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR								
2	Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	1	100.00	100.00	
3	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	89.37	89.37	
4	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	99.66	99.66	
CAPAIAN KINERJA RATA-RATA PEROUTPUT						97.26	97.26	

Berdasarkan Tabel IV.3 di atas, diketahui **rata-rata capaian kinerja untuk seluruh output** yang mendukung capaian Rating Kondisi Jalan Nasional dan Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR di **Satker BPJN Jayapura Tahun Anggaran 2021** adalah sebesar **97,26%** dan termasuk dalam kategori **capaian kinerja Sangat Memuaskan**. Pencapaian ini dihasilkan berdasarkan rata-rata realisasi kinerja yang berhasil dicapai sepanjang Tahun Anggaran 2021. Realisasi tiap bulannya disampaikan melalui penyusunan laporan monitoring dan evaluasi kinerja bulanan sebagai salah satu alat kontrol dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di sepanjang Tahun Anggaran 2021.

Analisis tentang pencapaian kinerja Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura secara keseluruhan diperlukan untuk dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas yang meliputi :

- Uraian keterkaitan pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan di dalam setiap program dan sasaran pada perjanjian kinerja tahun 2021 dengan tujuan dan sasaran tahunan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Lainnya Tahun 2020-2024;
- Kondisi pencapaian program dan sasaran sesuai dengan kebijakan dalam Dokumen Perencanaan Lainnya;
- Evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas kebijakan.

Penjabaran Analisis Kinerja Organisasi terhadap hasil pengukuran Sasaran Strategis, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, dan Indikator kinerja kegiatan, adalah sebagai berikut :

Sasaran Program Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional

I. IKSP Rating Kondisi Jalan Nasional

IKSP Rating Kondisi Jalan didefinisikan sebagai nilai rata-rata terbobot dari beberapa komponen individu yang sudah umum digunakan dalam menilai kondisi dari suatu segmen jalan, yaitu:

- Kekasaran / Roughness (nilai *international roughness index*, IRI)
- Kondisi Permukaan Perkerasan / *Pavement Surface Condition* (PCI)
- Sisa Umur Perkerasan / *Remaining Useful Life* (*Pavement Strength*)
- Efektivitas Drainase / *Drainage Effectiveness* (*Surface Drainage and Subsoil Drainage*)

Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat Rating Kondisi Jalan Nasional merupakan Indikator yang ditetapkan sesuai Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024, yang juga menjadi Indikator Kinerja Program Ditjen Bina Marga. Data berikut merupakan informasi alokasi dan realisasi anggaran pada Indikator Kinerja Sasaran Program Rating Kondisi Jalan Nasional di lingkungan BPJN Jayapura Tahun 2021 :

RATING KONDISI JALAN NASIONAL	
ANGGARAN AWAL (Dalam Ribuan Rp)	8,889,559
ANGGARAN REVISI (Dalam Ribuan Rp)	8,889,559
REALISASI (Dalam Ribuan Rp)	8,570,225
REALISASI THD AWAL (%)	96.41
REALISASI THD REVISI (%)	96.41

Target dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat Rating Kondisi Jalan Nasional Satker BPJN Jayapura menggunakan angka target dan capaian BPJN Jayapura Tahun 2021 sebagai berikut :

- **Target** IKSP Tingkat Rating Kondisi Jalan Nasional tahun 2021 : 2,84
- **Capaian** IKSP Tingkat Rating Kondisi Jalan Nasional untuk BPJN Jayapura : 2,89

Uraian pada Indikator Kinerja Kegiatan pada IKSP Rating Kondisi Jalan Nasional terdiri dari :

1) Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan

CBR 001 : Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan					
Volume (Dokumen)			Keuangan (Rp. *dalam ribu)		
Awal	Revisi	Akhir	Awal	Revisi	Akhir
1	1	1	8,889,559	8,889,559	8,570,225

Realisasi Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan sebesar **100%** yaitu dari 1 Dokumen yang ditargetkan, semuanya dapat terealisasi. Untuk anggaran yang tidak terserap 100% diakibatkan adanya situasi dan kondisi pandemi COVID-19 menyebabkan penyerapan alokasi anggaran untuk kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan jalan dan jembatan tahun ini tidak maksimal karena banyak kegiatan dilakukan secara daring/online.

Manfaat :

- Penyediaan dan peningkatan layanan pada Satker BPJN Jayapura yang berkualitas dan terukur, dan/ atau;
- Mendorong peningkatan PNBPN pada Satker BPJN Jayapura.

Permasalahan:

Adanya pandemi COVID-19 membuat beberapa paket/kegiatan pada output Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan tidak bisa berjalan secara maksimal dan beberapa alokasi anggaran untuk perjalanan dinas ataupun kegiatan monitoring dan evaluasi dan penyusunan laporan keuangan dan BMN tidak terserap karena kegiatan banyak dilakukan secara daring

Tindak Lanjut :

Beberapa paket/kegiatan yang tidak bisa diselenggarakan secara tatap muka karena pandemi COVID-19 dioptimalkan/diusahakan tetap berjalan dengan menggunakan perangkat elektronik dan dilakukan secara daring, beberapa bisa dilakukan secara tatap muka namun dengan aturan protokol kesehatan yang ketat.

Sasaran Program Meningkatnya Dukungan Manajemen Birokrasi yang profesional, Tepat, Cepat, dan Akuntabel

I. IKSP Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR

Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR ditetapkan mengacu kepada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024, yang juga menjadi Indikator Kinerja Program Ditjen Bina Marga. Data berikut merupakan informasi alokasi dan realisasi anggaran pada rincian output yang mendukung Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR di lingkungan BPJN Jayapura Tahun 2021 :

TINGKAT DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PUPR	
ANGGARAN AWAL (Dalam Ribuan Rp)	33,688,505
ANGGARAN REVISI (Dalam Ribuan Rp)	33,688,505
REALISASI (Dalam Ribuan Rp)	32,006,526
REALISASI THD AWAL (%)	95.01
REALISASI THD REVISI (%)	95.01

Target dan Capaian Kinerja Satker BPJN Jayapura menggunakan angka target dan capaian BPJN Jayapura Tahun 2021 sebagai berikut:

- **Target** Dukungan Manajemen Kementerian PUPR : 63,35
- **Capaian** Dukungan Manajemen Kementerian PUPR : 63,35

Uraian pada Indikator Kinerja Kegiatan pada IKSP 1 Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR terdiri dari :

1) Layanan Sarana Internal

EAD 002 : Layanan Sarana Internal					
Volume (Unit)			Keuangan (Rp. *dalam ribu)		
Awal	Revisi	Realisasi	Awal	Revisi	Realisasi
1	1	1	507,500	507,500	504,570

Realisasi Jumlah Layanan Sarana Internal sebesar **100%** yaitu dari 1 Unit yang ditargetkan, semuanya dapat terealisasi. Cakupan kegiatan Layanan Sarana Internal tahun 2021 berupa Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dan Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan pegawai di lingkungan BPJN Jayapura.

Manfaat :

Penyelenggaraan kegiatan penunjang kebutuhan sarana dan prasarana internal perkantoran dalam rangka peningkatan produktivitas kinerja pegawai.

Permasalahan :

Secara keseluruhan tidak ada kesulitan yang berarti dalam melaksanakan rincian output Layanan Sarana Internal di lingkungan BPJN Jayapura. Penyerapan tidak mencapai 100% dikarenakan pekerjaan pengadaan sudah tuntas dengan realisasi keuangan tersebut.

Tindak Lanjut:

-

2) Layanan Dukungan Manajemen Satker

EAC 004 : Layanan Dukungan Manajemen Satker					
Volume (Layanan)			Keuangan (Rp. *dalam ribu)		
Awal	Revisi	Akhir	Awal	Revisi	Akhir
1	1	1	6,517,908	6,517,908	5,742,810

Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker dari 1 Layanan yang direncanakan, terealisasi 1 Layanan namun dengan kualitas kinerja **89,37 %**.

Manfaat :

Penyelenggaraan kegiatan layanan dukungan manajemen Satker yang meliputi Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran, Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan, Pelayanan umum Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan, Penyusunan Laporan Keuangan BMN.

Permasalahan:

Realisasi kegiatan Penyusunan Program Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dan Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program serta kegiatan Pendampingan Teknis Preservasi Jalan dan Jembatan tahun 2021 terkendala adanya pandemi COVID-19 dan dalam rangka menjaga protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah sehingga beberapa mengalami penundaan atau pembatasan sampai dengan akhir tahun anggaran, koordinasi banyak dilakukan secara daring/*online* (via aplikasi zoom) sehingga alokasi anggaran banyak yang tidak terserap. Terdapat kegiatan kebutuhan pencegahan COVID-19 BPJN Jayapura yang penyerapannya belum optimal.

Tindak Lanjut:

- Beberapa paket/kegiatan yang tidak bisa diselenggarakan secara tatap muka karena pandemi COVID-19 dioptimalkan/diusahakan tetap berjalan dengan menggunakan perangkat elektronik dan dilakukan secara daring, beberapa bisa dilakukan secara tatap muka namun dengan aturan protokol kesehatan yang ketat;
- PPK mengatur strategi agar kedepannya pelaksanaan kegiatan dalam rangka Pencegahan COVID-19 di lingkungan BPJN Jayapura kedepannya bisa terserap secara optimal dan tepat sasaran.

3) Layanan Perkantoran

Jumlah Bulan Layanan Perkantoran					
Volume (Layanan)			Keuangan (Rp. *dalam ribu)		
Awal	Revisi	Akhir	Awal	Revisi	Akhir
1	1	1	26,663,097	26,663,097	25,759,146

Jumlah Bulan Layanan Perkantoran yaitu dari 12 Layanan yang direncanakan terealisasi 12 Layanan, namun dengan kualitas kinerja sebesar **99.66 %**.

Cakupan Layanan Perkantoran tahun anggaran 2021 adalah :

- Pembayaran Gaji dan tunjangan;
- Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan kantor.

Layanan Perkantoran ini dilaksanakan secara swakelola dengan jangka waktu pelaksanaan selama 12 bulan.

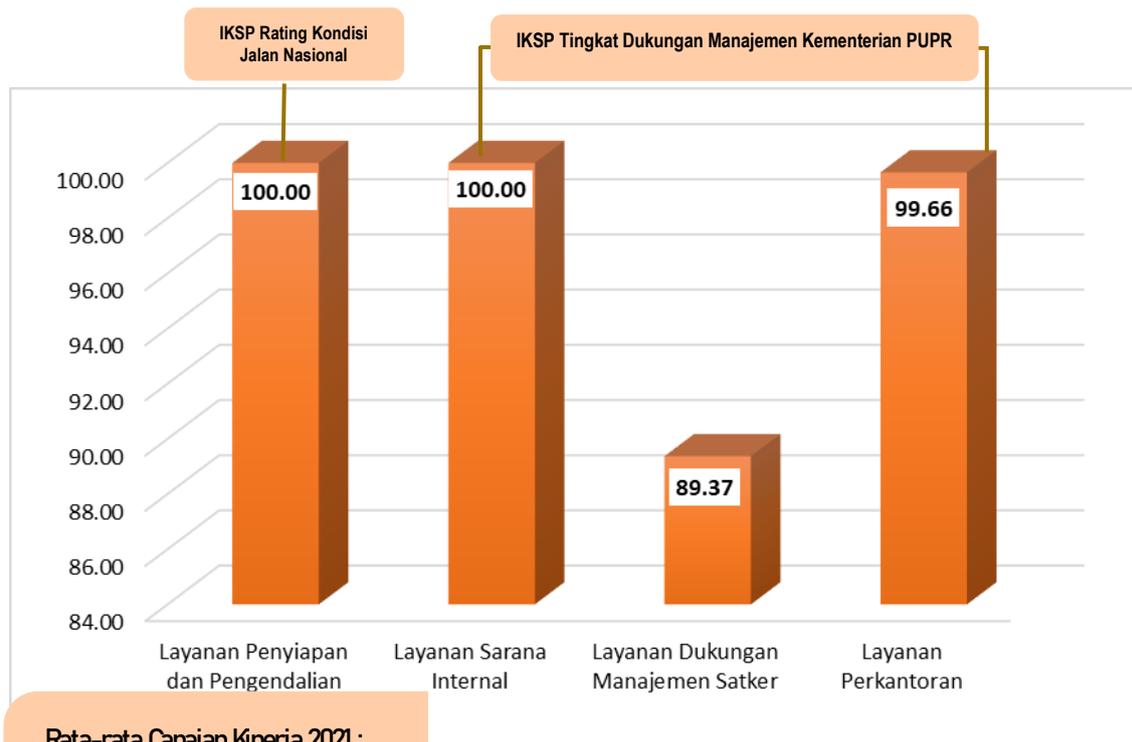
Permasalahan:

Beberapa kegiatan operasional perkantoran penyerapannya kurang optimal dikarenakan aktifitas perkantoran yang jauh berkurang karena banyak dilakukan secara daring, sempat diberlakukannya sistem bekerja secara *Work From Home* (WFH) juga berpengaruh pada menurunnya penggunaan listrik dan air dibanding realisasi tahun sebelumnya.

Tindak Lanjut :

- Mengikuti aturan protokol kesehatan dengan disiplin sesuai arahan pimpinan;
- Melakukan revisi dukman untuk memenuhi kebutuhan output lain yang membutuhkan penambahan dana.

Melalui pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program, Indikator Kinerja Kegiatan (*output*) dan Sasaran (capaian sasaran *outcome*) inilah keberhasilan suatu sasaran, program, dan kebijakan organisasi dapat terlihat. Berdasarkan pembahasan capaian kinerja per output di lingkungan Satker BPJN Jayapura Tahun 2021 di atas, dapat kita simpulkan bahwa **realisasi kinerja masing-masing output berdasarkan target revisi menunjukkan angka yang Sangat Memuaskan** dengan rata-rata capaian kinerja seluruh output pada akhir Tahun Anggaran 2021 di angka **97,26%** (*Data capaian rata-rata kinerja output di Catatan Kaki LKIP Satker BPJN Jayapura Tahun Anggaran 2021*). Adapun grafik capaian kinerja Satker BPJN Jayapura Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Rata-rata Capaian Kinerja 2021 :
97,26%

Gambar 4.4 Realisasi Kinerja Output Satker BPJN Jayapura T.A. 2021

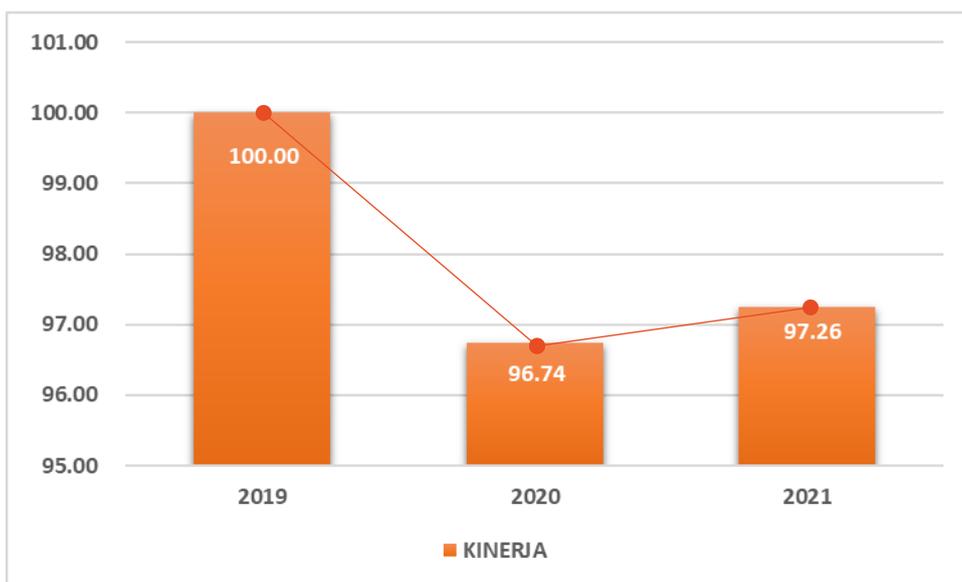
4.2 PERBANDINGAN KINERJA ORGANISASI

Selama kurun waktu 2019 - 2021, Satker BPJN Jayapura telah memelihara, meningkatkan dan membangun jalan nasional maupun ruas-ruas yang menjadi proyek prioritas dan strategis nasional. Melihat kinerja Satker BPJN Jayapura selama kurun waktu tersebut, terdapat beberapa target dan sasaran yang sudah terpenuhi dan yang masih belum terpenuhi. Untuk mengetahui capaian kinerja Satker BPJN Jayapura tahun ini dengan tahun sebelumnya terhadap target awal yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja dan Dirjen Bina Marga, dilakukan perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir (2019, 2020, 2021) dengan hasil rata-rata capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel IV.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahunan terhadap Target Awal (PK Revisi)
Tahun 2019 – 2021

NO	OUTPUT	SAT	2019			2020			2021		
			TARGET AWAL (PK REVISI)	REALISASI	KINERJA (%)	TARGET AWAL (PK REVISI)	REALISASI	KINERJA (%)	TARGET AWAL (PK REVISI)	REALISASI	KINERJA (%)
1	Jalan yang Terpelihara	km									
	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	km				0.0001	0.0001	100.00			
2	IKP 2 : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR										
	Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Layanan				1	1	85.24			
	Jumlah Layanan Internal (Overhead)	Layanan									
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan				1	1	100.00			
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	99.99	1	1	99.92	1	1	89.37
	Jumlah Layanan Dukungan Administrasi Satker	Bulan Layanan	12	12	100.00						
	Layanan Perkantoran	Layanan	12	12	100.00	12	12	98.52	1	1	99.66
	Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	Dokumen							1	1	100.00
	Layanan Sarana Internal	Unit							1	1	100.00
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA				100.00			96.74			97.26

Sumber : Data Pengukuran Kinerja Satker BPJN Jayapura Tahun 2019-2021



Gambar 4.5 Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Tahunan terhadap Target PK Revisi Tahun 2019 – 2021

Dari hasil perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun – tahun sebelumnya terhadap target awal yang tercantum dalam PK Revisi, terlihat bahwa terjadi penurunan capaian kinerja dari 2019 ke 2020 yang dipengaruhi adanya pemotongan anggaran dalam rangka *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan pencegahan penyebaran COVID-19 sehingga terdapat penyesuaian target pada Revisi DIPA yang dilakukan di lingkungan Satker BPJN Jayapura, kemudian terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya kurang optimal dikarenakan adanya tantangan pandemi COVID-19. Dengan komitmen yang tinggi dalam menuntaskan pelaksanaan paket/kegiatan di tahun anggaran 2021 maka terjadi peningkatan capaian kinerja yang juga didukung oleh adanya optimalisasi terhadap dana sisa lelang rupiah murni yang tidak terserap.

Berikut ini merupakan data perbandingan target yang tercantum di Dokumen Perencanaan Lainnya Satker BPJN Jayapura untuk Tahun 2021 dengan realisasi capaian di tahun 2021, serta terdapat informasi besaran akumulasi target lima tahun yang tercantum di Dokumen Perencanaan Satker BPJN Jayapura 2020 – 2024 seperti tampak pada **Tabel IV.5** di bawah ini :

Tabel IV.5 Perbandingan Target Dokumen Perencanaan Lainnya dengan Realisasi Kinerja Satker BPJN Jayapura Tahun 2021

NO	OUTPUT	SAT	TARGET RENSTRA 2020-2024	2020		2021		CAPAIAN KUMULATIF
				TARGET RENSTRA	REALISASI	TARGET RENSTRA	REALISASI	
1	Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan	km			0.0001			0.0001
2	Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Layanan	5	1	1	1		1
3	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	5	1	1	1		1
4	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	5	1	1	1	1	2

NO	OUTPUT	SAT	TARGET RENSTRA 2020-2024	2020		2021		CAPAIAN KUMULATIF
				TARGET RENSTRA	REALISASI	TARGET RENSTRA	REALISASI	
5	Layanan Perkantoran	Layanan	5	1	12	1	1	13
6	Layanan penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	Dokumen					1	1
7	Layanan Sarana Internal	Unit					1	1

Sumber : Data Dokumen Perencanaan Satker BPJN Jayapura 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

4.3 REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran secara total berdasarkan laporan e-Monitoring status 18 Januari 2021 adalah sebesar Rp 40.576.751.000,- atau 95,30% terhadap PK Awal dan Revisi tahun 2021. Data pencapaian keuangan Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura dapat dilihat pada Tabel IV.6 berikut:

Tabel IV.6 Data DIPA Awal dan Realisasi Keuangan Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Tahun Anggaran 2020

DIPA AWAL	:	Rp. 42.578.064.000,-
DIPA AKHIR	:	Rp. 42.578.064.000,-
REALISASI KEUANGAN	:	Rp. 40.576.751.000,-
SISA	:	Rp. 2.001.313.000,-
PERSEN REALISASI	:	95,30%

Berdasarkan realisasi anggaran Satker BPJN Jayapura Tahun 2021, dibawah ini disajikan informasi realisasi anggaran masing-masing output berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran Program Rating Kondisi Jalan Nasional dan Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR, seperti tampak pada tabel di bawah ini :

Tabel IV. 7 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021

NO	OUTPUT	PAGU ANGGARAN (Rp Ribu)		REALISASI (Rp Ribu)	CAPAIAN (%)		KET
		AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
		42,578,064	42,578,064	40,576,751	95.30	95.30	
	Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	8,889,559	8,889,559	8,570,225	96.41	96.41	
	Indikator Kinerja Program: Rating Kondisi Jalan Nasional	8,889,559	8,889,559	8,570,225	96.41	96.41	
1	Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	8,889,559	8,889,559	8,570,225	96.41	96.41	
	Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	33,688,505	33,688,505	32,006,526	95.01	95.01	

NO	OUTPUT	PAGU ANGGARAN (Rp Ribu)		REALISASI (Rp Ribu)	CAPAIAN (%)		KET
		AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
Indikator Kinerja Program: Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR		33,688,505	33,688,505	32,006,526	95.01	95.01	
2	Layanan Sarana Internal	507,500	507,500	504,570	99.42	99.42	
3	Layanan Dukungan Manajemen Satker	6,517,908	6,517,908	5,742,810	88.11	88.11	
4	Layanan Perkantoran	26,663,097	26,663,097	25,759,146	96.61	96.61	

Sumber : Data Anggaran Satker BPJN Jayapura Tahun 2021



Realisasi IKP Tingkat Rating Kondisi Jalan Nasional menunjukkan persentase yang Sangat Memuaskan di angka 96,41%. Realisasi IKP Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR menunjukkan persentase yang Sangat Memuaskan di angka 95,01%. Capaian penyerapan Satker BPJN Jayapura secara keseluruhan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dimana di tahun 2020 persentase realisasi anggaran di angka 84,26%. Pada **Tahun Anggaran 2021 persentase realisasi anggaran** mampu mencapai angka **95,30%**. Meskipun pelaksanaan paket/kegiatan di tahun ini banyak dipengaruhi oleh kendala pandemi COVID-19, namun karena telah dilakukan *refocussing* kegiatan maka penyerapan anggaran bisa dioptimalkan di akhir tahun anggaran.

Capaian kinerja tahun ini yang termasuk dalam kategori Sangat Memuaskan tidak terlepas dari pola pengendalian, evaluasi dan monitoring yang terus-menerus dilakukan dengan cara-cara yang dipandang efektif. Hal ini tidak terlepas dari pola pengendalian, evaluasi dan monitoring yang terus-menerus dilakukan dengan cara-cara yang dipandang efektif. Beberapa langkah yang telah diambil untuk mendorong agar progress fisik dapat dipacu dan diikuti oleh progress keuangan adalah sebagai berikut :

- Penerapan pola “Deteksi Dini” atas permasalahan-permasalahan yang ada terutama terkait dengan sumber daya, manajemen dan proses administrasi;
- Pemetaan permasalahan yang dilakukan setiap bulan untuk ditetapkan siapa yang dipandang perlu dan mampu untuk mengambil tindakan turun tangan;

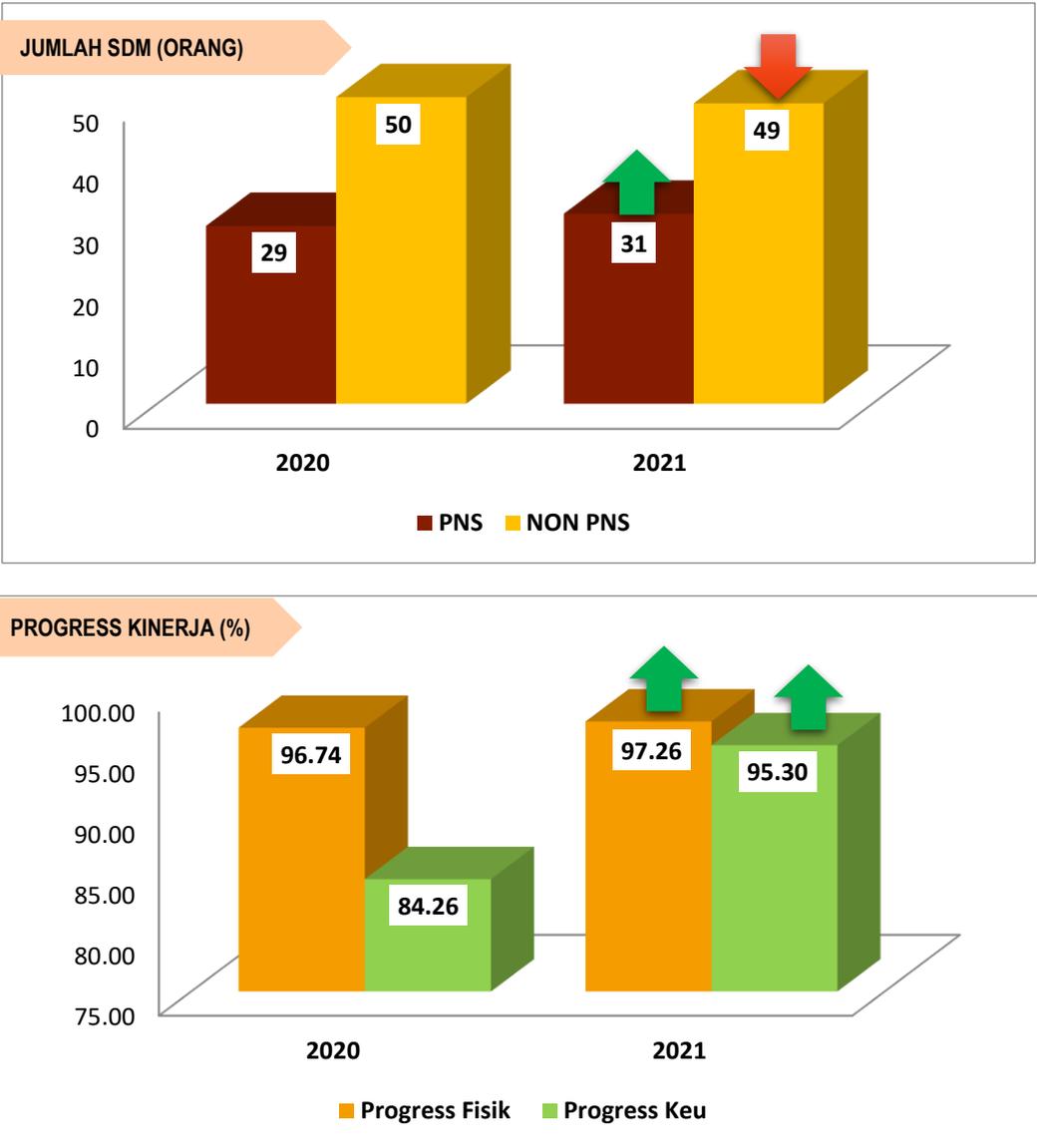
- Monitoring secara intensif atas rencana aksi yang telah ditetapkan dalam upaya penyelesaian suatu masalah.

4.3.1 Analisis Efisiensi Sumber Daya

Satker BPJN Jayapura sebagai Unit Satuan Kerja dibawah koordinasi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura dituntut untuk terus meningkatkan kinerja yang selaras dengan Visi, Misi Kementerian PUPR dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2020-2024. Tercapainya sasaran kemantapan Jalan Nasional serta prioritas untuk mewujudkan fungsionalnya Ruas Jalan Trans Papua dengan fokus penanganan pada pembangunan jalan dan jembatan di segmen-segmen yang belum terhubung menjadi tujuan yang hendak dicapai oleh Satker BPJN Jayapura dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Perencanaan Lainnya.

Oleh karena itu sangat diperlukan analisis untuk pemenuhan dan penggunaan sumber daya. Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan erat dengan Sumber Dana (Anggaran). Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja, Satker BPJN Jayapura melakukan analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun penyerapan anggaran. Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, Satker BPJN Jayapura langsung memberi tanggungjawab kinerja kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing. Secara berkala dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dan diwujudkan dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja bulanan dan tahunan.

Satker BPJN Jayapura menggunakan indikator capaian kinerja fisik dan keuangan dalam kurun waktu dua tahun terakhir kemudian membandingkan dengan jumlah ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki untuk mengetahui seberapa besar hubungan dan pengaruh yang diberikan antara ketersediaan sumber daya manusia dengan pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura, dengan data dan informasi sebagai berikut :



Gambar 4.6 Jumlah Sumber Daya Manusia dan Capaian Progress Fisik dan Keuangan di lingkungan BPJN Jayapura Tahun 2020-2021

Keterangan	2020	2021
Jumlah SDM	79	80
>> PNS	29	31
>> NON PNS	50	49
Progress Fisik	96.74	97.26
Progress Keu	84.26	95.30

Dari data di atas, diperoleh informasi bahwa di tahun 2021 secara total terjadi penambahan jumlah sumber daya manusia di lingkungan Satker BPJN Jayapura. Untuk capaian kinerja fisik mengalami peningkatan 0,52% dari tahun sebelumnya, begitu juga tingkat penyerapan keuangan mengalami peningkatan 11,04%

dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini bisa terwujud karena adanya komitmen dari Kasatker maupun PPK dalam mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan yang sudah diprogramkan walaupun tahun ini masih menghadapi kendala adanya pandemi COVID-19, disamping terdapat optimalisasi dana kegiatan yang tidak terserap untuk kegiatan lain yang lebih membutuhkan.

Capaian kinerja fisik dan keuangan yang berhasil dicapai tahun ini dengan jumlah sumber daya yang dimiliki memberi catatan kedepannya bagi Satker BPJN Jayapura untuk bisa mempertahankan bahkan terus berupaya melakukan perbaikan demi peningkatan kinerja di tahun yang akan datang. Penetapan target yang umumnya selalu meningkat dari tahun ke tahun seharusnya menjadi motivasi dan masukan bahwa di kebiasaan kerja selama ini ada yang harus diperbaiki, diantaranya kedisiplinan kerja bagi pegawai, kurangnya ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam manajemen pengelolaan data yang aktual dan valid, cara kerja yang tidak efektif dan efisien atau penanganan masalah yang lambat, serta cara kerja fisik di lapangan yang tidak maksimal. Dari sisi peningkatan kualitas/kompetensi pegawai BPJN Jayapura, para pemangku kepentingan juga perlu menekankan tentang pentingnya komitmen, integritas, dan kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas kerja sehari-hari, disamping itu juga memberikan perhatian dan kesempatan kepada sumber daya manusia/pegawai yang dimiliki dalam keikutsertaan pada kegiatan maupun pelatihan yang bisa meningkatkan kompetensi pegawai serta menunjang produktivitas dan prestasi kerja sesuai bidang kerja masing-masing, sehingga di tahun yang akan datang BPJN Jayapura dapat menyelesaikan setiap target kinerja secara optimal sesuai kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien.

4.3.2 Analisis Penyerapan Anggaran

Pada **Tabel IV.8** berikut disajikan rincian alokasi anggaran per Satuan Kerja, nilai DIPA awal, nilai DIPA revisi akhir dan nilai penyerapan pada akhir tahun di Lingkungan BPJN Jayapura.

Tabel IV.8 Realisasi Penyerapan Anggaran Per Satuan Kerja Tahun Anggaran 2021

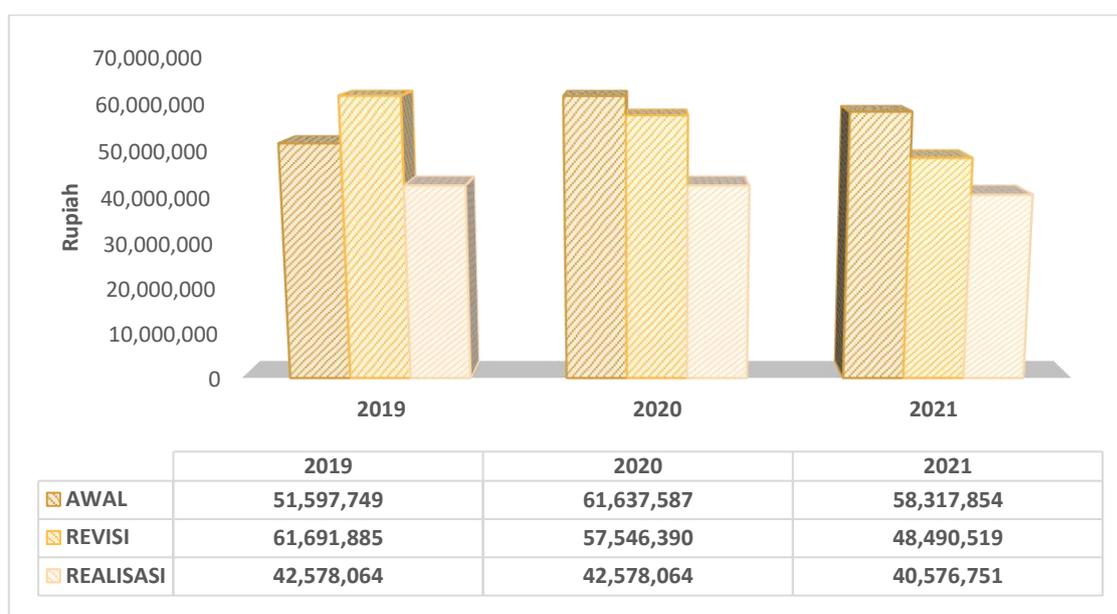
KODE SATKER	SATUAN KERJA	ALOKASI		PENYERAPAN	
		DIPA AWAL (Rp Ribu)	DIPA REVISI (Rp Ribu)	REALISASI (Rp Ribu)	%
04498680	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)	1,010,286,106	971,717,960	709,487,346	73.01
04498685	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH VII PROVINSI PAPUA (NABIRE)	256,460,323	251,810,274	250,221,933	99.37
04498681	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IX PROVINSI PAPUA (BIAK SERUI)	103,802,624	103,802,624	103,110,615	99.33
04259035	DINAS PU PROV. PAPUA	5,403,455	5,403,455	5,065,770	93.75

KODE SATKER	SATUAN KERJA	ALOKASI		PENYERAPAN	
		DIPA AWAL (Rp Ribu)	DIPA REVISI (Rp Ribu)	REALISASI (Rp Ribu)	%
04501303	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)	57,794,540	57,794,540	56,256,899	97.34
04448013	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA	42,578,064	42,578,064	40,576,751	95.30
	TOTAL	1,476,325,112	1,433,106,917	1,164,719,314	81.27

Total alokasi anggaran Satker BPJN Jayapura tahun 2021 sesuai DIPA awal sebesar Rp.42.578.064.000,- yang berasal dari APBN. Tidak ada sumber dana dari PHLN maupun LOAN. Pada periode Tahun Anggaran 2021 realisasi anggaran mencapai Rp. 40.576.751.000,- atau sebesar 95,30% dari total anggaran DIPA revisi terakhir. Rekapitulasi alokasi dan realisasi anggaran Satker BPJN Jayapura tahun 2019 – 2021 dapat dilihat pada **Tabel IV.9** dan **Gambar 4.7** berikut :

**Tabel IV.9 Realisasi Anggaran Tahun 2019 – 2021
Satker BPJN Jayapura**

NO	TAHUN ANGGARAN	DIPA AWAL (Rp. ribu)	DIPA REVISI (Rp. ribu)	REALISASI ANGGARAN (Rp. ribu)	SISA ANGGARAN (Rp. ribu)	% REALISASI ANGGARAN
1	2019	51,597,749	61,637,587	58,317,854	3,319,733	94.61
2	2020	61,691,885	57,546,390	48,490,519	9,055,871	84.26
3	2021	42,578,064	42,578,064	40,576,751	2,001,313	95.30



Gambar 4.7 Grafik Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2019 – 2021

Berdasarkan dari hasil pengukuran kinerja maka diperoleh data alokasi dan realisasi anggaran pada Satker BPJN Jayapura Tahun 2019 s/d Tahun 2021. Dari tabel dan grafik diperoleh informasi untuk jumlah alokasi anggaran dari tahun 2019 hingga 2021 cenderung mengalami penurunan tiap tahunnya. Hal ini selain disesuaikan dengan kebutuhan prioritas penanganan di lapangan, juga dipengaruhi oleh pemekaran Balai yang terjadi di tahun 2019 sehingga terbentuk Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke, serta pada pertengahan tahun 2020 dengan terbentuknya Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena sehingga ruas jalan nasional Provinsi Papua yang pada tahun 2019 seluruhnya masih ditangani oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura, kini alokasi anggarannya menyesuaikan jumlah ruas yang ditangani masing-masing Balai. Berkat kinerja dan komitmen para Satker dan PPK maka pada tahun 2021 Satker BPJN Jayapura berhasil mencapai realisasi penyerapan anggaran sebesar 95,30 %.

Peningkatan kinerja yang masih harus menjadi perhatian adalah meliputi bagaimana peningkatan kualitas/mutu dari Sumber daya Manusia di lingkungan Satker BPJN Jayapura. Terdapat beberapa hal yang memerlukan perhatian di dalam upaya meningkatkan kinerja antara lain melalui percepatan pelaksanaan program dan anggaran pada tahun mendatang yang berbasis kinerja. Berikut hal-hal yang harus menjadi perhatian guna mencapai peningkatan kinerja yang lebih baik lagi pada tahun berikutnya adalah sebagai berikut :

Tabel IV.10 Point-point Perhatian dan Tindak Lanjut

NO.	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN	TINDAK LANJUT
1	MANAJEMEN	
	Kurangnya Komunikasi dengan personil Satuan Kerja	Melakukan perbaikan dalam hal komunikasi baik melalui tatap muka langsung (rapat/koordinasi) maupun tidak langsung (pesan singkat/email/telepon)
	Penempatan posisi SDM Satker yang tepat	Menempatkan personil sesuai dengan pendidikan dan melakukan evaluasi terhadap kinerja personil
	SOP untuk pelaksanaan kegiatan, Pengelolaan Keuangan, Monitoring dan Evaluasi serta Pengendalian	Merumuskan dan membuat SOP untuk seluruh kegiatan, terutama Pengelolaan Keuangan, Monitoring dan Evaluasi serta Pengendalian
2	PERENCANAAN	
	Komitmen terhadap pencapaian kinerja	Meningkatkan prestasi capaian target
	Pengoptimalan fungsi dari Renstra dan Perjanjian Kinerja sebagai penunjuk arah pencapaian tujuan dan sasaran organisasi	Meningkatkan pemahaman dan memberikan arahan yang benar sesuai dengan peraturan dan tujuan sasaran yang akan dicapai
	Komitmen terhadap penggunaan anggaran sesuai prioritas	Meningkatkan dan mengontrol agar penggunaan anggaran dapat dialokasikan sesuai prioritas
	Keseragaman dalam pembuatan dokumen perencanaan	Melakukan gelar personil Konsultan Perencana agar diperoleh kesepahaman dalam pembuatan dokumen perencanaan
	Kurangnya pemahaman terhadap spesifikasi teknis	Melakukan pembahasan bersama mengenai spesifikasi teknis
	Kurangnya pemahaman terhadap	Mengundang narasumber untuk memberikan pengarahan

Tabel IV.10 Point-point Perhatian dan Tindak Lanjut

NO.	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN	TINDAK LANJUT
	dampak lingkungan	mengenai lingkungan hidup dan dampak pekerjaan bidang jalan jembatan terhadap lingkungan hidup
3	PENGADAAN	
	Kurang nya personil yang telah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat pengadaan barang jasa	Aktif mengirimkan staf untuk mengikuti pelatihan sertifikasi pengadaan barang jasa
	Pemahaman yang berbeda terhadap Peraturan terkait pengadaan barang jasa terutama Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan pembuatan dokumen pengadaan yang belum seragam mengikuti ketentuan surat edaran tentang dokumen pengadaan yang terbaru (Permen No. 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia dan SE Dirjen Bina Marga Nomor 17/SE/Db/2020 tentang Petunjuk Pengisian Standar Dokumen Pemilihan Jasa Konstruksi Tahun 2021)	Melakukan diseminasi dan pembahasan-pembahasan dalam rangka memberikan update (pembaharuan) tentang peraturan pengadaan barang/jasa yang terbaru dan memberikan pemahaman yang sama terhadap peraturan pengadaan barang/jasa dan pembuatan dokumen pengadaan tersebut. Beberapa peraturan dokumen pengadaan : - Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Perpes No. 17 tahun 2019 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; - Permen No. 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia; - Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 22/SE/M/2020 tentang persyaratan pemilihan dan evaluasi dokumen penawaran pengadaan jasa konstruksi sesuai Permen No. 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia; - Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor 17/SE/Db/2020 tentang Petunjuk Pengisian Standar Dokumen Pemilihan Jasa Konstruksi Tahun 2021. - Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 18/SE/M/2021 tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Persiapan Pemilihan untuk Pengadaan Jasa Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
	Banyaknya surat yang menyatakan tidak puas terhadap proses lelang	Memperbaiki proses pelelangan secara terus menerus dan aktif melakukan pembahasan yang melibatkan semua unsur (Pejabat Struktural, Satker, PPK, ULP dan Pokja)
	Pemanfaatan dan pengembangan sistem pengadaan secara elektronik dengan e-procurement dan penggunaan aplikasi SIPBJ (Sistem Informasi Pengadaan Barang Jasa) terintegrasi yang berfungsi	- Memberikan pelatihan mengenai e-procurement - mengoptimalkan penggunaan e-procurement sebagai alat untuk melakukan pengadaan yang lebih transparan

Tabel IV.10 Point-point Perhatian dan Tindak Lanjut

NO.	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN	TINDAK LANJUT
	sebagai pendokumentasian proses PBJ dari perencanaan s.d serah terima pekerjaan	
4	PELAKSANAAN	
	Pengendalian mutu belum konsisten dengan spesifikasi	Membuat SOP mengenai SMM dan melakukan uji petik di lapangan
	Kurang intensifnya koordinasi dengan Pemda setempat	Melakukan koordinasi dengan Pemda setempat secara terus-menerus
	Kemampuan Kontraktor dan Konsultan yang masih kurang	Melakukan pengendalian terhadap pekerjaan di lapangan dan pelatihan terhadap staf Kontraktor dan Konsultan
5	PENGAWASAN	
	Peninjauan lapangan perlu ditingkatkan	Meningkatkan frekuensi peninjauan lapangan
	Peran Konsultan Supervisi belum optimal	Mengontrol dan mengawasi Konsultan Supervisi agar lebih berperan aktif melalui kehadiran di lapangan dan memberikan masukan
	Kemampuan teknis staf satker dalam melakukan pengawasan di lapangan belum memadai	Mengikut sertakan staf pengawas pada Satker pada kegiatan pelatihan/diklat-diklat pengawasan
6	EVALUASI	
	Sistem evaluasi kinerja belum berjalan secara optimal	Melakukan sosialisasi secara berkesinambungan mengenai pentingnya sistem evaluasi kinerja untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.



BAB V

Penutup

BAB V. PENUTUP

Secara umum, kinerja dari Indikator Kinerja Kegiatan pada Indikator Kinerja Program Tingkat Kemantapan Jalan Nasional sudah menunjukkan performa yang **Memuaskan** bahkan **Sangat Memuaskan** dikarenakan sebagian besar kinerja dari Indikator Kinerja Kegiatan pada Satuan Kerja BPJN Jayapura **berada di atas 80%**. Indikator Kinerja Kegiatan yang capaian angka kinerjanya di akhir tahun 2021 mencapai **>90 - 100** dengan kategori **Sangat Memuaskan**, yaitu:

1. Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan dengan nilai kinerja 100,00;
2. Layanan Sarana Internal dengan nilai kinerja 100,00;
3. Layanan Perkantoran dengan nilai kinerja 99,66.

Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan yang capaian angka kinerjanya di akhir tahun 2021 mencapai **>80 – 90** yaitu Layanan Dukungan Manajemen Satker dengan nilai kinerja 89,37.

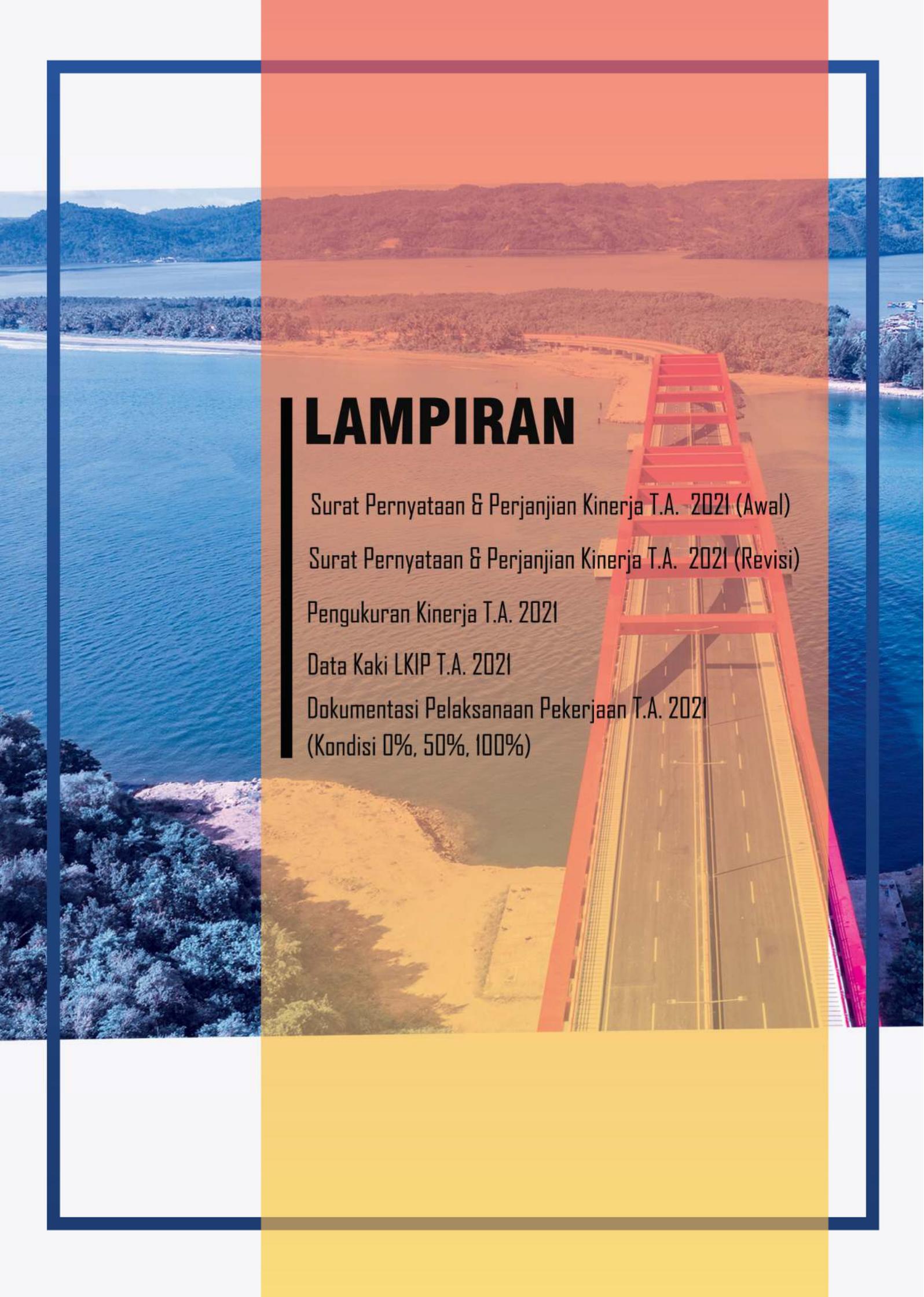
Berdasarkan hasil tersebut di atas, sangat diharapkan kinerja yang sudah dicapai dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan kedepannya. Satuan Kerja sebagai unit yang paling berperan dalam capaian kinerja wajib berkomitmen dan memperhatikan target yang telah ditetapkan pada awal tahun sehingga meminimalisir masalah keterlambatan dari sisi administrasi dan progress pekerjaan di lapangan. Di samping itu pentingnya disiplin melakukan monitoring dan evaluasi agar jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan dapat segera dicarikan solusi sehingga target tetap tercapai.

5.1 PERMASALAHAN

Permasalahan yang sekaligus menjadi tantangan bagi pembangunan di Provinsi Papua salah satunya disebabkan oleh wilayahnya yang sangat luas dengan jumlah penduduk terbatas yang bertempat tinggal menyebar. Hal ini menyebabkan beberapa daerah masih belum terjangkau fasilitas infrastruktur yang memadai khususnya di kawasan pegunungan. Dalam penyelenggaraan jalan di Provinsi Papua, Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura berkewajiban tidak hanya untuk menjaga dan meningkatkan kemantapan jalan yang telah ada, namun sekaligus mengakomodir tuntutan pembangunan jalan dalam rangka membuka keterisolasian dan peningkatan aksesibilitas di Provinsi Papua. Dari informasi permasalahan yang ada pada Bab IV, maka permasalahan utama yang cenderung menjadi penyebab capaian kinerja di sepanjang tahun 2021 menjadi tidak maksimal yaitu dikarenakan adanya pandemi COVID-19 sehingga banyak kegiatan tertunda bahkan belum dapat terealisasi tahun ini serta faktor SDM dimana jumlah dan keahlian SDM teknik yang belum memadai.

5.2 REKOMENDASI

- a. Satuan Kerja sebagai unit yang paling berperan dalam capaian kinerja wajib berkomitmen dan memperhatikan target yang telah ditetapkan pada awal tahun sehingga meminimalisir masalah keterlambatan dari sisi administrasi dan progress pekerjaan di lapangan;
- b. Disiplin melakukan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai upaya kontrol kinerja Satuan Kerja agar jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan di lapangan dapat segera dicarikan solusi sehingga target penyerapan anggaran dan pelaksanaan pekerjaan dapat terealisasi dengan baik, tepat mutu, dan tepat sasaran. Catatan untuk kondisi di masa pandemi, bisa dilakukan secara *online* menggunakan aplikasi *Zoom*;
- c. Fokus dari PPK dan Kasatker untuk mengatur strategi peningkatan kinerja guna mengejar ketertinggalan progress dan melakukan penyesuaian pelaksanaan pekerjaan untuk memperkecil resiko penyebaran virus COVID-19 di tengah pelaksanaan pekerjaan sesuai Instruksi Menteri PUPR No 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang ditetapkan pada 27 Maret 2020, mengingat memasuki tahun 2021 pandemi COVID-19 masih terus terjadi khususnya di Provinsi Papua;
- d. Masukan kepada petugas e-Monitoring dan juga PPK untuk aktif saling berkoordinasi sehubungan dengan rutinitas kebutuhan *updating* progress di e-Monitoring dan penetapan angka target rencana fisik dan keuangan masing-masing kegiatan yang terencana dengan baik dan logis di masing-masing Satker;
- e. Proses perencanaan dan pengukuran kinerjanya, maka dipandang perlu untuk menerapkan secara konsisten seluruh elemen SAKIP agar penyusunan dan pelaporan LKIP, baik LKIP Satminkal maupun Unit kerja, dapat lebih disempurnakan lagi untuk peningkatan penerapan SAKIP dimasa mendatang.



LAMPIRAN

Surat Pernyataan & Perjanjian Kinerja T.A. 2021 (Awal)

Surat Pernyataan & Perjanjian Kinerja T.A. 2021 (Revisi)

Pengukuran Kinerja T.A. 2021

Data Kaki LKIP T.A. 2021

Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan T.A. 2021
(Kondisi 0%, 50%, 100%)

**SURAT
PERNYATAAN &
PERJANJIAN
KINERJA
TA. 2021
(AWAL)**



Jembatan
Teluk Kendari

Jembatan Gantung
Pasia - Kelok

Jalan Tol
Kertosono - Mojokerto

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN ANGGARAN 2021

SATKER BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : EDU M. P. SASARARI
Jabatan : KEPALA SATUAN KERJA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XVIII JAYAPURA

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : HEDY RAHADIAN
Jabatan : DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

1. PIHAK PERTAMA pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
 SATKER BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XVIII JAYAPURA
 DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2020	Target 2021
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	IKSP 2 : Rating Kondisi Jalan Nasional		
	IKK : Tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional	116.85 %	100.00 %
	Parameter <i>Rating kondisi jalan nasional</i>	2.67	2.84
	Rincian Output		
	CBR 001 Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	Dokumen	1 Dokumen

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
2. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga

Anggaran

Rp 73,505,632,000

Jakarta, Januari 2021

Kepala Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura



Direktur Jenderal Bina Marga,



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
 SATKER BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XVIII JAYAPURA
 DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAMPIRAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							73,505,632.00	Total Anggaran
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional						22,670,188.00	
		Rating Kondisi Jalan Nasional					22,670,188.00	
		CBR Layanan Penyiapan dan 001 Pengendalian Pelaksanaan	1 Dokumen				22,670,188.00	
				Provinsi Papua				
			1 Dokumen	Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura			22,670,188.00	
				310 Bantuan Teknis			17,385,587.00	
			1 PKT		AA SURVEY KONDISI JALAN LERENG DAN JEMBATAN BPJN JAYAPURA	PAPUA	5,245,156.00	
			1 PKT		AB KONSULTAN MANAJEMEN PROYEK BPJN JAYAPURA	PAPUA	3,759,740.00	
			1 PKT		CA SURVEY KONDISI JALAN LERENG DAN JEMBATAN BPJN WAMENA	PAPUA	5,146,595.00	
			1 PKT		CB KONSULTAN MANAJEMEN PROYEK BPJN WAMENA	PAPUA	3,234,096.00	
				316 Bahan Jalan dan Jembatan			783,322.00	
			1 LS		BA PENGADAAN ROSIN ESTER BPJN JAYAPURA	PAPUA	783,322.00	
				401 Monitoring dan Evaluasi			2,533,639.00	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya						50,835,444.00	
		Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR					50,835,444.00	
		EAD 002 Layanan Sarana Internal	1 Unit				1,154,500.00	
				Provinsi Papua				
			1 Unit	Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura			1,154,500.00	
				052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			663,500.00	
					AY PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI	PAPUA	293,500.00	
					> PPK PERENCANAAN DAN PEMANTAUAN			
			2 Unit		- Pengadaan Laptop		55,000.00	
			1 Unit		- Pengadaan Printer Portable		7,000.00	
					> PPK PEMBANGUNAN DAN PENGUJIAN			
			2 Unit		- Pengadaan Laptop		55,000.00	
			1 Unit		- Pengadaan PC All in One		13,000.00	
					> PPK TATA USAHA			
			3 Unit		- Pengadaan Laptop		82,500.00	
			2 Unit		- Pengadaan PC All in One		26,000.00	
					> PPK PRESERVASI DAN PERALATAN			
			2 Unit		- Pengadaan Laptop		55,000.00	
					CQ PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI BPJN WAMENA	PAPUA	370,000.00	
					> PPK TATA USAHA			

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			5 Unit		- Laptop		125,000.00	
			5 Unit		- Printer A4		25,000.00	
			3 Unit		- Printer A3 dan Scanner		60,000.00	
			3 Unit		- All in One PC dan UPS		75,000.00	
			1 Unit		- Drone		35,000.00	
			2 Unit		- GPS		30,000.00	
			2 Unit		- Telepon Satelit		20,000.00	
				053	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas perkantoran		491,000.00	
					AZ	PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN	PAPUA	14,000.00
					>	PPK PEMBANGUNAN DAN PENGUJIAN		
			2 Unit		- Lemari Arsip		7,000.00	
					>	PPK TATA USAHA		
			2 Unit		- Lemari Arsip		7,000.00	
					BB	PENGADAAN ALAT LABORATORIUM	PAPUA	200,000.00
					>	PPK PEMBANGUNAN DAN PENGUJIAN		
			1 Keg		- Pengadaan Alat Laboratorium		200,000.00	
					CR	PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN BPJN WAMENA	PAPUA	277,000.00
					>	PPK TATA USAHA		
			10 Unit		- Meja 1/2 biro		22,000.00	
			5 Unit		- Meja 1 biro		22,000.00	
			5 Unit		- Kursi Kerja		32,500.00	
			5 Unit		- Penghancur Kertas		27,500.00	
			10 Unit		- Lemari Kerja		85,000.00	
			1 Unit		- Sound System		88,000.00	
		EAC Layanan Dukungan 004 Manajemen Satker	1 Layanan				11,955,774.00	
				Provinsi Papua				

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			1 Layanan	Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura			11,955,774.00	
				051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran			598,951.00	
					AJ PENYUSUNAN PROGRAM RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN	PAPUA	598,951.00	
				052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi			2,619,692.00	
					AK PENDAMPINGAN DAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH	PAPUA	237,294.00	
					AL PELAKSANAAN UJI PETIK	PAPUA	279,939.00	
					AM AKREDITASI LABORATORIUM BERAKREDITASI KAN	PAPUA	83,666.00	
					AN KOORDINASI DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM	PAPUA	1,197,544.00	
					AO SISTEM PELAPORAN SECARA ELEKTRONIK (E-MONITORING) BPJN JAYAPURA	PAPUA	23,600.00	
					AP PENDAMPINGAN TEKNIS PRESERVASI JALAN	PAPUA	111,796.00	
					AQ UJI LAIK FUNGSI JALAN	PAPUA	409,734.00	
					CK SISTEM PELAPORAN SECARA ELEKTRONIK (E-MONITORING) BPJN WAMENA	PAPUA	29,600.00	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
					CL	PENDAMPINGAN DAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH BPJN WAMENA	PAPUA	246,519.00	
				055				7,822,370.00	
					AS	KEBUTUHAN PENCEGAHAN COVID-19 BPJN JAYAPURA	PAPUA	423,000.00	
			1 PKT		AT	JASA KEAMANAN, PENGEMUDI, DAN KEBERSIHAN KANTOR BPJN JAYAPURA	PAPUA	949,200.00	
					AU	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN	PAPUA	374,900.00	
					AV	ADMINISTRASI KEGIATAN BPJN JAYAPURA	PAPUA	2,552,296.00	
					AW	PELAKSANAAN KOMUNIKASI PUBLIK DAN PENGELOLAAN WEBSITE	PAPUA	121,200.00	
			1 PKT		CN	ASA KEAMANAN, PENGEMUDI, DAN KEBERSIHAN KANTOR BPJN WAMENA	PAPUA	949,200.00	
					CO	ADMINISTRASI KEGIATAN BPJN WAMENA	PAPUA	2,379,074.00	
					CP	KEBUTUHAN PENCEGAHAN COVID-19 BPJN WAMENA	PAPUA	73,500.00	
								667,148.00	
					AR	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN BMN	PAPUA	333,048.00	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
					CM	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN BMN BPJN WAMENA	PAPUA	334,100.00	
				346	Pelayanan Publik (PNBP)		247,613.00		
					AX	PEMANFAATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PAPUA	247,613.00	
		EAA 005	Layanan Perkantoran	1 Layanan			37,725,170.00		
						Provinsi Papua			
			1 Layanan	Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura			37,725,170.00		
				001	Gaji dan Tunjangan		23,130,919.00		
					AG	PEMBAYARAN GAJI, HONOR, TUNJANGAN, DLL	PAPUA	16,726,123.00	
					CG	PEMBAYARAN GAJI, HONOR, TUNJANGAN, DLL BPJN WAMENA	PAPUA	6,404,796.00	
				002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		14,594,251.00		
					AH	BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN	PAPUA	1,832,440.00	
					AI	HONORARIUM NON PNS SUBSTANTIF DAN PENDUKUNG	PAPUA	8,533,460.00	
					CH	BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN BPJN WAMENA	PAPUA	747,470.00	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					CI HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN BPJN WAMENA	PAPUA	308,400.00	
					CJ HONORARIUM NON PNS SUBSTANTIF DAN PENDUKUNG BPJN WAMENA	PAPUA	3,172,481.00	



**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

**SURAT
PERNYATAAN &
PERJANJIAN
KINERJA
TA. 2021
(REVISI)**



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : EDU M. P. SASARARI
Jabatan : KEPALA SATUAN KERJA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : HEDY RAHADIAN
Jabatan : DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

1. PIHAK PERTAMA pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jayapura, November 2021

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

HEDY RAHADIAN

EDU M. P. SASARARI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SATKER BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REVISI

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2020	Target 2021
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	IKSP 2 : Rating Kondisi Jalan Nasional		
	IKK : Tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional	116,85 %	100,00 %
	Parameter <i>Rating kondisi jalan nasional</i>	2,67	2,84
	Rincian Output		
CBR 001	Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	Dokumen	1 Dokumen

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
2. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga

Anggaran

Rp 42.578.064.000

Direktur Jenderal Bina Marga,

Jayapura, November 2021
Kepala Satker Balai Pelaksanaan
Jalan Nasional Jayapura

Hedy Rahadian

Edu M. P. Sasarari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SATKER BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAMPIRAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME AWAL (PK REVISI)	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN AWAL (Dalam Ribuan Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							42.578.064,00	Total Anggaran
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional						8.889.559,00	
		Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional						
		CBR 001 Layanan penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	1 Dokumen				8.889.559,00	
				Provinsi Papua				
			1 Dokumen	Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura			8.889.559,00	
				310 Bantuan Teknis			7.590.490,00	
			1 PKT		AA SURVEY KONDISI JALAN LERENG DAN JEMBATAN BPJN JAYAPURA	PAPUA	4.600.514,00	
			1 PKT		AB KONSULTAN MANAJEMEN PROYEK BPJN JAYAPURA	PAPUA	2.989.976,00	
				316 Bahan Jalan dan Jembatan			242.000,00	
			1 LS		BA PENGADAAN ROSIN ESTER BPJN JAYAPURA	PAPUA	242.000,00	
				401 Monitoring dan Evaluasi			281.042,00	
			1 Layanan		AF MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN JALAN DAN JEMBATAN BPJN JAYAPURA	PAPUA	281.042,00	
				413 Penyusunan Dokumen Lingkungan			776.027,00	
			1 PKT		AE PENYUSUNAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP (DELH) RUAS JAYAPURA - SENTANI	PAPUA	776.027,00	
	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya						33.688.505,00	
		Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR						
		EAD 002 Layanan Sarana Internal	1 Unit				507.500,00	
				Provinsi Papua				
			1 Unit	Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura			507.500,00	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME AWAL (PK REVISI)	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN AWAL (Dalam Ribuan Rp)	KET
				052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		293.500,00	
					AY	PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI	PAPUA	293.500,00
						PPK KETERPADUAN > PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN	15.500,00	
			1 Unit			- Pengadaan Printer Portable	7.000,00	
			1 Unit			- Pengadaan Infocus	8.500,00	
						> PPK PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	68.000,00	
			2 Unit			- Pengadaan Laptop	55.000,00	
			1 Unit			- Pengadaan PC All in One	13.000,00	
						> PPK TATA USAHA	155.000,00	
			6 Unit			- Pengadaan Laptop	104.400,00	
			2 Unit			- Pengadaan PC All in One	27.720,00	
			1 Set			- Pengadaan Video Conference	19.580,00	
			3 Unit			- Pengadaan UPS	3.300,00	
						> PPK PRESERVASI	55.000,00	
			2 Unit			- Pengadaan Laptop	55.000,00	
				052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		214.000,00	
					AZ	PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN	PAPUA	14.000,00
						> PPK PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	7.000,00	
			2 Unit			- Lemari Arsip	7.000,00	
						> PPK TATA USAHA	7.000,00	
			2 Unit			- Lemari Arsip	7.000,00	
					BB	PENGADAAN ALAT LABORATORIUM	PAPUA	200.000,00
						> PPK PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	200.000,00	
			1 Keg			- Pengadaan Alat Laboratorium	200.000,00	
		EAC 004	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	Layanan		6.517.908,00	
						Provinsi Papua		
			1	Layanan	Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura		6.517.908,00	
				051	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran		373.058,00	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME AWAL (PK REVISI)	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN AWAL (Dalam Ribuan Rp)	KET
			1 Layanan		AJ PENYUSUNAN PROGRAM RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN	PAPUA	373.058,00	
				052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi			1.887.374,00	
			1 Layanan		AK PENDAMPINGAN DAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH	PAPUA	274.590,00	
			1 Layanan		AL PELAKSANAAN UJI PETIK	PAPUA	378.444,00	
			1 Dokumen		AM AKREDITASI LABORATORIUM BERAKREDITASI KAN	PAPUA	76.898,00	
			1 Dokumen		AN KOORDINASI DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM	PAPUA	922.072,00	
			1 Dokumen		AO SISTEM PELAPORAN SECARA ELEKTRONIK (E-MONITORING) BPJN JAYAPURA	PAPUA	23.600,00	
			1 Kegiatan		AP PENDAMPINGAN TEKNIS PRESERVASI JALAN	PAPUA	72.330,00	
			1 PKT		BD PENGANGKUTAN ALAT BERAT	PAPUA	139.440,00	
				055 Pelayanan umum Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan			4.114.673,00	
			1 Layanan		AS KEBUTUHAN PENCEGAHAN COVID-19 BPJN JAYAPURA	PAPUA	584.010,00	
			1 PKT		AT JASA KEAMANAN, PENGEMUDI, DAN KEBERSIHAN KANTOR BPJN JAYAPURA	PAPUA	949.200,00	
			1 Layanan		AU PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN	PAPUA	374.900,00	
			1 Layanan		AV ADMINISTRASI KEGIATAN BPJN JAYAPURA	PAPUA	1.891.696,00	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME AWAL (PK REVISI)	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN AWAL (Dalam Ribuan Rp)	KET
			1 Layanan		AW PELAKSANAAN KOMUNIKASI PUBLIK DAN PENGELOLAAN WEBSITE	PAPUA	121.200,00	
			1 PKT		BC JASA KEAMANAN, PENGEMUDI, DAN KEBERSIHAN KANTOR BPJN JAYAPURA II	PAPUA	193.667,00	
				235	Penyusunan Laporan Keuangan BMN		142.803,00	
			1 Dokumen		AR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN BMN	PAPUA	142.803,00	
		EAA 005 Layanan Perkantoran	1 Layanan				26.663.097,00	
			1 Layanan				26.663.097,00	
				001	Gaji dan Tunjangan		15.855.297,00	
			12 Bulan		AG PEMBAYARAN GAJI, HONOR, TUNJANGAN, DLL	PAPUA	15.855.297,00	
				002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		10.807.800,00	
			12 Bulan		AH BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN	PAPUA	1.940.340,00	
			12 Bulan		AI HONORARIUM NON PNS SUBSTANTIF DAN PENDUKUNG	PAPUA	8.867.460,00	

**PENGUKURAN
KINERJA
TA. 2021**

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021
SATKER BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Revisi	Realisasi	Realisasi thd Target Awal (%)	Realisasi thd Target Revisi (%)	Anggaran Awal	Anggaran Revisi	Realisasi	Realisasi thd Target Awal (%)	Realisasi thd Target Revisi (%)
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	IKSP : Rating Kondisi Jalan Nasional										
	IKK : Tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional	100.00 %	100.00 %	98.27 %							
	Parameter <i>Rating kondisi jalan nasional</i>	2.84	2.84	2.89							
	Rincian Output										
CBR 001	Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	100.00	8,889,559	8,889,559	8,570,225	96.41	96.41
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	IKSP : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tata Kelola										
	IKK : Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan	100.00 %	100.00 %	100.00 %							
	Parameter <i>Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</i>	63.35 %	63.35 %	63.35 %							
	Rincian Output										
	EAD 002	Layanan Sarana Internal	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100.00	100.00	507,500	507,500	504,570	99.42
EAC 004	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	89.37	89.37	6,517,908	6,517,908	5,742,810	88.11	88.11
EAA 005	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	99.66	99.66	26,663,097	26,663,097	25,759,146	96.61	96.61

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
2. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga

	Anggaran Awal		Anggaran Revisi		Realisasi
Rp	42,578,064,000	Rp	42,578,064,000	Rp	40,576,751,000

**DATA KAKI
LKIP
TA. 2021**

DATA KAKI LKIP TAHUN 2021
SATKER BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAMPIRAN

Realisasi berdasarkan Data e-Monitoring status 18/01/22

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME AWAL (PK REVISI)	VOLUME REVISI (REVISI AKHIR)	VOLUME CAPAIAN	REAL FIS EMON (%)	KINERJA THD AWAL (%)	KINERJA THD AKHIR (%)	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN AWAL (Dalam Ribuan Rp)	ANGGARAN REVISI (Dalam Ribuan Rp)	ANGGARAN CAPAIAN (Dalam Ribuan Rp)	REALISASI THD AWAL (%)	REALISASI THD REVISI (%)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(7)*100	(7)	(8)=(6)/(4)*100	(9)=(6)/(5)*100	(5)	(6)	(7)	(8)	(14)	(15)	(16)=(15)/(13)*100	(17)=(15)/(14)*100	(9)
												42,578,064.00	42,578,064.00	40,576,751.00	95.30	95.30	Total Anggaran
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional											8,889,559.00	8,889,559.00	8,570,225.00	96.41	96.41	
		Rating Kondisi Jalan Nasional															
		CBR 001 Layanan penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	100.00	100.00				8,889,559.00	8,889,559.00	8,570,225.00	96.41	96.41	
			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	100.00	100.00	Provinsi Papua								
									Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura			8,889,559.00	8,889,559.00	8,570,225.00	96.41	96.41	
									310 Bantuan Teknis			7,590,490.00	7,590,490.00	7,296,851.00	96.13	96.13	
			1 PKT	1 PKT	1 PKT	100.00	100.00	100.00	AA	SURVEY KONDISI JALAN LERENG DAN JEMBATAN BPJN JAYAPURA	PAPUA	4,600,514.00	4,600,514.00	4,525,907.00	98.38	98.38	
			1 PKT	1 PKT	1 PKT	100.00	100.00	100.00	AB	KONSULTAN MANAJEMEN PROYEK BPJN JAYAPURA	PAPUA	2,989,976.00	2,989,976.00	2,770,944.00	92.67	92.67	
									316 Bahan Jalan dan Jembatan			242,000.00	242,000.00	241,244.00	99.69	99.69	
			1 LS	1 LS	1 LS	100.00	100.00	100.00	BA	PENGADAAN ROSIN ESTER BPJN JAYAPURA	PAPUA	242,000.00	242,000.00	241,244.00	99.69	99.69	
									401 Monitoring dan Evaluasi			281,042.00	281,042.00	256,103.00	91.13	91.13	
			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100.00	100.00	100.00	AF	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN JALAN DAN JEMBATAN BPJN JAYAPURA	PAPUA	281,042.00	281,042.00	256,103.00	91.13	91.13	
									413 Penyusunan Dokumen Lingkungan			776,027.00	776,027.00	776,027.00	100.00	100.00	
			1 PKT	1 PKT	1 PKT	100.00	100.00	100.00	AE	PENYUSUNAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP (DELH) RUAS JAYAPURA - SENTANI	PAPUA	776,027.00	776,027.00	776,027.00	100.00	100.00	
	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya											33,688,505.00	33,688,505.00	32,006,526.00	95.01	95.01	
		Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR															
		EAD 002 Layanan Sarana Internal	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100.00	100.00	100.00				507,500.00	507,500.00	504,570.00	99.42	99.42	
			1 Unit	1 Unit	1 Unit	100.00	100.00	100.00	Provinsi Papua								
									Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura			507,500.00	507,500.00	504,570.00	99.42	99.42	
									052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			293,500.00	293,500.00	290,915.00	99.12	99.12	
									AY	PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI	PAPUA	293,500.00	293,500.00	290,915.00	99.12	99.12	
										PPK KETERPADUAN		15,500.00	15,500.00				
			1 Unit	1 Unit						> PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN							
			1 Unit	1 Unit						- Pengadaan Printer Portable		7,000.00	7,000.00				
										- Pengadaan Infocus		8,500.00	8,500.00				
										> PPK PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN		68,000.00	68,000.00				
			2 Unit	3 Unit						- Pengadaan Laptop		55,000.00	42,810.00				
			1 Unit	2 Unit						- Pengadaan PC All in One		13,000.00	18,700.00				
				2 Unit						- Pengadaan Printer			6,490.00				
										> PPK UMUM DAN TATA USAHA		155,000.00	155,000.00				
			6 Unit	6 Unit						- Pengadaan Laptop		104,400.00	104,400.00				
			2 Unit	2 Unit						- Pengadaan PC All in One		27,720.00	27,720.00				
										Pengadaan Video							
			1 Set	1 Set						- Conference		19,580.00	19,580.00				
			3 Unit	3 Unit						- Pengadaan UPS		3,300.00	3,300.00				
										> PPK PRESERVASI		55,000.00	55,000.00				
			2 Unit	2 Unit						- Pengadaan Laptop		55,000.00	55,000.00				
									053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran			214,000.00	214,000.00	213,655.00	99.84	99.84	
									AZ	PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN	PAPUA	14,000.00	14,000.00	13,730.00	98.07	98.07	
										> PPK PEMBANGUNAN		7,000.00	7,000.00				
			2 Unit	2 Unit						- Lemari Arsip		7,000.00	7,000.00				
										> PPK TATA USAHA		7,000.00	7,000.00				
			2 Unit	2 Unit						- Lemari Arsip		7,000.00	7,000.00				
									BB	PENGADAAN ALAT LABORATORIUM	PAPUA	200,000.00	200,000.00	199,925.00	99.96	99.96	
										> PPK PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN		200,000.00	200,000.00				
			1 Keg	1 Keg						Pengadaan Alat Laboratorium		200,000.00	200,000.00	-			
		EAC 004 Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	89.37	89.37	89.37				6,517,908.00	6,517,908.00	5,742,810.00	88.11	88.11	

**DOKUMENTASI
PELAKSANAAN
PEKERJAAN
TA. 2021**

SATKER BPJN JAYAPURA

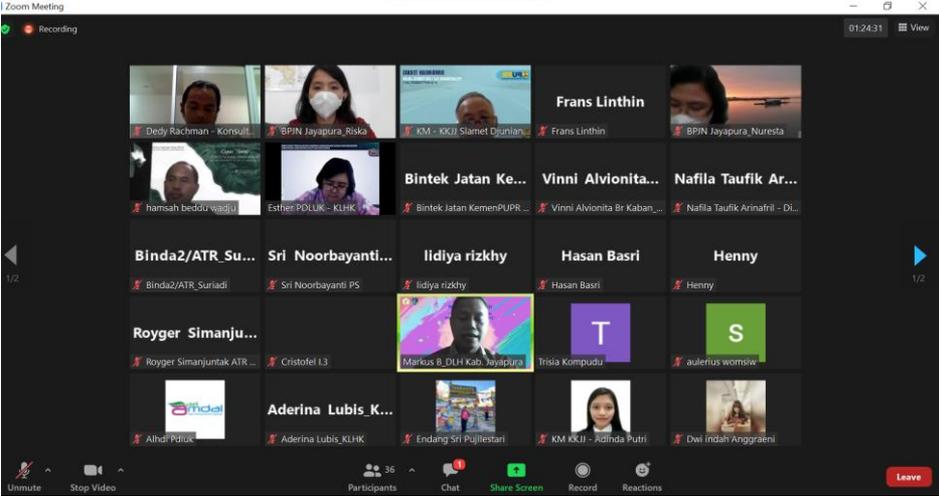
LAMPIRAN DOKUMENTASI

**PELAKSANAAN PEKERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

SASARAN PROGRAM	FOTO																						
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	<p>Deskripsi : Output Layanan Dukungan Manajemen Satker. Kegiatan Survei Kali Nabire.</p>																						
<p>PAKET</p> <p>Survei Kondisi Jalan, Jembatan, dan Lereng Provinsi Papua</p>	 <p>Survey Topografi Kali Nabire 13.11.2021 16:10 3.46636, 135.49012 (13m) Ketinggian: 78m Jalan, Jl. Trikora, Kalibobo, Kec. Nabire, Kabupaten Nabire</p>  <table border="1"> <tr> <td colspan="2">KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH Otonomi Daerah</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIREKTORAT BINA JALAN</td> </tr> <tr> <td colspan="2">KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH Otonomi Daerah</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INTERNATIONAL ROUGHNESS INDEX (IRI)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SURVEY KONDISI JALAN JEMBATAN DAN LERENG TAHUN 2021</td> </tr> <tr> <td>NOGORI RUMAH</td> <td>096-0</td> </tr> <tr> <td>NAMA RUMAH</td> <td>Jln. Sesiwaga Yuhurekta (Maha)</td> </tr> <tr> <td>STIK ARJAL</td> <td>SP3-JI-PUPUKA</td> </tr> <tr> <td>STIK ARJUN</td> <td>SP3-JI-YES-SUMBER</td> </tr> <tr> <td>TANGGAL SURVEY</td> <td>13-10-2021 NIPPOL L1</td> </tr> </table>	KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH Otonomi Daerah		DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		DIREKTORAT BINA JALAN		KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH Otonomi Daerah		INTERNATIONAL ROUGHNESS INDEX (IRI)		SURVEY KONDISI JALAN JEMBATAN DAN LERENG TAHUN 2021		NOGORI RUMAH	096-0	NAMA RUMAH	Jln. Sesiwaga Yuhurekta (Maha)	STIK ARJAL	SP3-JI-PUPUKA	STIK ARJUN	SP3-JI-YES-SUMBER	TANGGAL SURVEY	13-10-2021 NIPPOL L1
KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH Otonomi Daerah																							
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA																							
DIREKTORAT BINA JALAN																							
KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH Otonomi Daerah																							
INTERNATIONAL ROUGHNESS INDEX (IRI)																							
SURVEY KONDISI JALAN JEMBATAN DAN LERENG TAHUN 2021																							
NOGORI RUMAH	096-0																						
NAMA RUMAH	Jln. Sesiwaga Yuhurekta (Maha)																						
STIK ARJAL	SP3-JI-PUPUKA																						
STIK ARJUN	SP3-JI-YES-SUMBER																						
TANGGAL SURVEY	13-10-2021 NIPPOL L1																						
<p>MANFAAT</p> <p>Menyediakan data kondisi jalan, jembatan dan lereng untuk program penanganan jalan.</p>	 <p>Survey Topografi Kali Nabire 13.11.2021 16:10 3.46636, 135.49012 (13m) Ketinggian: 78m Jalan, Jl. Trikora, Kalibobo, Kec. Nabire, Kabupaten Nabire</p>  <table border="1"> <tr> <td colspan="2">KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH Otonomi Daerah</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIREKTORAT BINA JALAN</td> </tr> <tr> <td colspan="2">KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH Otonomi Daerah</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INTERNATIONAL ROUGHNESS INDEX (IRI)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SURVEY KONDISI JALAN JEMBATAN DAN LERENG TAHUN 2021</td> </tr> <tr> <td>NOGORI RUMAH</td> <td>096-0</td> </tr> <tr> <td>NAMA RUMAH</td> <td>Jln. Sesiwaga Yuhurekta (Maha)</td> </tr> <tr> <td>STIK ARJAL</td> <td>SP3-JI-PUPUKA</td> </tr> <tr> <td>STIK ARJUN</td> <td>SP3-JI-YES-SUMBER</td> </tr> <tr> <td>TANGGAL SURVEY</td> <td>13-10-2021 NIPPOL L1</td> </tr> </table>	KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH Otonomi Daerah		DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		DIREKTORAT BINA JALAN		KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH Otonomi Daerah		INTERNATIONAL ROUGHNESS INDEX (IRI)		SURVEY KONDISI JALAN JEMBATAN DAN LERENG TAHUN 2021		NOGORI RUMAH	096-0	NAMA RUMAH	Jln. Sesiwaga Yuhurekta (Maha)	STIK ARJAL	SP3-JI-PUPUKA	STIK ARJUN	SP3-JI-YES-SUMBER	TANGGAL SURVEY	13-10-2021 NIPPOL L1
KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH Otonomi Daerah																							
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA																							
DIREKTORAT BINA JALAN																							
KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH Otonomi Daerah																							
INTERNATIONAL ROUGHNESS INDEX (IRI)																							
SURVEY KONDISI JALAN JEMBATAN DAN LERENG TAHUN 2021																							
NOGORI RUMAH	096-0																						
NAMA RUMAH	Jln. Sesiwaga Yuhurekta (Maha)																						
STIK ARJAL	SP3-JI-PUPUKA																						
STIK ARJUN	SP3-JI-YES-SUMBER																						
TANGGAL SURVEY	13-10-2021 NIPPOL L1																						

SASARAN PROGRAM	FOTO
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	<p>Deskripsi : Survei Lapangan dan Rapat yang dilakukan KMP bersama BPJN Jayapura</p>
<p>PAKET</p>	
<p>Konsultan Manajemen Proyek BPJN Jayapura</p>	
<p>MANFAAT</p>	
<p>Menyediakan data dan informasi pelaksanaan kegiatan penanganan jalan dan jembatan di Provinsi Papua</p>	

Oct 7, 2021 10:12:00
 -2°37'11.421"S 140°40'53.932"E
 Jl. Filadelfia No.15, Tanah Hitam, Abepura, Kota Jayapura, Papua 99351
 rapat penyusunan Pra FS Jalan Akses menuju Istana Presiden

SASARAN PROGRAM	FOTO
<p>Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional</p>	<p>Deskripsi : Rapat Penilaian DELH Ruas Jayapura-Sentani oleh Tim Penilai dari KLHK dan beberapa Kementerian terkait lainnya yang dilakukan secara daring pada 22 Oktober 2021</p>
<p>PAKET/KEGIATAN</p> <p>Penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Ruas Jayapura - Sentani</p>	
<p>MANFAAT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memenuhi ketersediaan dokumen lingkungan yang akan digunakan sebagai acuan mitigasi dari dampak yang mungkin timbul akibat rencana kegiatan Penanganan; • Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan kegiatan; • Bahan bagi perencanaan untuk jenis penanganan selanjutnya terhadap ruas jalan tersebut. 	

SASARAN PROGRAM	FOTO
<p>Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</p>	<p>Deskripsi : Penyaluran masker, vitamin, bantuan sembako dan pemeriksaan Swab Antigen secara berkala kepada pegawai di lingkungan Satker BPJN Jayapura.</p>
<p>PAKET/KEGIATAN</p>	
<p>Kebutuhan Pencegahan COVID-19</p>	
<p>MANFAAT</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan kebutuhan untuk penanganan COVID-19 di lingkungan kerja dan mendukung kegiatan operasional pegawai di lingkungan BPJN Jayapura 	

SASARAN PROGRAM	FOTO
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	<p>Deskripsi : Pengecekan Alat Berat di Gudang Bina Marga di Citeureup, Bogor-Jawa Barat Sebelum Diangkut ke Jayapura</p>
<p>PAKET/ KEGIATAN</p>	
<p>Pengangkutan Alat Berat</p>	
<p>MANFAAT</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin dan penanganan darurat tanggap bencana 	

SASARAN PROGRAM	FOTO
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	<p>Deskripsi : Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura</p>
<p>PAKET/KEGIATAN</p> <p>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jalan dan Jembatan</p>	
<p>MANFAAT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Paket-Paket di lingkungan BPJN Jayapura • Mengetahui permasalahan dan merumuskan upaya tindak lanjut permasalahan yang dihadapi saat pelaksanaan pekerjaan di lapangan. 	

SASARAN PROGRAM	FOTO
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	<p>Deskripsi : Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Paket – Paket Preservasi Jalan dan Jembatan di lingkungan BPJN Jayapura dan BPJN Wamena T.A. 2021</p>
<p>PAKET/KEGIATAN</p>	
<p>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jalan dan Jembatan</p>	
<p>MANFAAT</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Paket-Paket Preservasi di lingkungan BPJN Jayapura • Mengetahui permasalahan dan merumuskan upaya tindak lanjut permasalahan yang dihadapi saat pelaksanaan pekerjaan di lapangan. 	

SASARAN PROGRAM

Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

FOTO

Deskripsi : Pengadaan Rosin Ester BPJN Jayapura, Lokasi Penyimpanan : Gudang PT Bisma Indoraya, Surabaya.

PAKET/ KEGIATAN

Pengadaan Rosin Ester BPJN Jayapura

MANFAAT

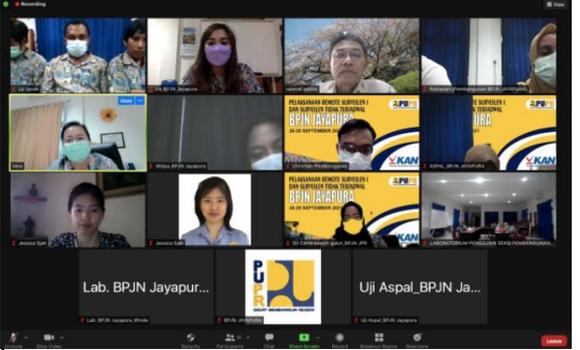
- Pemenuhan kebutuhan untuk mendukung kegiatan penanganan jalan dan jembatan (pembuatan marka jalan) di lingkungan BPJN Jayapura



SASARAN PROGRAM	FOTO
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	<p>Deskripsi : Workshop Perpress 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpress Nomor 16 Tahun 2018 khusus bagi Pengusaha Orang Asli Papua</p>
PAKET/ KEGIATAN	
Workshop/ Pelatihan	
MANFAAT	
Menambah pengetahuan dan kemampuan di bidang Pengadaan Jasa Kontruksi	

SASARAN PROGRAM	FOTO
<p>Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</p>	<p>Deskripsi : Kegiatan Uji Petik oleh Bidang Pembangunan dan Pengujian di Ruas Jalan Serui-Menawi</p>
<p>PAKET/ KEGIATAN</p>	
<p>Pelaksanaan Uji Petik</p>	
<p>MANFAAT</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Untuk memeriksa kesesuaian bahan jalan dan jembatan sehingga layak dan sesuai dengan spesifikasi teknis 	

SASARAN PROGRAM	FOTO
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Deskripsi : Kegiatan Uji Petik oleh Bidang Pembangunan dan Pengujian di Waropen (Lokasi Jembatan Simde)
PAKET/ KEGIATAN	
Pelaksanaan Uji Petik	
MANFAAT	
<ul style="list-style-type: none">• Untuk memeriksa kesesuaian bahan jalan dan jembatan sehingga layak dan sesuai dengan spesifikasi teknis	

SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Deskripsi : Workshop Penyusunan RKK Pelaksanaan dan Pelaporan SMKK yang diadakan oleh Bidang Pembangunan dan Pengujian	
PAKET/ KEGIATAN		
Akreditasi Laboratorium Berakreditasi KAN		
MANFAAT		
<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan laboratorium terstandarisasi; • Menghindari kesalahan dan pengulangan dari proses pengujian atau kalibrasi. 		

2021

SATUAN KERJA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA